



Lampiran 8.1 | Penilaian Gender

11 Mei 2022

DAFTAR ISI

1	Pengantar	5
1.1	The Green Guarantee Company	5
1.2	Latar belakang penilaian.....	5
1.3	Prinsip Umum	7
2	Penilaian Gender	8
2.1	Penilaian Sektor/Area Hasil	9
2.2	Penilaian Negara	26
2.3	Temuan dari Penilaian Negara dan Sektor	63
2.4	Kata Penutup	69
3	Aplikasi dari Program	70
3.1	Peran dan Tanggung Jawab (AE dan EE)	70
3.2	Prosedur Operasional.....	71
3.3	Pemantauan dan Evaluasi (Implementasi).....	81
3.4	Desain Proyek yang Responsif Gender	82
3.5	Mekanisme pengaduan dan keterlibatan pemangku kepentingan	85
3.6	Sumber yang direkomendasikan untuk pemilik proyek.....	89
4	Referensi	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kerentanan dan Kapasitas GCF untuk Perubahan – Energi dan pembangkit listrik.....	10
Tabel 2.	Kerentanan dan Kapasitas GCF untuk Perubahan - Transportasi.....	13
Tabel 3.	Kerentanan dan Kapasitas GCF untuk Perubahan - Bangunan, kota, industri, dan peralatan.....	16
Tabel 4.	Kerentanan dan Kemampuan GCF untuk perubahan Jaminan kesehatan, makanan dan air	20
Tabel 5.	Kerentanan dan Kemampuan GCF untuk Perubahan - Infrastruktur dan lingkungan binaan	23
Tabel 6.	Intervensi spesifik sektor yang potensial untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi ..	64

Tabel 7. Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat tantangan di setiap negara	68
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Empat elemen utama dari TSP	71
Gambar 2 Diagram Alur Proses	72
Gambar 3 Proses TSP	72
Gambar 4 Apa yang dimaksud dengan analisis gender?.....	74
Gambar 5 Apakah yang dimaksud dengan penilaian tentang gender oleh seorang pakar?.....	77
Gambar 6 Apa yang dimaksud dengan kerangka kerja hasil responsif gender	79
Gambar 7 Spesialis.....	80
Gambar 8 Diagram arus TSP	81
Gambar 9 Contoh Mekanisme Pengaduan.....	87

■

Pernyataan Resmi

Dokumen berikut ini dilampirkan sesuai dengan pengajuan Proposal Pembiayaan Penuh oleh Green Guarantee Company kepada Green Climate Fund sejalan dengan pengajuan mereka atas Permohonan Fasilitas Persiapan Proyek (FPP) tertanggal 13 Oktober 2021. Tim yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Development Guarantee Company
- Green Guarantee Company
- Pegasys Limited
- IBIS Consulting
- SR Consulting

Kontribusi dari masing-masing organisasi serta konsultan independen sangat penting. Meskipun kami tidak dapat secara khusus memperkenalkan individu-individu yang disebutkan di bawah ini atas keahlian, dedikasi, energi, dan kemurahan hati mereka, peran mereka dalam penyusunan lampiran ini dicatat dengan baik. Dampak dari Lampiran ini akan menjadi produk dari kontribusi kolektif mereka.

1 Pengantar

1.1 THE GREEN GUARANTEE COMPANY

Green Guarantee Company (GGC) merupakan penjamin untuk obligasi dan pinjaman hijau serta iklim. Misi GGC adalah membantu negara-negara berkembang mendapatkan akses ke modal global untuk pembiayaan iklim dengan mentransfer peringkat tingkat investasinya melalui jaminan kepada peminjam negara berkembang. Jaminan atas obligasi atau pinjaman itu menghilangkan risiko gagal bayar atas pembayaran bunga dan pembayaran pokok dengan menjadikan GGC sebagai pembayar cadangan, jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Jaminan yang diberikan oleh GGC akan membantu kredit proyek perubahan iklim di negara berkembang, meningkatkan peringkat kredit sub investasi mereka menjadi peringkat investasi sehingga memenuhi syarat bagi investor dari pasar modal global mempertimbangkannya untuk investasi.

Produk dan instrumen keuangan hijau akan memainkan peran kunci di semua sektor mitigasi iklim dan adaptasi iklim. Ini termasuk obligasi hijau dan pinjaman hijau yang mengalokasikan penggunaan hasil untuk investasi iklim yang memenuhi syarat.

Jaminan GGC akan meningkatkan kredit obligasi dan pinjaman untuk memungkinkan pasar modal global berinvestasi dalam obligasi dan pinjaman hijau serta iklim dari negara berkembang - memprioritaskan jalur dekarbonisasi dan rendah karbon di pasar negara berkembang. Tujuan GGC adalah menggunakan jaminan untuk menyediakan proyek mitigasi iklim yang membantu mewujudkan ekonomi karbon nol bersih dan proyek adaptasi iklim yang menghasilkan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Membantu membangun kembali ekonomi pasar berkembang hari ini untuk penghijauan di masa mendatang akan membantu mencegah krisis ekonomi dan finansial akibat iklim, melindungi pemulihan investasi hari ini, dan menciptakan keuntungan ekonomi jangka panjang. Sebuah studi baru-baru ini oleh IFC (2021) menunjukkan bahwa langkah-langkah pemulihan hijau di 21 ekonomi pasar berkembang yang utama (mewakili 62 persen populasi dunia dan 48 persen emisi global) di sektor-sektor tertentu dapat menghasilkan \$10,2 triliun peluang investasi, menciptakan 213 juta kumulatif pekerjaan langsung baru dan pengurangan emisi GRK sebesar 4 miliar ton CO₂e setiap tahun antara 2020-2030. Portofolio GGC mencakup 11 negara berkembang utama serta 8 negara lainnya.

Selain mempertimbangkan dampak positif terkait dengan pembiayaan yang diberikan, GGC juga menyadari pentingnya memastikan praktik gender dan lingkungan serta sosial yang sehat untuk menghindari dan/atau meminimalkan potensi kewajiban keuangan dan reputasional. Akibatnya, pertimbangan faktor gender dan perlindungan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan dan proses transaksi GGC untuk memastikan risiko dan dampak utama dikelola secara efektif sepanjang siklus hidup transaksi.

1.2 LATAR BELAKANG PENILAIAN

GGC sepenuhnya menganut prinsip kepemilikan negara, yang berarti bahwa untuk setiap proyek yang menerima jaminan dari GGC, Penilaian Gender (Lampiran 8.1) dan Rencana Tindakan (Lampiran 8.2) akan ada dan sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan baik oleh GCF (GCF & UNWOMEN 2017) dan kerangka

hukum internasional yang berlaku, kebijakan gender regional dan nasional, atau kebijakan publik lainnya kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tingkat proyek Penilaian Gender dan Rencana Tindakan akan memastikan bahwa setiap proyek dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung / selaras dengan dengan strategi pembangunan nasional lainnya yang mempromosikan kesempatan yang sama, pengurangan kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dari tingkat nasional, regional dan sektor-perspektif tertentu. Ini akan mencakup analisis lanskap kesetaraan gender dan data yang relevan dengan negara tuan rumah dan di sektor yang ditargetkan, termasuk Komitmen yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Lampiran ini berfungsi sebagai dasar untuk responsivitas GGC – melalui jaminan mereka – untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan untuk memantau hubungan antara kesetaraan gender, mitigasi dan adaptasi iklim, dan kelestarian lingkungan.

Lampiran ini diinformasikan melalui tinjauan literatur yang ada dan database sekunder, serta masukan dari ahli dan analisis studi kasus, dan dianggap sebagai dokumen hidup yang akan diperbarui secara berkala. Ini terdiri dari tiga bagian:

1. **Bab 1:** Pengenalan dalam hal penilaian gender, termasuk prinsip-prinsip pedoman umum.
2. **Bab 2:** Deskripsi naratif tentang i) isu-isu dan pertimbangan gender utama untuk masing-masing dari lima **wilayah hasil** (sektor) yang akan ditinjau oleh GGC untuk mendukung proyek-proyek, membangun kerentanan dan kapasitas GCF untuk perubahan; dan ii) deskripsi tingkat tinggi tentang pertimbangan dan komitmen gender utama di masing-masing dari **19 negara yang difokuskan** GGC. Maksud dari bagian ini adalah untuk mendemonstrasikan pemahaman luas GGC tentang isu-isu penting gender per wilayah hasil dan negara, yang akan mendukung pengambilan keputusan investasi, menginformasikan pengembangan indikator untuk Rencana Tindakan Gender (Lampiran 8.2), dan dieksplorasi secara lebih mendalam setelah sebuah proyek dipertimbangkan oleh GGC.
3. **Bab 3:** Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan GGC untuk memastikan secara praktis proyek-proyek sejalan dengan pendekatan GCF terhadap arus utama gender tingkat proyek.

Penilaian Gender ini akan digunakan oleh GGC¹, AE² serta pemilik proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan standar fidusia GCF, standar perlindungan lingkungan dan sosial, serta Kebijakan Gender.

¹ GGC bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menjalankan program yang didanai GCF dan akan meninjau rencana tindakan gender, penilaian dan laporan Dampak Iklim sebagaimana dan ketika diserahkan oleh peminjam

² Entitas Terakreditasi bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau bahwa GGC mematuhi prinsip dan standar fidusia GCF, standar perlindungan lingkungan dan sosial serta Kebijakan Gender (semuanya merupakan standar untuk akreditasi GCF), serta kebijakan dan persyaratan GCF lain yang relevan, sesuai dengan perjanjian hukum yang relevan (master akreditasi perjanjian dan perjanjian kegiatan yang didanai).

1.3 PRINSIP UMUM

Sebelum penerbitan jaminan, pemilik proyek harus mengetahui pedoman gender berikut yang berlaku selama proses investasi (mengumpulkan analisis atau dokumen gender yang relevan) serta pelaksanaan proyek (misalnya pelaporan perkembangan):

- Proposal proyek mempertimbangkan isu-isu utama dan persyaratan desain dan implementasi yang peka gender.
- Proyek ini selaras dengan kebijakan dan strategi negara yang ada dan praktik terbaik (dalam penilaian gender, tinjauan kebijakan, hukum dan peraturan harus dilakukan oleh pemilik proyek).
- Proyek ini selaras dengan strategi pembangunan nasional yang mempromosikan kesempatan yang sama, baik di wilayah intervensi maupun wilayah sektor.
- Pemilik proyek mempertimbangkan undang-undang internasional termasuk teks diskursif yang dikeluarkan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- Pemilik proyek akan melakukan konsultasi dan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan Lampiran 7.
- Anggaran yang cukup dialokasikan untuk melakukan penilaian gender dan menyusun rencana tindakan.
- Pemilik proyek akan mengarahkan/mendukung seorang ahli jika diperlukan untuk mendukung proses perlindungan gender yang mempertimbangkan jenis, skala, dan konteks proyek.
- Pemilik proyek harus berusaha menyelaraskan proyek dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berkomitmen pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (SDG 5) serta tema lintas sektoral yang relevan.
- Pemilik proyek harus menetapkan indikator kinerja gender yang bermakna untuk proyek (indikator gender ditetapkan untuk mengukur dan membandingkan situasi perempuan dan laki-laki dari waktu ke waktu). Indikator gender dapat mengacu pada indikator kuantitatif (berdasarkan statistik yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin) atau indikator kualitatif (berdasarkan pengalaman, sikap, pendapat dan perasaan perempuan dan laki-laki), dan indikator ini harus dimasukkan ke dalam Rencana Tindakan Gender menyeluruh GGC (Lampiran 8.2) sehingga portofolio kemajuan proyek terkait gender dapat dikumpulkan dan dilacak.

Dengan melaksanakan pedoman ini, pemilik proyek dapat membangun bukti kesenjangan gender di pasar dan lembaga dan menerapkannya pada pendekatan proyek mereka. Oleh karena itu, GGC mendorong para pemangku kepentingannya untuk memahami kendala-kendala gender utama serta peluang-peluang, yang akan berupaya untuk mempersempit kesenjangan, menghilangkan hambatan-hambatan, mendukung peluang-peluang dan memberi masukan ke dalam dialog yang lebih aktif dan terlibat dengan para pemangku kepentingan mengenai pengungkit utama untuk perubahan yang berkelanjutan dan inklusif.

2 Penilaian Gender

Bagian berikut memberikan deskripsi naratif tentang isu-isu dan pertimbangan gender utama per wilayah hasil, yang didasarkan pada kerentanan dan kapasitas GCF untuk perubahan, serta deskripsi tingkat tinggi tentang pertimbangan dan komitmen gender utama di masing-masing dari 19 negara yang difokuskan GGC. Maksud dari bagian ini adalah untuk mendemonstrasikan pemahaman luas GGC tentang isu-isu penting gender per wilayah hasil dan negara, yang akan mendukung pengambilan keputusan investasi, menginformasikan pengembangan indikator untuk Rencana Tindakan Gender (Lampiran 8.2), dan dieksplorasi secara lebih mendalam setelah sebuah proyek dipertimbangkan oleh GGC. Penilaian dilakukan tanpa adanya alur proyek dan merupakan dokumen hidup yang akan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan utama.

Seperti yang telah dijelaskan di awal dalam Proposal Pendanaan Penuh, GGC belum mengidentifikasi proyek atau lembaga tertentu yang akan mereka tangani. Sebaliknya, mereka telah berkomitmen untuk mempertimbangkan penerbitan jaminan untuk proyek iklim di 19 negara tertentuⁱ, yang termasuk dalam satu atau lebih dari lima wilayah hasilⁱⁱ. Sampai saat GGC didekati oleh investor / pengembang / pemilik proyek dengan proposal proyek tertentu, tidak mungkin – juga tidak berguna – untuk mengembangkan analisis, penilaian, dan rencana tindakan gender yang terfokus dan terperinci yang biasanya dibutuhkan oleh GCF dari Proposal Pendanaan Penuh. Namun penting bagi GGC untuk memiliki dan menunjukkan pemahaman yang luas tentang:

- i. Hubungan antara gender dan obligasi hijau (*diuraikan lebih lanjut dalam Bab 3*);
- ii. Kerentanan terkait gender dan kapasitas untuk perubahan untuk masing-masing dari lima wilayah hasil, yang secara luas berkaitan dengan negara-negara berkembang yang akan dilihat oleh GGC untuk mendukung proyek-proyeknya; dan
- iii. Masing-masing dari 19 negara status quo dengan memerhatikan komitmen gender utama, lembaga dan pertimbangan yang bertanggung jawab (yaitu, isu-isu mendesak yang mempengaruhi kesetaraan gender dan isu-isu pemberdayaan perempuan).

Informasi ini pada dasarnya memberikan dasar tentang apa yang diketahui GGC berkaitan dengan negara-negara terpilih dan area hasil sehubungan dengan gender, dan yang terpenting, mencerminkan titik awal di mana GGC akan meminta investor/pengembang/pemilik proyek untuk memberikan informasi lebih rinci, analisis gender spesifik konteks, penilaian dan rencana tindakan yang sejalan dengan Kebijakan Gender GCF dan persyaratan terkait. Temuan dari penilaian sektor dan negara ini telah digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja yang akan digunakan GGC untuk mengidentifikasi potensi intervensi responsif gender yang harus dipertimbangkan sebagai bagian dari proses desain proyek untuk memaksimalkan manfaat gender dari proyek tertentu. Kerangka tersebut merangkum tantangan gender yang paling mendesak di setiap negara yang relevan dengan proyek perubahan iklim, dan intervensi spesifik sektor yang paling mungkin untuk mengatasi setiap tantangan. Dengan demikian, informasi ini berfungsi sebagai dasar bagi GGC dan pemilik proyek untuk mengidentifikasi jenis-jenis masalah gender yang harus ditangani oleh suatu proyek di negara tertentu, dalam sektor tertentu.

³ Indonesia; Filipina; Brazil; Trinidad dan Tobago; Afrika Selatan; India; Bangladesh; Pakistan; Vietnam; Kenya; Rwanda; Pantai Gading; Mesir; Maroko; Senegal; Kamboja; Laos; Tanzania; Uganda

⁴ akses energi dan pembangkit listrik; transportasi rendah emisi; bangunan, kota, industr dan perawatan ; kesehatan, ketahanan pangan dan air; infrastruktur dan lingkungan binaan

2.1 PENILAIAN SEKTOR/AREA HASIL

Penilaian ini berbasis kinerja dan berfungsi untuk menguraikan kerentanan dan kapasitas perubahan terkait gender GCF. Dengan demikian, informasi ini menjelaskan jenis kerentanan yang harus diperluas dan diselidiki lebih lanjut oleh penilaian gender tingkat proyek tertentu, serta jenis solusi (yaitu, kapasitas untuk perubahan) yang harus diintegrasikan ke dalam desain proyek dan proses penyampaian.

2.1.1 AKSES ENERGI DAN PEMBANGKIT LISTRIK

Area hasil GCF **Akses Energi dan Pembangkit Listrik** adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan dengan demikian mengatasi emisi GRK serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek di bawah area ini mencakup: menghasilkan energi dari sumber-sumber terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi, air, dan bioenergi berkelanjutan; mentransmisikan, mendistribusikan, dan menyimpan energi secara efisien dan andal; dan mempromosikan akses pada energi bersih dengan cara mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim sembari mengurangi emisi.

Sektor energi *on-grid*, khususnya di negara berkembang, terbiasa melayani pusat perkotaan dan industri dan daerah pedesaan yang kurang terlayani, sehingga gagal memenuhi kebutuhan masyarakat miskin – terutama perempuan dan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Cara mentransmisikan energi dan distribusinya juga telah menciptakan ketidaksetaraan gender dalam hal pekerjaan dan konsumsi, dengan perempuan yang terkena dampak negatif. Oleh karena itu, meskipun telah diterima secara universal bahwa akses ke energi adalah katalis untuk pembangunan ekonomi, pendorong pengentasan kemiskinan, serta menjadi kendaraan untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, peluang untuk meningkatkan akses bagi perempuan belum sepenuhnya dieksplorasi. SDG 7 menanggapi hal ini, dengan memastikan “akses ke energi terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern **untuk semua**” – terkait erat dengan SDG5a dalam penyediaan akses yang merata ke sumber daya ekonomi dan alam. Namun, negara berkembang masih jauh dari memenuhi SDG 7. Pada 2015, 1,2 miliar orang tidak memiliki akses listrik dan 85% di antaranya berada di Afrika sub-Sahara dan Asia. Selain itu, sepertiga dunia kekurangan akses ke energi bersih untuk memasak. Dalam 10 tahun terakhir, langkah signifikan telah dilakukan untuk mengalihkan pembangkit listrik dari fosil ke energi terbarukan dengan hasil peningkatan yang signifikan dicapai pada 2018 hingga 2020, dengan sebanyak 31,6% dari total pembangkit di OECD berasal dari sumber terbarukan (IEA 2020). Investasi di EBT telah meningkatkan akses energi ke masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani dan dilaporkan menciptakan lebih banyak pekerjaan di pembangkit dan layanan bahan bakar fosil. Terlepas dari pencapaian ini, saat ini lebih dari 700 juta orang di seluruh dunia masih kekurangan akses listrik.

Isu-isu yang disebutkan di atas mengharuskan sektor energi di seluruh dunia untuk beralih ke solusi rendah atau tanpa karbon, dan untuk mengubah aspek ekonomi, sosial dan gender dari sektor yang telah berkontribusi pada pembangunan yang timpang dan tidak setara. Kurangnya layanan listrik dan energi

berkorelasi langsung dengan kemiskinan dan elemen terkait seperti akses ke pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, kemiskinan energi secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan, membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan, hanya karena fakta bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan sangat mewakili orang-orang yang hidup dalam kemiskinan (Cagatay 1998). Oleh karena itu, akses energi sangat penting untuk pemberdayaan ekonomi. Mengakui hubungan gender-energi-kemiskinan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berkontribusi pada hasil yang berarti, itu menguntungkan perempuan dan mengatasi kerentanan energi gender seperti yang diidentifikasi oleh GCF (bersama dengan kapasitas untuk perubahan):

Tabel 1. Kerentanan dan Kapasitas GCF untuk Perubahan – Energi dan pembangkit listrik

Kerentanan	Kemampuan untuk Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> • Bagian perempuan dan rumah tangga yang dikepalai perempuan tanpa akses energi • Dampak yang dialami perempuan karena kurangnya akses energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran perempuan dalam penyediaan/penggunaan rumah tangga • Pangsa perempuan dan dalampasar tenaga kerja energi dan jenis pekerjaan • Kebijakan dan kerangka kelembagaan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam energi / pembangkit listrik

Diskusi tentang kerentanan ini digeneralisasi untuk negara-negara yang difokuskan GGC. Hal ini mengacu pada perempuan yang rentan dalam rumah tangga miskin di pedesaan maupun di perkotaan. Perempuan memiliki kebutuhan energi yang berbeda dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka sebagai akibat dari tingkat akses yang berbeda terhadap sumber daya; akses mereka yang terbatas terhadap pengambilan keputusan di rumah dan di masyarakat; dan lingkup pengaruhnya yang terbatas terhadap proses dan alokasi sumber daya. Dalam hal energi, peran perempuan terbatas pada penyediaan energi dan lingkup pengaruh mereka adalah rumah tangga (terutama dapur). Namun keputusan untuk pembelian rumah tangga dan penentuan prioritas adalah urusan laki-laki. Pria biasanya akan memprioritaskan peralatan hiburan, TV dan radio di atas peralatan hemat tenaga kerja. Peran gender ini bermanifestasi menjadi kerentanan gender yang berdampak negatif terhadap perempuan. Kerentanan energi gender ini secara luas terbagi dalam lima bidang yang saling terkait:

Kemiskinan Energi. Kemiskinan energi adalah³ akibat dari pendapatan yang buruk dan bersifat siklus sehingga, kecuali ada intervensi yang ditargetkan, hal ini akan berlangsung terus menerus selama beberapa generasi. Pendapatan yang rendah dikaitkan dengan tempat tinggal yang tidak efisien energi, kurangnya peralatan modern, kurangnya penerangan modern dan fasilitas memasak. Akibatnya, orang-orang di rumah tangga miskin energi memiliki kinerja buruk dalam hal kualitas hidup dan cenderung merusak lingkungan lebih dari yang lain karena ketergantungan mereka pada biomassa untuk konstruksi tempat tinggal mereka dan

³ Kemiskinan energi telah didefinisikan sebagai tidak adanya pilihan yang memadai dalam mengakses layanan energi yang memadai, terjangkau, andal, berkualitas tinggi, aman, dan ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan manusia (Reddy, 2000).

untuk memasak. Perempuan dan anak perempuan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghimpun dan mengumpulkan kayu bakar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan lebih baik. Keamanan perempuan dan anak perempuan dalam situasi ini cenderung dikompromikan.

Pendidikan. Anak-anak perempuan yang memiliki akses ke energi di rumah mereka mendapatkan awal kehidupan yang baik. Perempuan-perempuan muda dapat membaca di malam hari, para perempuan dapat membantu anak-anak mereka setelah matahari terbenam dan umumnya lebih aman dari kekerasan seksual. Anak-anak dari rumah yang memiliki akses energi mencapai jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses energi.

Kesehatan. Akses energi yang buruk atau kemiskinan energi berdampak besar pada kesehatan perempuan. Di seluruh dunia 2,5 juta kematian dini terkait dengan polusi udara rumah tangga yang timbul dari asap memasak (IEAb 2020). Di Afrika sub-Sahara hampir 490.000 kematian dini per tahun terkait dengan polusi udara rumah tangga disebabkan oleh kurangnya akses ke fasilitas memasak yang bersih (IEAb 2020). Karena peran dan tanggung jawab mereka dalam menyiapkan makanan, ibu dan anak-anak adalah yang paling parah terkena dampaknya. Kurangnya energi juga mempengaruhi penyimpanan dan kualitas makanan. Karena kurangnya lemari pendingin, makanan mudah rusak sebelum dikonsumsi di rumah tangga miskin. Kesehatan yang buruk mempengaruhi belajar anak-anak dan produktivitas bagi para perempuan. Tanpa peralatan, perempuan harus secara manual melakukan semua pekerjaan rumah tangga yang melelahkan secara fisik, dan pada gilirannya membahayakan kesehatan mereka.

Di fasilitas kesehatan terpencil, pendinginan vaksin dan obat lain sangat penting untuk mempertahankan umur simpan obat. Pandemi Covid mengekspos kerentanan masyarakat dengan pusat kesehatan tanpa listrik karena vaksin tidak dapat disimpan di pusat-pusat kesehatan ini. Kematian ibu telah dilaporkan lebih baik di antara masyarakat yang memiliki listrik di pusat kesehatan mereka.

Ketidakmampuan untuk mengakses modal untuk RE atau untuk perusahaan sendiri. Perempuan memiliki banyak tantangan dalam mengakses modal untuk usaha mereka sendiri dan dalam banyak kasus berakhir di kegiatan ekonomi informal dan berpenghasilan rendah. Diperkirakan 70% usaha kecil dan menengah milik perempuan di sektor formal di negara berkembang kekurangan akses terhadap modal yang mengakibatkan kesenjangan pembiayaan global yang diperkirakan mencapai \$300 miliar (IFC n.d.). Di Kenya, perempuan memiliki setengah dari semua usaha kecil dan menengah, tetapi usaha mereka mengalami pertumbuhan yang lebih rendah daripada usaha milik laki-laki karena kurangnya dukungan dan sumber daya (Hassan dkk 2013). Pertumbuhan yang terbatas juga disebabkan oleh kurangnya kapasitas, akses yang buruk ke teknologi atau modal untuk membeli teknologi dan ketergantungan pada tenaga kerja.

Untuk mengatasi kerentanan energi gender ini secara memadai, diperlukan perubahan menyeluruh dalam penyediaan layanan energi yang menerapkan lensa gender, untuk mencapai kesetaraan gender dan hasil yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan melalui pilihan.** Perempuan harus mampu membuat pilihan tentang energi apa yang mereka butuhkan dan bagaimana menggunakannya. Memiliki pilihan adalah hasil dari pemberdayaan ekonomi yang timbul dari pendapatan dan pengetahuan yang lebih baik. Oleh karena itu, penyediaan layanan energi akan memfasilitasi kemampuan perempuan untuk menghasilkan lebih banyak melalui:
 - a. **Penyediaan energi** yang bertujuan untuk menyediakan energi yang memadai dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan energi produktif perempuan (memasak, pengolahan makanan dan

pengumpulan air), dan kebutuhan energi strategis (penerangan untuk belajar malam, keamanan dalam masyarakat, usaha perempuan, informasi untuk tujuan pemberdayaan dan emansipasi); dan

- b. **Pasokan listrik** yang memungkinkan perempuan untuk mendirikan dan menjalankan usaha kecil, khususnya yang berbasis di pedesaan.

2. **Reformasi kebijakan buta gender.** Meninjau kerangka kerja kebijakan nasional dan memastikan bahwa pembangkit energi bersih, terjangkau dan tepat untuk melayani semua, termasuk masyarakat pedesaan dan miskin. Sangat penting bahwa kebijakan diperkenalkan untuk mengatasi tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pengusaha perempuan, dan untuk menjawab kebutuhan praktis dan strategis perempuan.

Saat ini, sebagian besar dari mereka yang terkena dampak dari kurangnya layanan energi berada di daerah pedesaan, sehingga struktur, kebijakan, dan strategi energi saat ini buta gender dan gagal memenuhi persyaratan atau mengatasi kendala yang dihadapi perempuan pedesaan. Struktur tersebut berfokus pada investasi pembangkit listrik yang sebagian besar menargetkan mereka yang berada di daerah perkotaan, dengan mengabaikan masyarakat miskin.

3. **Memungkinkan peluang menghasilkan pendapatan.** Program/proyek energi yang efektif harus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Ini termasuk meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan kualitas produk dan memungkinkan petani untuk meminta dan menerima harga yang adil untuk produk mereka. Energi juga merupakan katalis untuk menciptakan peluang wirausaha yang dapat diikuti oleh perempuan dan pemuda, dan memungkinkan penggantian energi tenaga kerja (manusia dan hewan) dengan teknologi mekanik untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, misalnya penyediaan air irigasi; meningkatkan pemrosesan dan penyimpanan makanan, contohnya dengan penggunaan lemari es.
4. **Memastikan keberlanjutan melalui inisiatif lokal.** Untuk memastikan keberlanjutan skema RE *off grid* di daerah pedesaan, ada kebutuhan mendesak untuk mempromosikan pembentukan lembaga pedesaan berbasis lokal untuk memberikan dukungan teknis di sektor RE seperti pengisian baterai surya, instalasi hidro mikro dan pasokan suku cadang, dan memasang serta memperbaiki perangkat keras energi. Dorongan ini dapat melangkah lebih jauh untuk meningkatkan skala kecil, teknisi lokal swadaya dan bisnis yang dijalankan oleh perempuan dan terletak di daerah pedesaan.

Contoh bagaimana jenis intervensi ini telah diintegrasikan ke dalam energi dan pembangkit listrik GCF yang ada:

P178: Fasilitas G5 Sahel Gurun menjadi Tenaga. Proyek Gurun Sahel (yang mencakup negara-negara Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania dan Niger) bertujuan untuk meningkatkan akses dan keamanan energi bagi perempuan dan laki-laki, dan secara langsung memberi manfaat bagi 3,5 juta orang (di mana 1,75 juta di antaranya adalah perempuan). Lebih dari 700.000 perempuan dan laki-laki juga akan mendapat manfaat secara tidak langsung dari proyek ini. Untuk memastikan pengarusutamaan gender yang efektif, proyek ini akan mengatasi hambatan kelembagaan dan keuangan yang berfokus pada pembukaan peluang bagi perempuan. Secara khusus, ini akan memberikan pelatihan kepada staf lembaga keuangan dan bank untuk meningkatkan kapasitas staf mereka untuk mengintegrasikan gender dalam sistem dan penyediaan layanan

mereka. Selain itu, proyek ini akan membantu lima negara Sahel untuk mengembangkan kerangka kerja peraturan yang responsif gender.

FP168: Kerangka Kerja Pembiayaan Akses Energi (LEAF). Program ini (mencakup Nigeria, Kenya, Ghana, Guinea, Ethiopia, dan Tunisia) berupaya membuka modal utang mata uang lokal untuk meningkatkan energi terbarukan yang terdesentralisasi dan terdistribusi di lima negara Afrika. LEAF bertujuan untuk menyediakan akses ke energi yang bersih dan andal bagi 1,18 juta rumah tangga (yang secara langsung menguntungkan 2,95 juta wanita) dengan membuka pembiayaan bagi perusahaan Energi Terbarukan Terdesentralisasi untuk menerapkan solusi *Solar Home Systems* (SHS), *Green Mini-Grid* (GMG) dan *Captive Power*. Program ini akan memfasilitasi akses kredit kepada perempuan untuk solusi SHS, GMG dan captive power, dan diperkirakan akan menciptakan 15.600 pekerjaan bagi perempuan selama peningkatan skala perusahaan DRE.

2.1.2 TRANSPORTASI EMISI RENDAH

Area hasil **Transportasi** GCF berfokus pada peningkatan akses ke transportasi rendah emisi dengan mendukung sistem transportasi publik dan swasta rendah dan nol emisi. Skema tersebut biasanya berada di bawah proyek GCF lintas negara atau kota yang mendukung Kota Hijau atau Sistem Perkotaan Tangguh, dengan dimasukkannya opsi konektivitas tahan iklim. Proyek-proyek tersebut selaras dengan SDG 11 “Kota dan Komunitas Berkelanjutan”, yang mencakup target spesifik (11.2) yang mengikat negara-negara untuk menyediakan “akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan **untuk semua**, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas akses transportasi publik, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua”. Dengan demikian, target ini memungkinkan pencapaian komitmen SDG 5 (Kesetaraan Gender) untuk mendukung perempuan dalam menerima hak yang sama atas sumber daya ekonomi. Dalam konteks inilah GCF telah mendefinisikan kerentanan spesifik-transportasi dan kapasitas untuk perubahan (エラー! 参照元が見つかりません。).

Untuk menciptakan perubahan yang berarti bagi perempuan dan anak perempuan yang bergantung pada transportasi untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, domestik dan rekreasi, GGC akan berusaha untuk memastikan bahwa setiap proyek transportasi rendah emisi yang didukungnya, berkontribusi untuk membuka dan memungkinkan kapasitas untuk perubahan ini.

Tabel 2. Kerentanan dan Kapasitas GCF untuk Perubahan - Transportasi

Kerentanan	Kemampuan untuk Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> • Bagian perempuan di antara pengguna angkutan umum, bagian perempuan tidak memiliki akses ke angkutan umum • Dampak yang dialami perempuan dan laki-laki karena kurangnya atau buruknya kualitas transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran perempuan dalam masyarakat/keluarga dalam kaitannya dengan pola transportasi • Bagian perempuan dan laki-laki dalam pasar tenaga kerja transportasi dan jenis pekerjaan • Kebijakan dan kerangka kerja kelembagaan untuk mempromosikan kesetaraan gender di sektor transportasi

Dengan transportasi menjadi salah satu kontributor utama emisi dari GHG, ada dorongan global untuk mempromosikan investasi dalam sistem berkelanjutan yang mendukung perpindahan dari kendaraan pribadi

ke fokus pada transportasi umum rendah emisi, berjalan kaki dan bersepeda (Bank Dunia 2021). Sebagai bagian dari banyak tanggapan nasional untuk membangun kembali dengan lebih baik setelah COVID-19, banyak negara melihat ini sebagai waktu yang tepat untuk membuat perubahan dalam desain, perencanaan, dan operasi transportasi. COVID-19 telah memperdalam dan memperluas ketidaksetaraan yang ada di sektor transportasi, “mengaburkan kerugian transportasi, kemiskinan dan pengucilan sosial” di mana kebutuhan dan hak perempuan secara historis sebagian besar diabaikan, dan perempuan secara signifikan kurang terwakili dalam investasi transportasi dan pengambilan keputusan (Jennings 2020). Hal ini antara lain menghambat kemajuan terhadap SDG 5 dan SDG 11, di antara lainnya.

Oleh karena itu, dampak dan keberlanjutan pergeseran dan perbaikan dalam sistem transportasi akan sangat bergantung pada sejauh mana kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya dipertimbangkan, sebagai dasar untuk mempengaruhi dan menginformasikan keputusan investasi dan desain. Sebagai titik awal, penting untuk mempertimbangkan perbedaan yang ada dalam pola transportasi dan perilaku perjalanan pria dan wanita, dan bagaimana sistem yang ada merespons, atau gagal meresponsnya.

Perbedaan perilaku perjalanan. Perjalanan perempuan dianggap 'banyak-tujuan' karena pembagian kerja berbasis gender di sebagian besar rumah tangga, yang berarti bahwa perempuan memerlukan transportasi yang lebih bervariasi untuk kewajiban mereka, mulai dari pekerjaan formal dan informal, hingga tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan (yaitu menemani anak-anak dan kerabat lanjut usia ke sekolah, klinik, dll.) (Forum Transportasi Internasional 2019) (Jennings 2020). Sementara karakteristik sosial (seperti status pendapatan, usia, jumlah tanggungan, dll.) mempengaruhi keputusan transportasi perempuan, perjalanan mereka biasanya terdiri dari jarak yang lebih dekat, dengan perjalanan yang lebih kompleks, dengan berjalan kaki yang sering dilakukan selama jam-jam di luar jam sibuk. Perjalanan juga sering kali multimoda untuk memungkinkan lebih banyak fleksibilitas (Forum Transportasi Internasional 2019).. Ini berarti, meskipun sebagian besar perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke semua alat transportasi daripada laki-laki, mereka cenderung melakukan perjalanan yang lebih sering (sering kali lebih pendek) yang diperlukan untuk tanggung jawab kesehatan, makanan dan perawatan – sebagai tambahan yaitu transportasi yang mereka butuhkan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan (Jennings 2020).

Gender CC juga mengidentifikasi serangkaian dampak gender pada kesehatan manusia di sektor transportasi, di mana perempuan menghadapi risiko dan tantangan yang lebih besar daripada laki-laki. Ini termasuk: “transportasi perempuan untuk beban berat jarak jauh; keselamatan jalan yang tidak memadai bagi pejalan kaki; pencemaran melalui polusi udara; kekerasan seksual terhadap perempuan dalam sistem transportasi dan daerah terpencil; dan ngebut di mobil.” (Gender CC n.d.) Penilaian Jenning tentang apakah sistem transportasi pasca-COVID-19 di sub-Sahara Afrika melayani kebutuhan perempuan menyoroti faktor risiko fisik serupa, yang sering kali diperparah oleh pembatasan budaya yang membatasi cara perempuan bergerak (waktu jauh dari rumah, lokasi yang dapat mereka kunjungi, moda transportasi, kebutuhan untuk pendamping dll).

Akses ke peluang. Hambatan mobilitas gender menghalangi akses perempuan ke peluang menghasilkan pendapatan – kekhawatiran yang disorot dalam laporan ILO tahun 2017, yang mengidentifikasi “kurangnya transportasi sebagai tantangan terbesar bagi tenaga kerja perempuan”. Ini adalah faktor yang jelas berkontribusi pada fakta bahwa, pada tahun 2021, hanya 49% wanita yang berpartisipasi dalam angkatan

kerja formal secara global, dibandingkan dengan 75% pria (Bank Dunia 2021). Pengusaha perempuan juga terkendala oleh biaya transportasi, yang sering kali membatasi akses mereka terhadap pendapatan, peluang, layanan, dan pasar (Jennings 2020).

Kurangnya keterwakilan perempuan di sektor transportasi. Terlepas dari temuan di atas, rencana mobilitas jarang mempertimbangkan kebutuhan keselamatan, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas dan keterjangkauan perempuan dan anak perempuan (UNEP 2020). Hal ini sebagian terkait dengan rendahnya keterwakilan perempuan di sektor transportasi secara global, yang telah menyebabkan marginalisasi kepentingan dan kebutuhan perempuan (UNEP 2020). Sektor ini sangat tergantung gender, di mana perempuan sebagian besar dipekerjakan dalam pekerjaan dengan gaji rendah/status rendah dengan sedikit, jika ada, peluang untuk perkembangan karir. Salah satu hambatan terbesar bagi masuknya perempuan ke dalam tenaga kerja transportasi adalah tingginya tingkat kekerasan terhadap pekerja transportasi; hal ini memengaruhi kemampuan untuk mendorong perempuan agar memenuhi syarat dan bekerja di sektor ini dan memengaruhi retensi karyawan perempuan (ILO 2013).

Penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan sangat penting untuk transisi ekonomi rendah karbon, yang mencakup sektor mobilitas yang lebih terintegrasi. Meningkatkan kesetaraan gender dan keselamatan dalam transportasi akan mengarah pada tingkat penggunaan angkutan umum rendah emisi, bersepeda dan berjalan kaki yang lebih tinggi (Saunders 2019). Untuk mencapai hal ini diperlukan serangkaian intervensi, mulai dari reformasi kebijakan hingga keterlibatan yang terarah dan bermakna dengan perempuan, dan peningkatan kapasitas, baik untuk agen dan operator transportasi, dan perempuan yang bekerja di sektor ini. Kapasitas untuk perubahan ini akan diintegrasikan (jika sesuai) ke dalam proyek-proyek yang ingin didukung oleh GGC (Saunders 2019):

1. **Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan transportasi berbasis gender**, yang mengacu pada analisis sosial dan gender terkini serta perencanaan partisipatif (contohnya konsultasi inklusif gender) dengan penerima manfaat baik perempuan dan laki-laki.
2. **Analisis rutin yang sedang berlangsung, serta evaluasi dan pelaporan, dari isu gender dan transportasi selama perencanaan, pelaksanaan dan operasi transportasi** untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko fisik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi keterjangkauan dan akses transportasi untuk kelompok populasi yang berbeda. Ini termasuk memantau pola pengguna, untuk memastikan layanan menanggapi kebutuhan mobilitas khusus perempuan dan anak perempuan, yang menggunakan transportasi untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan peluang ekonomi.
3. **Peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk agen transportasi dan operator layanan** untuk memastikan sistem tersedia untuk secara aktif mengelola dan menanggapi isu-isu gender baik secara internal (dengan karyawan) dan secara eksternal (dengan pengguna).

Contoh bagaimana jenis intervensi ini telah diintegrasikan ke dalam proyek Transportasi GCF yang ada dijelaskan di bawah ini:

FP166: Transit Kereta Api untuk Greater Metropolitan Area (GAM). Untuk mengatasi rendahnya keterwakilan perempuan di sektor transportasi Kosta Rika, proyek telah berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung bagi perempuan melalui i) perekrutan dan penyediaan ruang bagi pengusaha perempuan untuk menjadi bagian dari penyedia layanan tersier bahwa sistem transit kereta api

listrik diperoleh; dan ii) meluncurkan program untuk menarik perempuan untuk bergabung dengan tenaga kerja kereta api dengan berkomitmen untuk mendukung kesempatan yang sama, dan melindungi karyawan perempuan melalui pengembangan protokol yang berkembang untuk mencegah pelecehan seksual di tempat kerja.

FP085: BRT Karachi Hijau. Untuk mengembangkan sistem *bus rapid transit* (BRT) tanpa emisi yang aman dan dapat diakses oleh semua orang, proyek telah berkomitmen untuk melakukan survei penumpang secara berkala untuk melacak perubahan dalam (i) ukuran dan keragaman pengendara, dan (ii) tingkat kepuasan mereka, yang hasilnya akan digunakan dalam pengambilan keputusan terkait rute, harga, jam sibuk dan tidak sibuk, dll. Program peningkatan kesadaran juga akan diluncurkan untuk menangani semua bentuk pelecehan, kekerasan, penindasan, pencurian, dan masalah keamanan lainnya, dengan semua karyawan dilatih untuk menangani dan mencatat insiden pelecehan seksual dan kejahatan lainnya.

2.1.3 BANGUNAN, KOTA, INDUSTRI DAN PERALATAN

Kota sebagai pusat pertumbuhan dan dengan jejak karbonnya yang besar, menawarkan peluang untuk mengatasi perubahan iklim dengan potensi untuk mencapai dampak positif yang tinggi secara keseluruhan. Dengan demikian, GCF telah mengidentifikasi **Bangunan, kota, industri, dan peralatan** sebagai salah satu dari delapan area hasil utama. Daerah hasil ini pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan tumpang tindih cakupannya dengan empat area hasil lainnya; yaitu a) Pembangkitan dan akses energi, b) Transportasi, c) Infrastruktur dan lingkungan binaan dan d) Kesehatan pangan dan ketersediaan air. Area hasil “Gedung, Kota, Industri, dan Peralatan” berfokus pada penerapan teknologi yang lebih baik, efisiensi energi, desain hemat energi, dan pengenalan insentif yang mengubah perilaku untuk membantu mengurangi penggunaan energi.

Area hasil juga menanggapi sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 11 “Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan”, SDG 7.3 “Efisiensi energi”, SDG 9 “Industri, Inovasi dan Infrastruktur”, dan SDG 5 “Kesetaraan Gender”. Area hasil ini secara khusus berbicara dengan SDG 11b dengan berupaya mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana terintegrasi menuju **inklusi**, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana. Hal ini sangat relevan di banyak negara di mana perempuan adalah pengguna dan konsumen utama energi. Dalam mengembangkan dan mengimplementasikan proyek di bawah area hasil ini, sangat penting untuk memahami dan menangani kerentanan gender yang relevan dengan ruang ini (seperti yang diidentifikasi oleh GCF dalam エラー! 参照元が見つかりません。 di bawah). Dengan demikian, peluang yang berpusat pada perempuan (contohnya kapasitas untuk perubahan) dapat dimasukkan ke dalam desain proyek.

Tabel 3. Kerentanan dan Kapasitas GCF untuk Perubahan - Bangunan, kota, industri, dan peralatan

Kerentanan	Kemampuan untuk Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> • Bagian perempuan di antara penghuni bangunan, pengguna infrastruktur publik/komunal, pengguna peralatan • Bagian perempuan dalam kemiskinan energi/bahan bakar • Dampak yang dialami perempuan dan laki-laki karena pola penggunaan sumber daya yang tidak efisien di gedung, kota, industri dan/atau peralatan (kesehatan, kemiskinan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran perempuan dalam bangunan, kota, industri berkaitan dengan pola penggunaan sumber daya/energi • Bagian perempuan dan laki-laki dalam pasar tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang relevan • Kebijakan dan kerangka kerja kelembagaan untuk mempromosikan kesetaraan gender di gedung, kota, industri

Penentu utama kerentanan dalam tata kelola perkotaan telah diidentifikasi sebagai:

- aset individu (khususnya pendapatan, dan juga perumahan dan pekerjaan);
- aset kolektif (lokasi, layanan, dan infrastruktur); dan
- faktor kelembagaan (khususnya pengetahuan, praktik tata kelola dan perencanaan kota).

Masing-masing memanifestasikan dan memengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda:

Risiko perumahan, penampungan dan kesehatan. Penyediaan perumahan untuk kota-kota di negara berkembang tidak mencukupi dan tidak memadai, dengan perumahan dan ruang hidup yang lebih baik diakses oleh anggota masyarakat yang lebih kaya. 40% rumah tangga termiskin di perkotaan dikepalai oleh perempuan (IIED 2021), artinya sebagian besar perempuan kepala keluarga tinggal dalam kondisi perumahan yang buruk, termasuk permukiman kumuh dan permukiman informal. Ini memiliki berbagai kekurangan tempat tinggal yang mencakup peralatan energi yang tidak efisien atau tidak ada peralatan sama sekali, ventilasi yang buruk, dan kurangnya atau tidak dapat diandalkan pasokan air dan sanitasi. Mengabaikan kebutuhan perempuan dalam layanan dasar seperti listrik di rumah tangga, penyediaan air dan sanitasi di kota menyebabkan beban yang sangat memakan waktu dan berat secara fisik bagi perempuan dalam hal pengumpulan air, risiko kesehatan yang parah dari polusi dalam ruangan dari tungku kayu bakar, arang atau minyak tanah, dan penyakit yang timbul dari air yang tidak diolah. Selain itu, karena banyak rumah tangga perkotaan tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk membeli semua makanan yang mereka butuhkan, mereka sering menambah pasokan makanan mereka melalui kegiatan pertanian perkotaan. Namun, ketersediaan lahan di kota untuk praktik semacam itu terbatas dan bisa mahal, dan beberapa peraturan kota membatasi produksi tanaman di ruang terbuka. Kualitas makanan dan umur simpan juga berkurang karena ruang penyimpanan yang buruk dan kurangnya peralatan yang sesuai di rumah-rumah miskin ini.

Pekerjaan dan waktu produktif. Ketersediaan pencahayaan berpeluang untuk meningkatkan jam kerja dan belajar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan, perempuan harus memiliki kualifikasi yang tepat, mendapatkan informasi tentang pekerjaan yang tersedia dan waktu untuk melamar, serta sarana untuk mengajukan surat lamaran mereka. Di Brazil sebuah studi dilakukan yang menunjukkan bahwa ketika faktor-faktor lain seperti pendidikan dikendalikan, perempuan dengan peralatan listrik di rumah mereka lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan daripada mereka yang tidak (Deloitte 2015). Itu dianggap jika mereka memiliki keunggulan kompetitif dengan memperoleh informasi tentang iklan pekerjaan jauh lebih mudah karena mereka memiliki akses ke peralatan komunikasi dan karena mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melakukan tugas-tugas manual, sehingga memiliki waktu yang relatif lebih banyak untuk mengakses informasi.

Akses permodalan. Isu-isu ini menghalangi perempuan untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak-anaknya atau pun keluar dari kemiskinan, menyebabkan mereka tidak memanfaatkan energi secara efisien atau beralih ke polusi melalui penggunaan sumber energi yang tidak bersih dan memilih pembuangan limbah yang tidak memadai.

Kekerasan dan Keamanan Gender. Kekerasan berbasis gender merupakan ancaman sangat nyata di berbagai kota, karena jalanan yang remang-remang, stasiun transportasi yang sepi, daerah terpencil dan moda transportasi yang padat membuat pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan cenderung

sangat mungkin terjadi. Para perempuan masih harus melalui rute yang panjang, mahal, dan sering kali berbahaya untuk melakukan pekerjaannya. Kekerasan urban pada perempuan membatasi pergerakan dan pemanfaatan ruang publik mereka, terutama di kalangan yang paling miskin dan terpinggirkan (Nesbitt-Ahmed dkk 2015). Keterbatasan-keterbatasan tersebut berpotensi mengurangi peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial mereka, sehingga perempuan berisiko mengalami gangguan kesehatan dan stres, serta menciptakan lebih banyak pelanggaran terhadap hak-hak perempuan di perkotaan.

Hubungan Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan. Ketidakadilan hubungan kekuasaan di perkotaan serta kurang terwakilinya perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan dan sektor-sektor utama menunjukkan bahwa umumnya, pengaruh para perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Salah satu contohnya adalah dalam industri konstruksi, di mana laki-laki merencanakan, mendesain, dan membangun rumah, sekolah, toko, jalan, fasilitas drainase, dan ruang lainnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus para perempuan dan remaja putri. Hal ini turut berperan dalam peningkatan kematian di kalangan perempuan, sebagai contoh, para perempuan tidak bisa mengevakuasi diri dengan mudah dari sebuah gedung karena struktur fisiknya kurang mendukung untuk kondisi darurat (H Jabeen 2014).

Sumber daya ekonomi dan peluang kerja. Peluang kerja merupakan salah satu area di mana ketidakadilan gender sangat besar, di mana para perempuan cenderung mengisi pekerjaan yang gajinya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, meskipun perempuan tersebut memiliki kualifikasi dan pengalaman profesional. Tacoli menemukan bahwa 54% perempuan yang bekerja di 14 kota-kota besar di sepuluh negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, adalah pedagang kaki lima, pekerja rumahan, dan pemulung, dan ketika terjadi krisis ekonomi, kelompok inilah yang langsung terkena dampak negative (Tacoli 2012). Sifat pekerjaan yang diambil oleh para perempuan (bahkan dalam sektor formal sekali pun, seperti industri manufaktur, industri makanan, dan industri ringan lainnya) membuat mereka rentan, terutama dalam hal hak-hak pekerja, keamanan kerja, gaji yang terlalu sedikit dan tidak sesuai, eksploitasi serta jalur promosi jabatan yang rumit. Hal ini mengakibatkan para perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pemberdayaan ekonomi, dengan demikian mereka tidak punya peluang untuk menanggukkan diri.

Daerah perkotaan menawarkan berbagai kesempatan untuk mengatasi kerentanan-kerentanan tersebut dan menciptakan komunitas yang lebih tangguh dan inklusif, seperti:

1. **Kebijakan kesetaraan gender, pemrograman dan perencanaan di kota-kota besar dan daerah perkotaan lainnya.** *Bye-laws*, kebijakan, dan standarnya perlu diterapkan untuk: memastikan bahwa para perempuan dapat memperoleh harga sewa yang sesuai dengan perjanjian sewa yang aman; program perlindungan sosial didanai dengan benar dan digelintirkan untuk kalangan yang paling rentan; serta standar rumah hijau yang dirancang untuk mempertimbangkan kebutuhan para perempuan; dan sebagainya.
2. **Pengambilan keputusan di perkotaan yang lebih inklusif dan efisien** Kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan lokal, regional, dan nasional akan meningkatkan pengaruh para perempuan dalam kebijakan dan politik. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih informatif tentang bagaimana harus merancang suatu pelayanan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan seimbang. Wewenang untuk

mengambil keputusan dalam lingkungan-binaan yang sesuai dengan peran gender, akan sangat berkontribusi secara signifikan dalam kemampuan adaptasi terhadap iklim-iklim ekstrem.

3. **Sistem transportasi inklusif** Seperti yang diuraikan dalam *Transport Result Area*, transportasi perkotaan sebaiknya tidak hanya melayani, sebagai contoh, rute bus yang menghubungkan suatu distrik dengan pusat-pusat ekonomi (yang memenuhi kebutuhan para laki-laki) tapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan para perempuan sebagai seorang pengasuh, yang membutuhkan rute transportasi dari rumah ke pasar atau pusat penitipan anak yang lebih baik. Jaringan transportasi juga harus menghubungkan wilayah-wilayah tertinggal dengan daerah perumahan, agar para perempuan dapat memanfaatkannya untuk memberikan pelayanan domestik.
4. **Meningkatkan akses dan keterjangkauan terhadap perlengkapan rumah tangga dan gedung-gedung hijau:** Peningkatan akses untuk memperoleh fasilitas listrik yang terjangkau juga akan mengatasi kemiskinan waktu para perempuan dalam memanfaatkan peralatan rumah tangga yang lebih hemat energi dan terjangkau. Terbukti bahwa pemakaian berbagai peralatan rumah tangga tersebut membantu para perempuan untuk meraih tujuan ekonominya, mengurangi pemanfaatan energi kotor dan menghemat waktu. Hal ini juga berlaku dalam Peningkatan standar alat pemanas dan pendingin air, serta penambahan suku cadang hemat energi.
5. **Meningkatkan keamanan di seluruh kota:** Desain ruang terbuka, taman, pencahayaan, penempatan pasar dan toilet yang cermat, serta penyediaan transportasi yang aman, termasuk memberikan pelatihan pada para supir dan kondektur, merupakan semua bidang yang berpengaruh besar terhadap keamanan semua orang - terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Proyek GCF berikut ini ditujukan untuk mengurangi emisi dari gedung-gedung, perkotaan, industri, dan peralatan rumah tangga dengan mendukung kebijakan, standar, dan teknologi yang mengurangi kebutuhan energi.

FP068. Fasilitas Kota Hijau. Program ini ditujukan untuk membantu daerah perkotaan beralih ke pembangunan kota yang rendah-karbon, dan tahan terhadap iklim. Dengan demikian, Fasilitas ini akan membantu kota-kota target dalam pengarusutamaan gender sehingga menjamin para perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam peluang kerja dan forum pengambilan-keputusan sehingga infrastruktur dan pelayanan yang sensitif gender dapat menjadi suatu norma. Pelatihan-pelatihan akan membantu para perempuan membangun kemampuan agar dapat berperan dalam aktivitas dialog kebijakan dan mempromosikan kesetaraan gender dalam mengakses pelayanan dan pekerjaan melalui penyebaran informasi.

FP103 Promosi Proses Memasak Ramah-Iklim: Kenya dan Senegal. Proyek ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan pasar *Improved Cook Stoves* (ICS) di Kenya dan Senegal serta meningkatkan standar dan kualitas produksi dan pemasaran ICS secara signifikan di daerah pinggiran dan perkotaan yang miskin. Diperkirakan, proyek ini akan bermanfaat bagi 11,23 juta orang di mana sebagian besar adalah perempuan, sebagai konsumen dan pengguna kompor masak. Proyek ini juga akan menciptakan peluang penghasilan dari pembuatan kompor masak dan memastikan keterlibatan para perempuan dalam inisiatif.

Selain itu, proyek ini ditujukan untuk memberdayakan perempuan dan membangun kepercayaan diri mereka dalam mengakses keuangan, pengadaan, dan peluang pendukung lainnya.

2.1.4 JAMINAN KESEHATAN, MAKANAN DAN AIR

Dengan proyeksi populasi mencapai 9,7 miliar orang pada tahun 2050, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produksi pangan sebanyak 50% (Rainforest Alliance 2020). Krisis ketahanan pangan global ini membutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas makanan yang dihasilkan, serta memastikan agar jejak sektor lingkungannya berkurang, dalam konteks perubahan iklim. Berdasarkan hal ini, area hasil **Jaminan Kesehatan, Pangan dan Air** GCF berusaha mendukung sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan rendah emisi melalui tiga paradigma baru, yaitu: 1) Mendukung pertanian tangguh; 2) Memfasilitasi layanan konsultasi informasi iklim dan manajemen risiko; dan 3) Konfigurasi ulang sistem pangan. Dengan demikian, proyek-proyek GCF yang termasuk dalam kelompok tersebut otomatis akan mendukung beberapa target penting di bawah SDG 2, yaitu: Menanggulangi kelaparan, meraih keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta mendukung pertanian yang berkelanjutan. Secara spesifik:

- SDG 2.1: “menanggulangi kelaparan dan menjamin **semua orang memperoleh akses**, terutama penduduk miskin dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, membutuhkan keamanan, makanan yang bergizi dan mencukupi untuk setahun penuh”
- SDG 2.2: “menanggulangi segala bentuk malnutrisi, termasuk pencapaiannya, pada tahun 2025, target yang telah disetujui secara internasional untuk mengakhiri *stunting* dan *wasting* pada anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun, serta memenuhi kebutuhan nutrisi **remaja putri, ibu hamil dan menyusui**, serta lansia”
- SDG 2.3: “menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan berskala kecil, terutama **perempuan**, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, melalui perolehan akses yang aman dan merata terhadap lahan, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pemasaran, dan berbagai peluang untuk memperoleh manfaat tambahan dan pekerjaan-pekerjaan non-pertanian”.

Ketiga target tersebut berkaitan langsung dengan SDG 5 tentang Kesetaraan Gender, dan secara kolektif menegaskan peran penting perempuan dalam mendukung pergeseran praktik pertanian global. Namun, walaupun perempuan mengisi setidaknya separuh tenaga kerja pertanian dunia, mereka tidak mendapatkan bagian yang setara terhadap aset, sumber daya, dan layanan yang dibutuhkan oleh para petani untuk beroperasi secara berkelanjutan (IFAD 2020). Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan dan kerentanan yang harus mereka hadapi, di mana secara kolektif, para perempuan - dan anggota keluarganya - tersebut cenderung berisiko mengalami ketidakamanan pangan atau air, atau bahaya terkait kesehatan (seperti yang diidentifikasi oleh GCF, lihat エラー! 参照元が見つかりません. di bawah ini).

Tabel 4. Kerentanan dan Kemampuan GCF untuk perubahan Jaminan kesehatan, makanan dan air

Kerentanan	Kemampuan untuk Perubahan
------------	---------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa dan jumlah perempuan yang sangat rentan terhadap ketidakamanan pangan atau air, atau ancaman gangguan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran perempuan dalam komunitas target • Distribusi dan jumlah perempuan dan laki-laki di pasar kerja yang relevan dan jenis pekerjaan • Kebijakan dan kerangka kerja kelembagaan untuk mengatasi kerentanan
--	--

Meskipun kerentanan-kerentanan tersebut bermanifestasi secara berbeda berdasarkan konteks spesifik di negara yang bersangkutan, berikut ini adalah seluruh tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang.

Perbedaan peran dan tanggung jawab. Selain menjadi komponen penting dari tenaga kerja pertanian global - di mana perempuan cenderung bekerja paruh waktu, musiman, atau melakukan pekerjaan berupah rendah dibandingkan laki-laki - para perempuan juga melakukan sebagian besar pekerjaan yang tidak dibayar, seperti: pekerjaan rumah tangga, memasak, berternak, menggembala hewan, mengasuh anak, dan merawat lansia (S Huyer dkk 2021). Dalam memikul tanggung jawab seperti itu, para perempuan sering kali lebih cenderung membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan keluarganya, dibanding laki-laki - sehingga, ketika seorang perempuan mampu memperoleh pendapatan sendiri dan memiliki kendali yang lebih besar dalam anggaran rumah tangga, umumnya akan lebih sehat dan tangguh (Rainforest Alliance 2020).

Dampak perubahan iklim. Tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga dan pekerjaan diperumit oleh meningkatnya dampak umum yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap air dan ketahanan pangan (UN 2019). Para perempuan jauh lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dibandingkan laki-laki karena ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam sangat besar; kerentanan tersebut bermanifestasi dalam berbagai bentuk - kelangkaan air yang menghabiskan waktu para perempuan dan remaja putri untuk mengambil air, malnutrisi dan gangguan kesehatan akibat kelangkaan air dan pangan, kualitas air yang buruk, dan angka kekerasan berbasis gender karena kondisi rumah tangganya serba terbatas (IFAD 2020) (IUCN 2020). Para perempuan juga cenderung hidup dalam garis kemiskinan, artinya pilihan mereka untuk bekerja dalam tekanan iklim lebih terbatas (Rainforest Alliance 2020).

Sektor pertanian - yang menjadi tempat bekerja banyak perempuan pedesaan termiskin - adalah yang paling terdampak oleh kekeringan, banjir, dan gelombang panas (IFAD 2020) dan tanpa akses terhadap berbagai sumber daya yang penting (akan diuraikan di bawah), para perempuan tidak memiliki kemampuan adaptif yang cukup untuk pulih kembali dan merespon tekanan dan serangan semacam itu.

Akses terhadap sumber daya (lahan, keuangan, ketrampilan, dan teknologi). Pada dasarnya, lahan yang dimiliki oleh para perempuan lebih sedikit - termasuk lahan pertanian (15% vs 85%) - dibandingkan laki-laki, dan meskipun dalam kasus di mana negara mengakui hak perempuan untuk memiliki dan memanfaatkan suatu lahan, hukum adat yang diskriminatif menunjukkan bahwa di banyak negara, hak-hak ini tidak terjamin (IFAD 2020) (UNWOMEN 2021). Meningkatnya keamanan kepemilikan lahan oleh para perempuan akan meningkatkan kemampuan produksi mereka, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengakses keuangan. Namun, kesulitan mengakses jaminan semacam itu cenderung diperumit oleh keterbatasan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan para perempuan, artinya para perempuan tidak bisa beralih dari subsistensi ke pasar yang lebih berharga dan berorientasi pada produksi, ataupun berinvestasi

pada sistem dan teknologi-teknologi rendah karbon yang lebih efisien dan tangguh (S. Huyer dkk 2021). Penelitian yang dilakukan oleh FAO menunjukkan bahwa memberikan akses sumber daya alam dan finansial, pendidikan dan lahan, yang sama kepada para perempuan akan meningkatkan produktivitas pertanian (sampai 30%) dan memperbaiki nutrisi keluarganya.

Oleh karena itu, proyek-proyek pertanian yang difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan, pangan, dan air harus dirancang dengan cermat agar dapat mengatasi berbagai keterbatasan terkait gender ini, karena inilah kunci untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki keamanan pangan dan nutrisi, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan ketangguhan (FAO, IFAD & Bank Dunia 2015). Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, antara lain (UNWOMEN 2021):

1. **Membuka hambatan yang menghalangi peran perempuan dalam rantai nilai pedesaan**, dengan mendukung kebijakan reformasi dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk membela hak kepemilikan lahan oleh para perempuan, menciptakan dan menggalakkan kerja sama perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh para perempuan, serta memberi kemudahan akses terhadap produk-produk keuangan dan asuransi.
2. **Meningkatkan ketrampilan pertanian iklim cerdas dan alih teknologi** untuk mendukung para petani perempuan dan kooperatif agar dapat beralih dari metode tradisional ke CSA dengan memperkenalkan teknik-teknik agroekologi yang tahan iklim dan memanfaatkan teknologi-teknologi terbarukan dan hemat energi di berbagai rantai nilai.
3. **Meningkatkan akses untuk memperoleh informasi tentang iklim dan sistem peringatan dini**, secara tepat waktu dan dalam format yang sesuai (antara lain, bahasa, penggunaan gambar, pemanfaatan teknologi ponsel/media, dsb.) agar para petani perempuan mampu mengambil keputusan dan menerapkan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana untuk menghadapi kondisi-kondisi ekstrem, seperti melindungi hasil bumi, rumah, dan alat/infrastruktur pertanian.

Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana intervensi jenis ini diintegrasikan dalam proyek-proyek Jaminan Kesehatan, Pangan dan Air:

FP175: Meningkatkan ketangguhan masyarakat dan jaminan air di Daerah Tangkapan Hulu Sungai Athi, Kenya. Dalam menciptakan sistem pengamatan, pengawasan, dan pengujian hidro-meteorologis yang modern di daerah tangkapan air, proyek ini berkomitmen untuk memastikan bahwa titik fokus gender dalam kementerian-kementerian terkait terlibat dalam proses instalasi dan rehabilitasi, dan bahwa persentase perempuan yang memperoleh akses dan memanfaatkan sistem jaringan ini diawasi secara penuh untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang merata.

FP179: Program Sebaran Teknologi Adaptasi Iklim Pertanian Tanzania Proyek ini memiliki beberapa target ambisius yang berupa pemberian produk-produk dan solusi keuangan terpadu (pinjaman, jaminan, dan asuransi) serta bantuan teknis bagi para petani perempuan, untuk mendukung pengembangan dan adopsi berbagai teknologi dan solusi perubahan iklim. Termasuk pembuatan pilihan alur kredit khusus-perempuan, solusi jaminan yang mengintegrasikan kebutuhan khusus para perempuan. Proyek ini juga memastikan bahwa 80% institusi keuangan, yang membiayai aktivitas pertanian, terdorong untuk memberikan pinjaman dan jaminan bagi para petani perempuan.

2.1.5 INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN BINAAN

Negara-negara berkembang cenderung terpapar bencana yang disebabkan oleh iklim buruk, badai, siklon tropis, banjir, kenaikan permukaan air laut, dan kekeringan, serta bahaya-bahaya sekunder, seperti kelaparan dan pandemi. Sebagian besar korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat bencana alam ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan binaan (Kachana Ginige dkk 2014).. Jika mempertimbangkan masalah infrastruktur, kerusakan yang disebabkan oleh cuaca buruk membuat sebagian besar uang dibelanjakan untuk perbaikan, penanggulangan bencana, pembersihan puing-puing, pemukiman kembali dan bantuan kemanusiaan; yang tentu saja mendorong pemerintahnya ke dalam jurang krisis keuangan, kebangkrutan bisnis, dan kemiskinan. Banyak yang tak mampu pulih kembali tanpa bantuan dari luar. Dan tentu saja, gender adalah aspek utama yang mempengaruhi kerentanan dan kemampuan untuk mengatasi bencana akibat iklim ini.

Di sisi lain, infrastruktur berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini adalah tulang punggung pertumbuhan dan perkembangan, serta saling berkaitan dan saling bergantung dengan hampir semua sektor, seperti transportasi, energi, pertanian, telekomunikasi, industri, perumahan, air dan sanitasi, dsb. Keterkaitan ini menciptakan tantangan tersendiri karena kegagalan infrastruktur tertentu akan berdampak bagi infrastruktur lainnya. Sebagai contoh, jika badai merusak aliran listrik, maka sistem pengadaan air, sistem transportasi, dan energi yang dibutuhkan oleh gedung dan peralatan rumah tangga juga akan terdampak. Meskipun infrastruktur berperan penting, di negara-negara berkembang, masih ada celah yang bermakna dalam penyediaan infrastruktur tersebut. Yaitu, celah dalam infrastruktur baru, terutama infrastruktur tangguh iklim.

Karena berperan penting dalam adaptasi dan mitigasi iklim, maka **infrastruktur dan lingkungan binaan** dimasukkan sebagai salah satu dari 8 area hasil utama GCF. Tujuan area hasil ini tersebar di empat area “transisi”, yaitu: i) lingkungan binaan, ii) energi dan industri, iii) keamanan manusia, pekerjaan, dan kesejahteraan, dan iv) pemanfaatan-lahan, hutan, dan ekosistem. GCF bertujuan untuk membangun infrastruktur baru dan penguatan infrastruktur tradisional kuno agar lebih tangguh iklim.

Area hasil ini sejalan dengan SD 9 “Industri, inovasi, dan infrastruktur” serta berkaitan dengan SDG 11 “Kota dan komunitas berkelanjutan”, SDG 6 “Air bersih dan sanitasi” serta SDG 7 “Energi bersih dan terjangkau”. Karena bersifat lintas sektor, tentu saja penyediaan infrastruktur tangguh iklim memiliki potensi besar untuk mengatasi perubahan iklim dan membangun kota dan komunitas tangguh iklim. Dan karena bencana alam yang dipicu oleh iklim berdampak negatif terhadap perempuan dan kaum miskin, jauh lebih parah dibandingkan dampaknya pada kaum laki-laki dan masyarakat atas; pengarusutamaan gender dalam penyediaan infrastruktur sangat berperan penting. Beberapa contoh kerentanan yang dihadapi kaum perempuan dan laki-laki akibat penggunaan infrastruktur konvensional yang tidak tangguh iklim akan diuraikan berikut ini (yang dikembangkan sesuai dengan identifikasi GCF dalam エラー! 参照元が見つかりません。).

Tabel 5. Kerentanan dan Kemampuan GCF untuk Perubahan - Infrastruktur dan lingkungan binaan

Kerentanan	Kemampuan untuk Perubahan
------------	---------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa dan jumlah kaum perempuan yang kurang mendapatkan akses terhadap infrastruktur yang memadai (persediaan air, sanitasi, perlindungan dari banjir, perumahan, akses energi, dsb.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran perempuan dalam penyusunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan binaan • Distribusi dan jumlah perempuan dan laki-laki di pasar kerja yang relevan dan jenis pekerjaan • Kebijakan dan kerangka kerja kelembagaan yang mendukung akses seimbang terhadap infrastruktur yang memadai.
--	---

Evakuasi yang lambat akan menimbulkan korban jiwa. Dalam kondisi ekstrem, rumah tangga yang miskin dan rentan (perempuan sebagai kepala keluarga, termasuk lansia dan penderita disabilitas) cenderung sulit dievakuasi dibandingkan individu lainnya sehingga cenderung menjadi korban jiwa (S. Kottegoda 2011). Sebagian tidak memperoleh peringatan dini karena peralatan komunikasi atau waktu untuk membaca dan mendengarkan berita sangat terbatas.

Kehilangan rumah karena konstruksi bangunan buruk. Sekali lagi, perempuan yang menjadi kepala keluarga dan miskin adalah yang paling terdampak karena struktur bangunannya murah dan tidak bisa menahan kondisi cuaca yang ekstrem. Mereka menjadi jauh lebih rentan dan umumnya, tidak mampu membangun kembali rumah mereka.

Kelangkaan pangan dan kelaparan. Kaum perempuan, terutama perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, mengandalkan subsistensi pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Umumnya, mereka melakukan pertanian tadah hujan di dataran rendah atau di sepanjang aliran sungai. Lahan tersebut rentan terhadap banjir dan jika hal ini terjadi, rakyat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dan harus mengandalkan bantuan kemanusiaan. Kelaparan merupakan hal yang umum terjadi di negara-negara Afrika akibat periode kekeringan yang panjang. Kelaparan akan membunuh secara perlahan-lahan dan merampas harga diri wanita.

Gangguan Keamanan lokal dan jaring pengaman. Bencana alam akibat iklim, seperti banjir, kekeringan atau kelaparan, dapat mengganggu jaring pengaman lokal, yang membuat kaum perempuan dan anak-anak tanpa pendampingan, tercerai-berai, atau yatim piatu akibat erosi dan rusaknya kontrol dan perlindungan sosial yang normal. Kurangnya kohesi sosial lebih terasa di daerah-daerah binaan dan tidak sedikit yang hilang karena selama bencana terjadi, banyak orang mencari penampungan yang berbeda-beda.

Tempat penampungan atau kamp yang tidak aman. Pasca bencana alam, kesulitan ekonomi dan keamanan cenderung mendorong para perempuan yang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung untuk mencari bantuan, penampungan sementara, dan menjalani kehidupan yang tidak aman, yang membuat mereka menjadi target potensial untuk eksploitasi dan perdagangan manusia. Banyaknya bencana yang menyebabkan meningkatnya ketidakamanan secara fisik, sosial dan ekonomi yang berdampak pada perempuan dan anak-anak merupakan salah satu dari beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia.

Respons terhadap kerentanan-kerentanan ini harus berupaya untuk menyediakan solusi-solusi infrastruktur yang tahan iklim yang berupaya untuk memperkuat ketahanan perempuan terhadap guncangan dari luar. Pendekatan yang membangun pengetahuan dan perspektif perempuan kepada pengurangan risiko bencana di dalam lingkungan buatan terbukti sangat berdampak dalam meminimalkan kerentanan terhadap perempuan (Kachana Ginige et al 2009). Beberapa intervensi itu meliputi:

1. **Koordinasi kebijakan pembangunan infrastruktur, memastikan pengutamaan gender dan iklim.** Karena sifat alami dan sektoral dari lingkungan yang dibuat, sangat penting bahwa semua sektor yang terkait merupakan bagian dari proses pengembangan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang selaras. Oleh karena itu, koordinasi sistematis kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dalam sektor pemerintahan dan penyertaan pertimbangan iklim dan gender sangatlah penting dalam berkontribusi terhadap ketahanan kohesif pada skala nasional dan sub nasional.
2. **Pengembangan aturan dan standar bangunan yang inklusif.** Industri konstruksi di negara berkembang memiliki kapasitas dan tingkatan regulasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, terdapat standar bangunan yang lemah atau tidak memenuhi syarat. Struktur bangunan tersebut tidak dapat menahan peristiwa ekstrem. Untuk masyarakat yang hidup dalam permukiman yang di bawah standar atau kumuh, tidak ada penerapan standar bangunan. Permukiman kumuh sering kali hancur saat terjadinya bencana. Negara-negara perlu untuk menilai serta merevisi aturan dan standar bangunan mereka untuk memastikan disertakannya ketahanan iklim dan pengutamaan gender. Untuk beberapa tingkatan berbeda mungkin dibutuhkan sertifikasi individu untuk pembangun dan pelatihan ulang untuk kontraktor konstruksi.
3. **Pembangunan tempat perlindungan yang sensitif terhadap gender bagi masyarakat.** Tempat perlindungan penting untuk melayani mereka yang terdampak dari bencana alam selama waktu yang dibutuhkan. Tempat perlindungan harus menyediakan keamanan dan sesuai dengan standar kebutuhan hidup sehingga memberi kenyamanan bagi mereka yang rentan. Tempat perlindungan yang sensitif gender harus dibangun untuk memastikan perempuan dan anak-anak perempuan aman serta memiliki akses terhadap layanan dasar yang penting.
4. **Komunikasi manajemen bencana dan peringatan dini.** Alat komunikasi yang tanggap gender harus dirancang berbeda untuk pria dan wanita, berdasar pada kebutuhan mereka yang berbeda. Pelatihan harus ditawarkan untuk memastikan bahwa tiap orang mengerti dan menghargai manajemen bencana, memahami tingkatan peringatan dini dan memiliki pengetahuan tentang lokasi tempat perlindungan jika mereka membutuhkannya. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat yang rentan untuk mengembangkan dan mengutamakan gender ke dalam sistem peringatan dini dan layanan informasi iklim.
5. **Memberdayakan wanita.** Sangat penting bagi negara-negara untuk membangun lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi dan masukan substantif dari perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan di semua tingkatan. Program adaptasi harus memiliki tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kebutuhan akan jaminan sosial dan gender, jaring pengaman serta partisipasi aktif dari perempuan di setiap tingkat pemerintahan melalui target dan kebijakan terkait, penguatan kapasitas, pembangunan kepemimpinan dan keterampilan teknis, serta pengakuan yang jelas.

Contoh dari bagaimana jenis intervensi ini telah diintegrasikan ke dalam proyek Infrastruktur GCF dan Lingkungan Buatan dijelaskan sebagai berikut.

Ketahanan FP133 terhadap badai dalam sektor bangunan di Antigua dan Barbuda. GCF mendukung intervensi multisektoral yang kuat yang mencakup *“bangunan masyarakat dan layanan umum yang mementingkan ketahanan iklim, pengutamaan ketahanan iklim ke dalam sektor bangunan dan mekanisme finansial serta penguatan layanan informasi iklim”*. GAP untuk proyek tersebut memastikan bahwa perempuan terlibat dalam struktur pemerintahan, dikonsultasikan secara ekstensif, serta berpartisipasi dalam keputusan dan implementasi proyek.

SAP008 Proyek Perubahan Iklim Masyarakat Skala Besar-Banjir (PPIBM-Banjir) di area rawan banjir di Bangladesh. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan terpinggirkan di daerah rawan banjir di Bangladesh. Meningkatnya banjir berdampak pada rumah tangga miskin dan kemampuan mereka untuk menghasilkan makanan yang cukup untuk keluarga mereka. Ini adalah contoh dari proyek adaptasi yang fokus kepada solusi berbasis komunitas dan sensitif kepada gender. Proyek ini mengutamakan rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga di wilayah proyek yang ditargetkan.

2.2 PENILAIAN NEGARA

Perlu dicatat bahwa penilaian ini dilakukan di belakang meja dan tidak secara langsung bersinggungan dengan gender yang relevan dan/atau Kementerian perempuan yang dirinci lebih lanjut di bawah. Hal ini karena akan terlalu dini untuk terlibat dengan institusi pemerintahan yang demikian sampai dengan adanya proposal spesifik atau proyek yang sedang dipertimbangkan yang menarik dan penting bagi mereka. Pendekatan AE dan GGC untuk terlibat dengan badan-badan ini dideskripsikan dengan lebih jelas pada 3.5.2, dan diuraikan lebih lanjut pada Lampiran 7.

2.2.1 TANZANIA

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Kementerian Pembangunan Masyarakat, Gender dan Anak (KPMGA) berkomitmen untuk – antara lain – mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender melalui perumusan kebijakan, strategi dan pedoman dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan nasional yang utama. Pekerjaan mereka didukung oleh Strategi Nasional untuk Pembangunan Gender (Republik Bersatu Tanzania 2005).
- Strategi ini dibuat berdasarkan Visi Pembangunan Tanzania 2025, Kebijakan Pembangunan Gender dan Perempuan, dan komitmen internasional utama lainnya. Pada saat penyusunan strategi tersebut, komitmen ini tercantum di dalam Tujuan Pembangunan Milenium yang telah digantikan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk SDG 5 tentang Kesetaraan Gender.
- Berkaitan dengan SDG, sebuah Tinjauan Sukarela tahun 2019 tentang kemajuan Tanzania terhadap masing-masing SDG menyorot kemajuan yang cukup positif terhadap SDG5 – termasuk implementasi program jaring pengaman sosial yang produktif dan kuat; peningkatan akses ke telepon seluler dan elektrifikasi pedesaan (yang telah mendorong inklusi keuangan dan perekonomian di antara penduduk

pedesaan – termasuk perempuan dan kepala rumah tangga perempuan); realokasi pendapatan yang ditargetkan oleh otoritas pemerintah daerah untuk upaya pemberdayaan perempuan dan kaum muda; dan peningkatan fokus oleh program sektor swasta untuk meningkatkan kemampuan wirausaha perempuan (untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan). (Republik Bersatu Tanzania 2019)

- Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gender dan mempercepat pencapaian kesetaraan gender di negara ini, pemerintah mereka juga mengamendemen Undang-Undang 1977 pada tahun 2000 dan 2004 untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Parlemen Nasional dan Otoritas Lokal.
- Negara ini juga meratifikasi dokumen-dokumen penting terkait hak asasi manusia internasional dan regional, termasuk Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Protokol SADC tentang Gender dan Pembangunan (JICA 2016). Namun, penting untuk dicatat bahwa masih ada kontradiksi dalam beberapa undang-undang (termasuk hukum adat dan agama) dan CEDAW. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi undang-undang tentang hak-hak perempuan yang menghambat pencapaian perubahan transformasional yang berkaitan dengan sikap diskriminatif terhadap perempuan (diuraikan lebih lanjut di bawah).

Tinjauan Nasional

Tanzania termasuk di antara negara-negara dengan performa terbaik di Afrika Sub-Sahara dalam hal nilai Indeks Kesenjangan Gender (GGI) pada tahun 2021, menempati urutan ke-13 dari 35 negara di kawasan tersebut dengan nilai 0,71 (dari kemungkinan nilai terbaik 1). Nilai ini menyiratkan bahwa peluang perempuan 29% lebih kecil dalam mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki di negara tersebut. GGI terdiri atas metrik di empat kategori dasar (Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi, Pencapaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik) dan dalam kasus di Tanzania, hasil terendahnya adalah kategori Pemberdayaan Politik (Forum Ekonomi Dunia 2021)

Indeks Ketimpangan Gender (GII) Tanzania adalah 0,556 pada 2019, peringkat 140 dari 162 negara (UNDP 2020). Indeks ini ditentukan berdasarkan statistik kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan aktivitas ekonomi. Dalam kasus Tanzania, beberapa ukuran utama yang mendeskripsikan peringkat GII nya, antara lain: (UNDP 2020):

- 36,9% dari kursi parlemen diduduki oleh perempuan
- 12,0% wanita dewasa pendidikannya telah mencapai setidaknya tingkat menengah dibandingkan dengan 16,9% pada rekan pria mereka
- Dari setiap 100.000 kelahiran, 524 perempuan meninggal karena kasus terkait kehamilan
- Partisipasi perempuan pada pasar tenaga kerja adalah 79,6 persen berbanding 87,3 untuk pria

Indeks Wanita, Bisnis dan Hukum (WBL) 2022 dari Bank Dunia berfokus secara khusus pada statistik terkait Ibu Kota Tanzania yakni Dar es Salaam. Dengan peringkat indeks secara keseluruhan 81,3 (dari maksimal 100), Tanzania dianggap cukup baik dari perspektif kesetaraan, terutama dalam kategori mobilitas, tempat kerja dan gaji. Sebaliknya, bidang-bidang utama yang perlu diperhatikan, antara lain:

- Pernikahan, di mana pada saat ini tidak ada badan legislatif untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan

- Aset, di mana anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta dari orang tua mereka, dan demikian juga dengan janda yang masih hidup tidak mendapatkan hak yang setara dengan duda masih hidup. (Bank Dunia 2022)

Di luar indeks ini, literatur terbaru juga menyorot beberapa tekanan terkait kerentanan gender yang dialami di Tanzania. Hal ini termasuk: “kemiskinan waktu (karena perempuan harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga); kurangnya pendidikan; tekanan kesehatan reproduksi; kurangnya aset dan akses ke layanan keuangan; dalam kasus pertanian – kurangnya akses ke tenaga kerja pria dan sumber daya seperti pupuk; dalam kasus kewirausahaan – kerangka hukum dan regulasi yang sulit dan kurangnya akses ke layanan pengembangan usaha; dan norma budaya yang melihat peranan perempuan sebagai pelaksana pekerjaan rumah tangga dan pengasuh anak” (Idris 2018). Banyak dari masalah ini yang bermunculan karena kurang efektifnya implementasi undang-undang dan kebijakan gender di Tanzania. Sebagai contoh – dan sebagaimana diilustrasikan oleh statistik yang mendukung GII – perempuan masih kurang beruntung dalam hal pekerjaan; mereka berpenghasilan lebih rendah dibandingkan pria di semua skala pendidikan dan pekerjaan dan lebih berpeluang untuk menganggur dibandingkan pria. Dan, sejalan dengan rendahnya nilai GGI untuk Pemberdayaan Politik, perempuan masih tetap kurang terwakili dalam posisi senior pemerintahan. (Chan et al 2016)

Hambatan utama untuk menerapkan kebijakan dan komitmen gender di Tanzania dikaitkan dengan: “kemauan politik yang terbatas untuk mengutamakan permasalahan gender, dan sumber daya yang terbatas untuk menerapkan kebijakan gender; rendahnya kesadaran akan hak-hak gender, hukum dan kebijakan di kalangan pemimpin setempat, badan penegak hukum dan komunitas setempat secara keseluruhan; kurang tercakupnya prioritas gender pada rancangan pelaksanaan, terutama pada tingkat pemerintahan setempat; terbatasnya kapasitas titik fokus gender di dalam kementerian dan MCDGC”. (Chan et al 2016)

2.2.2 AFRIKA SELATAN

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

Afrika Selatan dianggap sangat progresif di benua Afrika dalam hal kesetaraan gender, berdasarkan konstitusi dan instrumen hukumnya. Meskipun demikian, beberapa masalah besar terus menerus mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional di Afrika Selatan – hal ini termasuk: kekerasan berdasarkan gender, HIV, adat dan tradisi dan sistem sejarah apartheid (secara khusus *Group Areas Act*, yang secara paksa memindahkan perempuan dengan kulit berwarna – dan keluarga mereka – ke pedesaan, di mana sebagian besar infrastrukturnya belum berkembang). Kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, akses ke ilmu pengetahuan dan teknologi, kurangnya keterampilan dan koordinasi sistem gender negara tersebut merupakan beberapa aspek yang membatasi kemajuan Afrika Selatan untuk mencapai kesetaraan gender pada masyarakatnya.

- Institusi pemerintah yang utama yang bertanggung jawab untuk permasalahan gender di Afrika Selatan adalah Departemen Wanita, Pemuda dan Penyandang Disabilitas. Departemen pemerintah ini berada di bawah kepresidenan dan mandatnya adalah untuk memfasilitasi pemberdayaan sosial-ekonomi dan hak-hak perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Departemen ini juga dimandatkan untuk memastikan pengutamaan gender di semua sektor masyarakat di Afrika Selatan.

- Perundang-undangan penting yang memandu pengutamaan gender adalah Kerangka Kebijakan Gender Nasional. Kerangka kebijakan tersebut menetapkan standar dan norma untuk Program Gender Nasional. Kerangka tersebut juga merincikan strategi pengutamaan gender dan memberikan prinsip-prinsip pemandu implementasinya. Yang terpenting adalah kebijakan tersebut merincikan mekanisme jangka panjang dan pendek untuk menentukan ruang lingkup keadilan dan kesetaraan gender.
- Afrika Selatan juga membentuk Komisi Kesetaraan Gender (CGE), sebuah badan hukum independen terkait pasal 9 Konstitusi Republik Afrika Selatan, no. 108 tahun 1996. CGE bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan-ketentuan terkait kesetaraan gender dalam konstitusi.
- Untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan terkait gender di negara tersebut, pada tahun 2020 Afrika Selatan meloloskan tiga rancangan undang-undang untuk mengamendemen dua undang-undang yang ada, yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga (DVA) No. 116 tahun 1998 dan Undang-Undang Kriminal (Pelanggaran Seksual dan Undang-Undang terkait lainnya, No. 32 tahun 2007. Ketiga amendemen tersebut adalah:
 - Rancangan Amendemen Undang-Undang Kriminal dan yang terkait;
 - Rancangan Amendemen Undang-Undang Kriminal (Pelanggaran Seksual dan Hal Terkait);
 - Rancangan Amendemen Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Amendemen tersebut memungkinkan korban untuk membuat permohonan perintah perlindungan secara daring tanpa perlu hadir dalam persidangan; dan mengatur bagaimana informasi tentang pelaku, korban, dan saksi ditangani, serta bagaimana intimidasi seksual, inses, dan sebagainya ditangani.

- Selain instrumen hukum nasional Afrika Selatan adalah penandatanganan beberapa protokol dan konvensi internasional seperti CEDAW, Deklarasi Resmi tentang Kesetaraan Gender di Afrika (Juli 2004), dan Protokol SADC tentang Pembangunan dan Gender (Agustus 2008).
- Sejak tahun 2014 Afrika Selatan telah berkomitmen untuk mencapai SDG, termasuk SDG5. Dalam Tinjauan Sukarela 2019 disorot kemajuan progresif yang positif terhadap SDG 5, termasuk pengurangan pernikahan remaja, penghapusan perdagangan manusia, peningkatan kampanye kesadaran gender, dan kemajuan dalam implementasi kebijakan dan pelatihan gender.

Tinjauan nasional

Pada tahun 2021, Indeks Kesenjangan Gender Global Afrika Selatan secara keseluruhan adalah 0,78 (nilai terbaik adalah 1 dan terburuk adalah 0), menempatkannya pada peringkat ke-18 dari 156 negara. Di kawasan Sub-Sahara Afrika, Afrika Selatan menempati peringkat ke-3 dari 35 negara. Indeks GGI tersebut menunjukkan sedikit peningkatan sebesar 2% dari nilai 0,76 pada tahun 2016. Nilai ini menunjukkan bahwa perempuan 22% lebih rendah kemungkinannya untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Kesenjangan gender Afrika Selatan adalah yang terbesar dalam kategori Kesempatan dan Partisipasi Ekonomi serta Pencapaian Pendidikan, menempati peringkat 92 dan 69 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021). Kategori terbaik Afrika Selatan adalah pada Pemberdayaan Politik yang menempati peringkat 14 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Indeks Kesenjangan Gender Global (GII) Afrika Selatan adalah 0,406 pada tahun 2019, menempati peringkat 93 dari 162 negara (UNDP 2020). GII merujuk pada ketidaksetaraan berdasarkan gender yang dihitung dari

statistik kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan aktivitas ekonomi. Tiga dimensi yang terpisah itu dipecah sebagai berikut (UNDP 2020):

- 45,3% dari kursi parlemen diduduki oleh perempuan;
- 75,0% dari perempuan dewasa pendidikannya telah mencapai setidaknya tingkat menengah dibandingkan dengan 78,2% dari rekan pria mereka;
- Dari setiap 100.000 kelahiran, 119 perempuan meninggal karena kasus terkait kehamilan; dan
- Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja adalah 49,6 persen dibandingkan 62,7 persen untuk pria.

Selain itu, Indeks Perempuan, Bisnis dan Hukum Bank Dunia (Bank Dunia 2022) memberi Afrika Selatan peringkat 88,1 (dari maksimal 100). Sebagian besar indikator WBL Afrika Selatan, yaitu mobilitas, tempat kerja, gaji, pernikahan, kewirausahaan, dan aset, menunjukkan hasil yang meyakinkan. Dua area yang menjadi perhatian berkaitan dengan:

- Menjadi orang tua, karena kurangnya atau tidak memadainya tunjangan berbayar untuk cuti melahirkan; dan
- Pensiun, karena tidak memadainya tunjangan untuk kontribusi pensiun selama periode cuti dari pekerjaan karena mengasuh anak.

2.2.3 KENYA

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Organisasi gender nasional Kenya adalah Departemen Gender Negara di bawah Kementerian Pelayanan Publik, Pemuda, dan Gender. Mandat dari kementerian ini adalah untuk mengatur kebijakan gender, mengimplementasi program pemberdayaan perempuan, mendukung pengutamaan gender di semua kementerian, departemen, dan lembaga, mengembangkan kebijakan dan program terkait kekerasan berdasarkan gender. Departemen ini juga bertujuan untuk memperkuat institusi dan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan proyek gender, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (GEWE).
- Instrumen hukum utama untuk mengimplementasi persyaratan kesetaraan gender, yang diabadikan dalam konstitusi negara dan instrumen hukum lainnya, adalah Kebijakan Nasional tentang Gender dan Pembangunan (2019). Kebijakan tersebut menyelaraskan semua undang-undang dan kebijakan terkait gender supaya selaras dengan konstitusi dan untuk memastikan bahwa semuanya itu mempromosikan kesetaraan dan non-diskriminasi. Selain itu, kelompok kerja dibentuk di tingkat daerah untuk merancang regulasi dan mengusulkan aturan guna mencegah dan menanggapi kekerasan berdasarkan gender sebagai sebuah cara untuk menjalankan Undang-Undang Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (PADV) tahun 2015.
- Pada tahun 2019 dikembangkan sebuah kebijakan terkait, yaitu “Kebijakan Nasional untuk Penghapusan Sunat Perempuan (FGM)” - FGM (2019). Kebijakan ini mengusulkan strategi multisektoral yang harus dijalani melalui sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan yang bertujuan untuk menghapuskan FGM.

- Dalam usaha untuk mencapai kesetaraan gender, Kenya menandatangani berbagai konvensi internasional dan regional terkait hak asasi manusia dan yang spesifik gender seperti CEDAW. Program gender Kenya dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan spesifik gender bagi seluruh rakyatnya dan untuk mewujudkan komitmennya terhadap Agenda 2030 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Agenda 2063. Komitmen ini juga tercermin dalam Rancangan Strategis Gender Nasional tahun 2018-2022 yang menyediakan peta jalan untuk mencapai tujuan tersebut.

Tinjauan nasional

Nilai GGI Kenya pada tahun 2021 adalah 0,692, menempati peringkat 95 dari 156 negara. Ini merupakan peningkatan 14 poin dari peringkat sebelumnya, menunjukkan bahwa negara ini membuat perubahan yang positif. Kesenjangan gender Kenya adalah yang terbesar dalam kategori Pencapaian Pendidikan dan Pemberdayaan Politik yang masing-masing menempati peringkat 126 dan 79 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021). Pencapaian paritas gender terbaiknya adalah pada “Kesehatan dan Kelangsungan Hidup” yang menempati peringkat 60 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021). Namun, GGI Kenya tertinggal di belakang sebagian besar negara di kawasan Sub-Sahara Afrika, tetapi yang menggembirakan adalah Kenya menunjukkan tren kenaikan yang positif untuk menutup kesenjangan gender.

Indeks Ketidaksetaraan Gender (GII) yang diperkenalkan pada tahun 2010 oleh UNDP mencerminkan nilai 0,518, menempatkan Kenya pada peringkat 126 dari 162 negara menurut indeks tahun 2019 (UNDP 2020). Laporan HDI UNDP tahun 2020 menunjukkan komponen terpenting GII adalah sebagai berikut:

- 23,2% dari kursi parlemen diduduki oleh perempuan;
- 29,8% dari wanita dewasa pendidikannya telah mencapai setidaknya tingkat menengah dibandingkan dengan 37,3% dari rekan pria mereka;
- Untuk setiap 100.000 kelahiran, 342 perempuan meninggal disebabkan kasus terkait kehamilan; dan
- Partisipasi perempuan pada pasar tenaga kerja adalah sebesar 72,1 persen dibandingkan 77,3 untuk laki-laki.

Rata-rata dan sebagai perbandingan, dengan negara Sub-Sahara lainnya, masih ada kesenjangan gender yang besar yang berpihak kepada laki-laki yang terkait pada partisipasi politik perempuan.

Indeks Wanita, Bisnis dan Hukum (WBL) Bank Dunia tahun 2022 memberi Kenya peringkat 80,6 (dari maksimal 100). Sebagian besar indikator WBL Kenya, yaitu mobilitas, tempat kerja, gaji, pernikahan, semuanya mendapat nilai 100. Namun, menjadi orang tua dan kewirausahaan tetap memprihatinkan.

- Menjadi orang tua, karena kurang atau tidak memadainya tunjangan berbayar untuk cuti orang tua atau tunjangan kehamilan. Laki-laki tidak mendapatkan cuti orang tua; dan
- Kewirausahaan, di mana perempuan menghadapi diskriminasi dalam mengajukan pinjaman dan mereka tidak dapat mendaftarkan usaha mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan laki-laki.

2.2.4 INDIA

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- India – seperti kebanyakan negara Asia Selatan – masih menghadapi tingginya diskriminasi gender di keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Meski India dilaporkan telah mengalami sedikit penurunan dalam pernikahan dini karena Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak tahun 2006, India masih dilaporkan memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi di seluruh dunia (OECD 2014).
- Kementerian Pengembangan Perempuan dan Anak di India adalah lembaga utama pemerintah yang ditugaskan untuk memajukan kebijakan yang menangani masalah gender di negara tersebut. Misinya adalah menciptakan kerangka kerja yang efektif untuk memungkinkan proses pengembangan kebijakan, program, dan praktik yang memastikan hak dan peluang yang sama bagi perempuan di semua ruang.
- Konstitusi India menjamin kesetaraan bagi semua orang di India; Konstitusi India juga melarang diskriminasi oleh Negara atas dasar jenis kelamin. Pada tahun 2001, Kebijakan Nasional untuk Pemberdayaan Perempuan (NPEW) dirumuskan dan meletakkan kebijakan progresif yang komprehensif untuk kemajuan, pengembangan dan pemberdayaan perempuan dengan rumusan kebijakan dan strategi yang tepat.
- Meskipun Konstitusi menjamin non-diskriminasi, dalam kebanyakan kasus hal ini berlaku dalam kasus penyalahgunaan oleh Negara. Perundang-undangan tidak cukup untuk melindungi individu dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin dari aktor non-negara. Selain itu, sebagian besar institusi di India (swasta atau publik) bersandar pada norma-norma diskriminatif budaya dan tradisional. Beberapa institusi telah dimodernisasi untuk memasukkan perubahan positif yang tidak dapat diubah berkaitan dengan hubungan gender.
- Akibatnya, pencapaian India terhadap tujuan gender seperti SDG5 berada di bawah standar. Sebagai contoh, Tinjauan Sukarela 2019 tidak menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender. India masih menghadapi tantangan dalam hal rasio laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja. Tidak ada peningkatan dalam hal rata-rata tahun pendidikan yang diterima perempuan dan laki-laki serta jumlah kursi yang dikuasai di parlemen nasional. Secara keseluruhan, kemajuan India dalam mencapai target SDG 5 mengalami stagnasi.
- Beberapa laporan menunjukkan bahwa India tidak memiliki undang-undang yang memadai untuk menangani masalah gender dan mempercepat pencapaian kesetaraan gender di negara tersebut (UNICEF, WB dan ILO). Padahal negara tersebut telah meratifikasi CEDAW dan Protokol Hak Asasi Manusia Internasional lainnya.

Tinjauan nasional

GGI India untuk tahun 2021 adalah 0,625 (skor terbaik 1 dan terendah 0) peringkat 140 dari 156 negara. Di Asia Selatan, India menempati peringkat ke-6 dari 8 negara. Skor tersebut menunjukkan bahwa perempuan 37,5% lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kesenjangan gender India adalah yang terbesar dalam kategori Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, serta Partisipasi dan Peluang Ekonomi, peringkat 155 dan 151 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021). Dalam hal Pemberdayaan Politik, India memiliki peringkat 57 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021), itu adalah pengukuran terbaik dari keempat kategori.

Indeks Ketimpangan Gender (GII) India adalah 0,488 pada 2019, peringkat 123 dari 162 negara (UNDP 2020). Statistik utama yang menginformasikan hasil ini meliputi (UNDP 2020):

- 13,5% kursi parlemen dikuasai oleh perempuan;
- 27,7,0% perempuan dewasa telah mencapai setidaknya tingkat pendidikan menengah dibandingkan dengan 47,0 persen rekan laki-laki mereka;
- Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, 133 perempuan meninggal karena kasus terkait kehamilan;
- Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja adalah 20,5 persen dibandingkan dengan 76,1 untuk laki-laki.

Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum (WBL) 2022 Bank Dunia memberi India peringkat 74,4 (dari kemungkinan 100). India berkinerja baik dalam hal mobilitas, tempat kerja, dan pernikahan. Area yang menjadi perhatian termasuk gaji, dan menjadi orang tua:

- Gaji, di mana industri tertentu seperti pertambangan dan pabrik manufaktur memiliki peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan (misalnya Undang-Undang Pertambangan 1952). Selain itu, undang-undang tidak mengamanatkan pengusaha untuk memberikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- Menjadi orang tua, di mana tidak ada cuti berbayar untuk ayah dan juga tidak ada cuti orang tua yang berbayar. Sayangnya, undang-undang tersebut juga tidak melarang pemecatan terhadap ibu hamil.

Secara lebih luas, India menghadapi insiden tinggi kasus pemerkosaan yang terkenal dan yang terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender. India memiliki mekanisme yang buruk untuk mendukung akses korban terhadap keadilan, dan negara ini membutuhkan dukungan yang cukup besar untuk memperkuat kerangka legislatif yang responsif gender dan untuk membiasakan kesetaraan gender di lembaga-lembaga sosial.

2.2.5 MAROKO

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement Social (MFSEDS) bertanggung jawab atas persiapan, promosi, koordinasi, dan implementasi kebijakan pemerintah terkait keluarga, hak-hak perempuan, kesetaraan, dan inklusi gender. Di bawah sayapnya, L'Agence du Développement Social (ADS) dan Entraide Nationale mempromosikan status perempuan melalui proyek-proyek pembangunan seperti pengentasan kemiskinan.
- Pemerintah Maroko meratifikasi CEDAW pada tahun 1993, dan pada tahun 1995 berkomitmen untuk mengembangkan sebuah Strategi Gender Nasional. Anggaran responsif gender diadopsi pada tahun 2002 dan diujicobakan di Kementerian Keuangan, Pendidikan dan Pertanian.
- Reformasi hukum yang dilakukan oleh Maroko mencakup Konstitusi 2011 dan undang-undang organik selanjutnya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan konstitusional; dua Rencana Pemerintah untuk Kesetaraan (Ikram 1 dan 2) dikoordinasikan oleh Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement Social (Kementerian Solidaritas, Kesetaraan, dan Pembangunan Sosial) (MFSEDS); dan proses penganggaran sensitif gender (GSB) yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan.
- Pada tahun 2014, Komisi Kesetaraan Antar Kementerian dibentuk untuk memantau pelaksanaan PGE 1 (Rencana Kesetaraan Pemerintah). Untuk itu, komisi tersebut membentuk dua Observatorium Nasional

untuk Kekerasan Terhadap Perempuan (VAW), dan mengembangkan undang-undang untuk mengimplementasikan ketentuan konstitusional, serta RUU untuk melawan VAW.

- Namun, upaya di atas dilaporkan hanya berdampak kecil pada keluarga serta hukum pidana dan norma-norma sosial yang terus melanggengkan diskriminasi gender serta tanggung jawab dan peran gender yang stereotipe. Maroko terus mengalami prevalensi tinggi kekerasan berbasis gender di negara tersebut (USAID 2018).
- Kode Keluarga “Le code de la Famille” yang mengatur perkawinan, perceraian, hak asuh dan perwalian anak, warisan dan harta perkawinan didasarkan pada ajaran agama. Oleh karena itu, hakim pengadilan memiliki kekuasaan dan diskresi yang signifikan berdasarkan interpretasi mereka sendiri terhadap teks-teks agama. “Le code de le Penal” mencakup isu-isu yang berkaitan dengan GBV termasuk dalam hal pemerkosaan, prostitusi, hubungan seksual terlarang dan aborsi. Bagaimanapun, agama dan masyarakat memberlakukan pembatasan pada kebebasan perempuan. Hal ini mencakup hubungan seksual antara orang yang belum menikah yang dianggap ilegal. Aborsi adalah kejahatan (kecuali dianggap perlu untuk melindungi kehidupan ibu) dan pemerkosaan dalam pernikahan tidak dianggap sebagai kejahatan (USAID 2018).
- Kerangka hukum mereka, kontradiksinya terhadap norma-norma agama dan budaya, serta kurangnya koordinasi antara titik fokus gender dan departemen kementerian yang berbeda terus menantang upaya untuk mencapai kesetaraan gender di Maroko.

Tinjauan nasional

Pada tahun 2021 GGI Maroko adalah 0,612 (skor terbaik 1 dan terendah 0) menempatkannya di peringkat ke-144 dari 156 negara secara global. Di antara negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, Maroko menempati peringkat 12 dari 19 negara. Skor tersebut menunjukkan bahwa perempuan 38,8% lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kesenjangan gender Maroko terbesar dalam kategori Peluang dan Partisipasi Ekonomi serta Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, peringkat 148 dan 139 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021). Dalam Pemberdayaan Politik, Maroko menempati peringkat 113 dari 156 negara, hasil terbaik dari semua kategori lainnya.

Selanjutnya, Indeks Ketimpangan Gender (GII) Maroko adalah 0,454 pada 2019, peringkat 111 dari 162 negara (UNDP 2020). GII mengacu pada ketidaksetaraan berbasis gender yang dihitung dari statistik kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi. Tiga dimensi yang terpisah itu dipecah sebagai berikut:

- 18,4% kursi parlemen dikuasai oleh perempuan;
- 29,1% perempuan dewasa telah mencapai setidaknya tingkat pendidikan menengah dibandingkan dengan 36,0 persen rekan laki-laki mereka;
- Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, 70 perempuan meninggal karena kasus terkait kehamilan; dan
- Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja adalah 21,5 persen dibandingkan dengan 70,1 untuk laki-laki.

Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum (WBL) 2022 Bank Dunia memberikan peringkat 75,6 (dari kemungkinan 100). Sebagian besar indikator WBL Maroko, yaitu mobilitas, tempat kerja dan kewirausahaan dianggap baik dalam hal kesetaraan gender. Namun, indikator pengupahan dan aset mengkhawatirkan:

- Upah, di mana ada sektor-sektor tertentu yang telah diklasifikasikan negara sebagai berbahaya bagi perempuan untuk bekerja, dan ini termasuk sektor pertambangan sebagai contohnya dan berdasarkan Code Du Travail, Pasal 179 dan Pasal 178.
- Aset, di mana janda yang masih hidup tidak memiliki hak yang sama untuk mewarisi aset sebagaimana halnya duda, dan anak laki-laki dan perempuan juga tidak memiliki hak yang sama untuk menerima warisan dari orang tuanya. Undang-undang tidak memberikan penilaian untuk aset non-moneter sehingga merugikan perempuan.

2.2.6 PAKISTAN

Komitmen, institusi, dan kebijakan gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan pendukung proyek.

- Status perempuan di Pakistan sangat bervariasi di seluruh kelas sosial dan ekonomi, wilayah geografis, serta di antara lingkungan perkotaan dan pedesaan. Variabilitas lebih lanjut muncul dari pembangunan yang tidak merata dan formasi sosial. Di tingkat pemerintah Federal, isu-isu pembangunan gender berada di bawah Kementerian Hak Asasi Manusia dan di bawah lingkup Komisi Nasional Status Perempuan (NCSW). Yang terakhir disebutkan itu adalah badan hukum yang didirikan pada tahun 2000 sebagai komitmen terhadap Deklarasi Beijing dan Platform untuk Aksi 1995 dan Aksi Nasional (NPA) untuk Perempuan tahun 1998. Tanggung jawab utama NCSW adalah untuk mempromosikan kebijakan dan program untuk pembangunan perempuan dan kesetaraan gender.
- Pakistan adalah penandatanganan CEDAW dan, pada 2016, mengadopsi SDG sebagai agenda pembangunan nasionalnya sendiri melalui Resolusi Majelis Nasional dengan suara bulat. Namun, terlepas dari komitmen ini, peringkat Pakistan dalam kesetaraan gender tetap menjadi salah satu yang terendah di dunia. Pakistan tidak memiliki kebijakan nasional tentang hak-hak perempuan yang akan memberikan kerangka kerja sentral untuk implementasi strategi kesetaraan gender. Tanggung jawab dalam pelaksanaan komitmen CEDAW tersebar di struktur pemerintahan, dan ini sayangnya menyebabkan penerapan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender tidak merata dan tidak terkoordinasi (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020). Kelima provinsinya masing-masing memiliki inisiatif, undang-undang dan program untuk mencapai kesetaraan gender yang belum tentu sinkron dengan provinsi lain. Misalnya, dalam pelaporan nasionalnya tentang pencapaian gender kepada CEDAW dan untuk Tinjauan SDG Sukarela 2019, sorotan terpisah berikut muncul:-
 - UU Komisi Nasional Hak Anak tahun 2017 dimaklumkan di tingkat Nasional;
 - Provinsi Punjab telah meloloskan Undang-Undang Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan pada tahun 2016;
 - Di provinsi Sindh, Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pelecehan Perempuan di Tempat Kerja tahun 2018 disahkan; dan
 - Undang-Undang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 9 disahkan di Provinsi AJ&K.

- Salah satu tantangan yang menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender di Pakistan adalah kurangnya kontinuitas dan tindak lanjut dalam struktur pemerintahan, dikarenakan pemerintah berganti, lembaga dan struktur yang menangani pembangunan gender juga berganti. Beberapa komisi tentang status perempuan telah datang dan pergi dan dalam kebanyakan kasus rekomendasi mereka tidak pernah diterapkan. Lembaga-lembaga baru telah merumuskan prioritas dan program mereka sendiri. Dengan banyak tantangan lain yang dihadapi oleh negara, sering kali terlalu mudah untuk menarik kembali komitmen untuk mengatasi masalah gender.

Tinjauan nasional

GGI 2021 untuk Pakistan adalah 0,556 (skor terbaik 1 dan terendah 0), yang mencerminkan kesenjangan gender yang besar antara laki-laki dan perempuan (Forum Ekonomi Dunia 2021). Skor tersebut menunjukkan bahwa perempuan 44,4% lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Indeks ini menempatkan Pakistan di urutan 153 dari 156 negara di dunia. Indeks kesenjangan gender global Pakistan adalah yang terbesar dalam kategori Peluang dan Partisipasi Ekonomi serta Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, di mana peringkatnya masing-masing 152 dan 153 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021).. Peringkat terbaik negara tersebut adalah dalam hal Pemberdayaan Politik di mana peringkatnya adalah 98 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021). Di Wilayah Asia Selatan, Pakistan menempati peringkat 7 dari total 8 negara. Secara regional dan global, kesenjangan gender Pakistan sangat besar dan membutuhkan upaya bersama dari semua sektor untuk menjembatani kesenjangan ini.

Indeks Ketimpangan Gender (GII) Pakistan adalah 0,538 pada 2019, peringkat 135 dari 162 negara (UNDP 2020). GII mengacu pada ketidaksetaraan berbasis gender yang dihitung dari statistik kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi. Tiga dimensi yang terpisah itu dipecah sebagai berikut (UNDP 2020):

- 20,0% kursi parlemen telah dikuasai oleh perempuan;
- 27,6% perempuan dewasa telah mencapai setidaknya tingkat pendidikan menengah dibandingkan dengan 45,7 persen rekan laki-laki mereka;
- Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, 140,0 perempuan meninggal karena kasus terkait kehamilan; dan
- Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja adalah 21,9 persen dibandingkan dengan 81,7 untuk laki-laki.

Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum (WBL) 2022 Bank Dunia memberi Pakistan peringkat 55,6 (dari kemungkinan 100). Indikator kesetaraan untuk Pakistan itu sangatlah tidak layak, hanya tempat kerja yang mendapatkan nilai 100. Beberapa bidang yang menjadi perhatian termasuk upah, menjadi orang tua, kewirausahaan, aset dan pensiun nilainya 50 atau kurang.

- Peringkat yang rendah pada "Menjadi orang tua" karena kurangnya, tidak memadai atau tidak adanya sama sekali cuti orang tua yang berbayar, dan cuti hamil untuk ibu. Jika cuti hamil diberikan, manfaat yang terkait dengan cuti ini juga sangat terbatas.
- Aset, di mana tunjangan yang tidak memadai untuk iuran pensiun disediakan selama periode cuti karena merawat anak.

Selain hal di atas, laporan tahun 2018 oleh Human Rights Watch berjudul "*Shall I feed My Daughter or Educate Her*" (Haruskah Saya Memberi Makan Putri Saya atau Mendidiknya) menggambarkan situasi sulit yang

dihadapi negara tersebut. Pakistan memiliki lebih dari 22,5 juta anak putus sekolah dengan mayoritas anak perempuan. Sayangnya, kesenjangan gender dalam pendidikan tetap stagnan, tidak membaik selama bertahun-tahun. Upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan belum mendapatkan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan sesuai tugas tersebut. Kerusakan politik yang berkepanjangan dalam waktu yang lama juga telah mengalihkan sumber daya dan fokus dari persoalan gender.

Bidang lain yang menjadi perhatian adalah diskriminasi gender di tempat kerja. Norma sosial Pakistan mengharapkan perempuan untuk tinggal di rumah dan menjaga anak-anak, sementara laki-laki pergi bekerja. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa beberapa perempuan yang memilih untuk bekerja, menghadapi segudang hambatan yang meliputi kurangnya transportasi yang aman, kurangnya fasilitas perempuan di tempat kerja, upah yang tidak setara dan bentuk-bentuk diskriminasi tenaga kerja lainnya.

Demikian pula, isu-isu gender yang menonjol termasuk tingginya insiden kekerasan berbasis gender, pernikahan paksa dan pembunuhan “kehormatan”. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah pembentukan lembaga negara sementara, menteri federal dan provinsi, komite dan komisi untuk merumuskan peta jalan untuk mengurangi hambatan kesetaraan gender di negara ini.

2.2.7 VIETNAM

Komitmen, institusi, dan kebijakan gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan pendukung proyek.

- Vietnam telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender yang disebutkan dalam:
 - Konstitusi
 - Hukum Kesetaraan Gender
 - Undang-Undang tentang Pemilihan Deputi untuk Majelis Nasional dan Dewan Rakyat,
 - Undang-Undang tentang Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah
 - Undang-Undang tentang Pemakluman Dokumen Hukum
- Vietnam telah dan terus mengimplementasikan serangkaian program dan proyek yang berfokus pada gender:
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender (2016-2020, Visi menuju 2030).
 - NAP tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2014-2020.
 - Proyek Pengurangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Pedesaan Vietnam 2015-2020.
 - Rencana Tahunan untuk Meminimalkan Perkawinan Remaja dan Perkawinan Sedarah pada Etnis Minoritas di Tahun 2018.
 - Program dukungan kesetaraan gender di antara etnis minoritas di tahun 2018-2025.
- Vietnam merupakan salah satu negara Asia-Pasifik pertama yang menerapkan pengarusutamaan gender, khususnya dalam UU tentang APBN (2015). Meskipun prinsip-prinsip telah ditetapkan, pedoman yang mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk kegiatan kesetaraan gender belum ditetapkan, sehingga menghambat implementasi.

- Rasio deputi perempuan di Majelis Nasional adalah 27%, yang mencakup Dewan Rakyat di tingkat provinsi, kabupaten, dan komune. Pemimpin Utama di 12 dari 30 kementerian adalah seorang perempuan. Rasio perempuan dalam posisi manajemen dan kepemimpinan ini rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan (35%) dalam Strategi Nasional Kesetaraan Gender.
- Tindakan kontraseptif di negara ini rendah dan kehamilan remaja meningkat; namun, komitmen yang berkaitan dengan penyediaan akses universal ke layanan kesehatan reproduksi dan seksual berarti bahwa target negara untuk kematian ibu hamil mungkin dapat tercapai (Vietnam 2018).
- Vietnam telah berkomitmen pada beberapa konvensi internasional utama terkait kesetaraan gender termasuk (Linh 2021):
 - CEDAW (menyampaikan laporan berkala ke-7 dan ke-8 kepada Komite CEDAW pada tahun 2015)
 - Deklarasi Beijing tentang Hak-Hak Perempuan
 - Konvensi tentang Hak Anak
 - Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional dengan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak

Tinjauan nasional

Vietnam berada di peringkat 9 di antara 20 negara di kawasan Pasifik dan Asia Timur dalam hal skor Indeks Kesenjangan Gender (GGI) pada tahun 2020, dengan skor 0,7 (dari kemungkinan skor terbaik 1), posisi ke-87 secara global. Nilai sub indeks Pemberdayaan Politik rendah yaitu sebesar 11,3%, menjadikan kesetaraan gender dalam politik sebagai bidang pembangunan bagi Vietnam. Bidang kedua untuk perbaikan adalah Kesehatan dan Kelangsungan Hidup. Kemajuan besar telah dicapai pada sub indeks Pencapaian Pendidikan di mana 98% kesenjangan telah teratasi dan kesetaraan gender telah dicapai di tingkat pendaftaran tersier. Perempuan berpartisipasi secara aktif dalam angkatan kerja dan mewakili sejumlah besar profesional terampil (53%); namun, masih sangat sedikit perempuan yang menduduki peran manajerial senior atau posisi manajemen puncak (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Vietnam memiliki nilai GII sebesar 0,296 pada 2019, peringkat 65 dari 162 negara. Dalam kasus Vietnam, beberapa ukuran utama yang mendeskripsikan peringkat GII nya, antara lain: (UNDP 2020):

- 27% kursi parlemen diisi oleh perempuan;
- 66% perempuan dewasa telah mencapai setidaknya pendidikan sekunder dibandingkan dengan persentase 78% untuk laki-laki;
- Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, 43 perempuan meninggal karena disebabkan terkait kehamilan;
- Angka kelahiran oleh remaja adalah 831 kelahiran per 1000 perempuan berusia 15-19 tahun;
- Peran perempuan dalam pasar tenaga kerja mencapai 72,7% dibandingkan dengan 82,4 untuk tenaga kerja laki-laki.

Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum Bank Dunia tahun 2022 secara khusus memfokuskan pada statistik di pusat bisnis utama Vietnam, yaitu kota Ho Chi Minh Dengan Indeks keseluruhan menempati peringkat 85 (dari skor total 100), dari sudut pandang kesetaraan, performa Vietnam berada di atas rata-rata dan berkinerja baik,

terutama dalam kategori mobilitas, lokasi kerja, gaji, pernikahan, kewirausahaan, dan aset. Sebaliknya, bidang-bidang utama yang perlu diperhatikan, antara lain:

- Menjadi orang tua, jika membahas tentang hukum yang memengaruhi pekerjaan perempuan setelah memiliki anak; dan
- Pensiun, di mana terdapat perbedaan usia pensiun laki-laki dan perempuan yang memperoleh dana pensiun penuh (Bank Dunia 2022).

Di luar indeks-indeks tersebut, literatur terbaru juga menekankan beberapa kerentanan terkait gender yang terjadi di Vietnam. Kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah utama di Vietnam, karena kepercayaan setempat berperan penting dalam pembentukan identitas gender. Masih ada budaya yang cenderung memilih anak laki-laki, dan hal ini terindikasi dalam peningkatan rasio jenis kelamin saat lahir (SRB) dari 106 kelahiran bayi laki-laki untuk setiap 100 kelahiran bayi perempuan pada tahun 1999, menjadi 111 pada tahun 2009. SRB tertinggi ditemukan dalam kelompok berpenghasilan tinggi yang memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan ultrasonik dan aborsi jenis kelamin tertentu (GCF 2013).

Meskipun di Vietnam, integrasi gender dalam dokumen-dokumen legal telah diwajibkan, belum ada peraturan yang mengatur pengarusutamaan kesetaraan gender. Inilah yang menyebabkan strategi-strategi dan rencana kerja gender tidak selalu dilaksanakan (Linh 2021).

Dalam ruang lingkup pedesaan, ada perbedaan kesempatan yang diperoleh petani perempuan dan laki-laki, yang mengakibatkan perempuan lebih rentan terhadap pengaruh iklim dan kemampuannya untuk beradaptasi terancam menurun. Petani lansia dan petani perempuan terabaikan, terutama dalam hal lahan (pertanian di pedesaan), serta dalam hal kesetaraan dan kesejahteraan manusia, yang mengarah pada, atau bahkan memperkuat, feminisasi pertanian. Sementara itu, perempuan kurang memiliki hak dan kendali atas sumber daya yang mereka pertanggung jawabkan. Oleh karena itu, kaum perempuan tidak memiliki akses atau berperan dalam penciptaan pengetahuan yang dapat membantu mereka keluar dari tekanan situasi yang sedang dihadapi. Meskipun strategi-strategi nasional dan rencana implementasi provinsi masa lalu dan masa kini telah menyertakan perubahan iklim, mereka kurang mempertimbangkan dampak yang dihadapi oleh para petani perempuan (Ylipaa, Gabrielsson dan Jerneck 2019).

2.2.8 KAMBOJA

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Pemerintah Kerajaan Kamboja berkomitmen untuk mendukung norma-norma sosial yang positif melalui implementasi hukum, kebijakan, rencana, dan program-program nasional di semua jajaran. Kementerian Perempuan, yang bekerja sama dan didukung oleh kementerian-kementerian, institusi, dan mitra terkait, mendukung kesetaraan gender dalam kebijakan-kebijakan strategis utama dan program-program reformasi, seperti:
 - Rencana Strategis lima-tahunan MOWA untuk kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan 2014-2018.

- Neary Rattanak IV (bersama Neary Rattanak V untuk tahun 2019-2023 sedang dikembangkan) yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan institusi dan mendukung kesetaraan gender melalui pendekatan-pendekatan berbasis-program dan pemerintahan yang baik.
- Perumusan Kebijakan Gender Nasional pertama yang digunakan sebagai kerangka kerja kebijakan jangka panjang untuk kesetaraan gender. Kebijakan tersebut meliputi definisi diskriminasi gender, sesuai dengan CEDAW.
- Rencana Kerja Nasional untuk mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan menetapkan beberapa prioritas utama dan berbagai aksi untuk pencegahan efektif dan sebagai respon terhadap Kekerasan Berbasis Gender di berbagai sektor.
 - Gender diintegrasikan ke dalam strategi dan kebijakan utama lainnya, seperti Kebijakan Populasi, NSDP, dan Kerangka Kerja Nasional tentang Perlindungan Sosial.
- Gender juga disertakan dalam proses-proses reformasi utama, seperti Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Manajemen Keuangan Publik, Reformasi Hukum dan Judisial, Desentralisasi dan Dekonsentrasi, serta dalam Strategi Nasional untuk Mendukung Perempuan dalam Posisi Manajemen di level Sub Nasional (2017-2019).
- Rencana Strategis Gender, Perubahan Iklim, Penghijauan, dan Pengelolaan Risiko Bencana telah diintegrasikan dalam Rencana Strategi Perubahan Iklim Kamboja tahun 2013-2022 beserta anggaran pelaksanaannya.
- Program Nasional untuk Reformasi Administrasi Publik tahun 2015-2018 menyertakan isu pengarusutamaan gender dalam layanan publik.
- Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender untuk Aparatur Negara Fase III tahun 2014-2018 dari Kementerian Aparatur Negara mendukung kesetaraan gender dalam layanan publik. Pada tahun 2018, 30 dari 31 jajaran kementerian dan institusi telah membuat Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender. Pada tahun 2016, 28 kementerian dan institusi pemerintah memperoleh dana dari anggaran belanja negara dan mitra kerjanya untuk melaksanakan Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender, angka ini bertambah dari 16 di tahun 2013.
- Dalam hal Kepemimpinan Perempuan: pada tahun 2018, sekitar 25% anggota Dewan Perwakilan dan 19% anggota Senat adalah perempuan. Di tingkat eksekutif, 3 Menteri, 45 Sekretaris Negara, dan 69 Wakil Sekretaris Negara adalah perempuan, yang mewakili 14,5% dibandingkan dengan 7,4% pada tahun 1998. Jumlah perempuan dalam layanan publik semakin bertambah, melalui insentif dan pengangkatan. Pada tahun 2017, perempuan mengisi 41% dari jabatan aparatur negara, hal ini menunjukkan peningkatan yang stabil sekitar 1 persen per tahun. Di Jajaran Sub-Nasional (SNL) proporsi perempuan jauh lebih tinggi (dari 40% pada tahun 2014 menjadi 43% di tahun 2017) dibandingkan di tingkat nasional (dari 27% pada tahun 2014 menjadi 31% di tahun 2017). Proporsi perempuan di Dewan Komunitas/Sangkat mencapai 16,75%.
- Dalam hal Kekerasan Berbasis Gender, Standar Minimum Layanan Esensial bagi kaum Perempuan dan Remaja Putri Penyintas Kekerasan Berbasis Gender telah disusun pada tahun 2017 dalam Rencana Kerja Nasional kedua untuk mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan 2014 - 2018 (NAPVAW II). Pada tahun 2016 dan 2017, jaringan Mekanisme Respon Multisektoral Terkoordinasi, yang melibatkan departemen-departemen pemerintahan dan pejabat terkait, diciptakan di delapan provinsi, untuk memfasilitasi respon yang efektif, efisien, dan tepat waktu bagi para penyintas Kekerasan Berbasis Gender dan

penyedia layanan telah dilatih sesuai dengan standar pelayanan terkait. Pemerintah Kerajaan Kamboja juga mengembangkan Rencana Kerja lima-tahunan untuk Mencegah dan Menjawab Kekerasan terhadap Anak tahun 2017-2021, yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial Veteran dan Rehabilitasi Pemuda. Pada tahun 2019, Kementerian Sosial Veteran dan Rehabilitasi Pemuda membentuk Komite Kepemimpinan dan Koordinasi Pelaksanaan untuk rencana kerja tersebut. Didukung oleh kerja sama nasional dan organisasi internasional untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, banyak prestasi yang telah didapatkan. _Dalam konteks internasional, Pemerintah Kamboja diangkat menjadi anggota ke-26 dalam Negara Penggagas Kemitraan Global untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak dan bekerja sama dengan komunitas-komunitas internasional untuk menerapkan hukum dan kebijakan perlindungan anak terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi lainnya.

- Terdapat komitmen yang signifikan untuk mengatasi Kekerasan Berbasis Gender/Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan terhadap Anak. Ini merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan kerja sama multisektoral dari semua pemangku kepemimpinan untuk memastikan implementasi kebijakan, panduan, dan prosedur yang efektif (Kerajaan Kamboja 2019).

Tinjauan nasional

Pada tahun 2021, Kamboja menempati peringkat ke-12 dari 20 negara di Asia Timur dan regio Pasifik untuk skor *Gender Gap Index* (GGI) dengan skor 0,684 (dari skor tertinggi 1), menempatkannya di peringkat 103 dari 156 negara. Skor ini menunjukkan bahwa di negara ini, kesempatan yang dimiliki perempuan 32% lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kamboja memiliki skor yang tinggi untuk Pencapaian Pendidikan (0,919) serta Kesehatan dan Keselamatan (0,978). Skor sub index Pemberdayaan Politik negara ini rendah, yaitu 0,111, menjadikan kesetaraan gender dalam politik di Kamboja sebagai salah satu area pengembangan (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Kamboja memiliki nilai GII sebesar 0,474, menempati peringkat 117 dari 162 negara dalam indeks tahun 2019. Indeks ini ditentukan berdasarkan statistik kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan aktivitas ekonomi. Dalam kasus Kamboja, metrik utama yang mendeskripsikan peringkat GII nya, antara lain (UNDP 2020)::

- 19,3% kursi parlemen diisi oleh perempuan;
- 15,1% perempuan dewasa telah memiliki setidaknya pendidikan sekunder, dibandingkan dengan 28,2 persen laki-laki;
- Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, 160,0 perempuan meninggal karena disebabkan terkait kehamilan;
- Angka kelahiran oleh remaja mencapai 50,2 kelahiran per 1000 perempuan berusia 15-19 tahun;
- Peran perempuan dalam pasar tenaga kerja mencapai 76,3% dibandingkan dengan 88,9 untuk laki-laki.

Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum Bank Dunia tahun 2022 memfokuskan pada statistik-statistik yang berhubungan dengan kota bisnis utama Kamboja, yaitu Phnom Penh, dengan peringkat Indeks keseluruhan 81,3 (dari nilai 100). Dari segi kesetaraan, performa Kamboja lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional yang diamati di seluruh wilayah, terutama dalam kategori mobilitas, lokasi kerja, kewirausahaan, dan aset. Namun, jika menyangkut:

- Hukum yang mengatur gaji, pembatasan perkawinan, hukum-hukum yang mengatur pekerjaan perempuan setelah memiliki anak; dan
- Hukum yang mengatur besaran pensiun perempuan, Kamboja perlu melakukan reformasi untuk meningkatkan kesetaraan hukum bagi perempuan. (Bank Dunia 2022).

Di luar indeks-indeks tersebut, literatur terbaru juga menekankan beberapa kerentanan terkait gender yang terjadi di Kamboja. Satu-satunya peluang kerja utama bagi kaum perempuan marginal yang meninggalkan daerah pedesaan di Kamboja adalah bekerja di industri garmen, di mana mereka sering mengalami pelecehan yang sama dengan pekerja seksual, seperti pelecehan seksual, fisik, dan verbal (Orleck-Jetter 2018).

Meskipun kebudayaan setempat menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang melanggar norma, kekerasan dalam rumah tangga masih mendapatkan pembenaran (UNFPA 2022). Bagi perempuan Kamboja, kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang dapat diterima, di mana hampir separuhnya (46%) meyakini bahwa itu adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Hal ini menunjukkan ketidaksihinggaan antara implementasi legislasi kesetaraan gender progresif dengan sikap dan anggapan populasinya tentang peran perempuan di masyarakat, terutama di area-area utama, seperti kekerasan terhadap perempuan (UNESCO 2022).

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, keterlibatan perempuan dalam pendidikan di Kamboja masih jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, termasuk kemampuan pelajarnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Untuk meningkatkan integrasi regional di masa mendatang, tenaga kerja Kamboja harus bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya yang jauh lebih terampil - tantangan ini lebih mempengaruhi kaum perempuan dibanding laki-laki, karena perempuan cenderung memiliki ketrampilan kerja yang rendah dan tingkat pencapaian pendidikannya jauh lebih rendah (Sothorn, dkk 2019).

Norma-norma sosial terkait relasi gender masih membatasi pengembangan potensi kaum wanita dan menghalangi pemberdayaan mereka dalam kehidupan ekonomi, sosial, masyarakat, dan politik. Sikap para orang tua di daerah pedesaan terhadap pendidikan putrinya mempengaruhi rendahnya partisipasi anak perempuan dalam bidang STEM. Selain itu, perilaku pengasuhan yang positif masih belum dipahami dan dipromosikan secara luas.

2.2.9 FILIPINA

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Filipina memiliki agenda legislatif yang aktif dan agresif untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan menjamin kesetaraan gender. Beberapa hukum yang paling signifikan selama dekade terakhir ini, antara lain (David, Albert and Vizmanos 2018):
 - *Magna Carta of Women* (MCW) yang dikenal juga sebagai *Republic Act* (RA) 9710 - merupakan tindakan menyeluruh yang mengoperasikan komitmen negara ini terhadap CEDAW.
 - *Responsible Parenthood* dan *RH Act* (RA 10354)
 - Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RA 10361)

- Undang-undang Anti Pornografi Anak (RA 9775)
- Undang-undang Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2004)
- Undang-undang Anti Perdagangan Manusia (2003)
- Undang-undang Kesejahteraan Orang tua Tunggal (2000)
- Pemberdayaan perempuan untuk terlibat dalam peluang ekonomi dan memanfaatkan sepenuhnya kebebasan publik merupakan salah satu kekuatan Filipina. Terjadi peningkatan perwakilan perempuan dalam pemerintahan di parlemen nasional (12,44% pada tahun 2000 menjadi 29,45% pada tahun 2018) serta pemerintahan daerah (17,16% di tahun 2000 menjadi 21,3% pada tahun 2018), meskipun angka tersebut masih kurang seimbang.
- Hampir separuh (48,9%) posisi manajerial di negara tersebut diisi oleh perempuan, hal ini menunjukkan lapangan kerja dalam mobilitas karir relatif seimbang untuk kedua jenis gender.
- Terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan yang signifikan, yang meliputi kekerasan fisik (dari 7,5% pada tahun 2008 menjadi 4,3% di tahun 2017) dan kekerasan psikologis (4,9% di tahun 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2017).
- Isu gender tetap ada mengingat indikator pernikahan dini yang menjadi pendorong terjadinya kehamilan pada remaja dan merupakan bentuk kekerasan terhadap remaja putri, dengan masing-masing angka 16,5% dan 2,2% untuk perempuan menikah sebelum usia 18 dan 15 tahun (Reyes, dkk. 2019)..

Tinjauan nasional

Dari segi skor *Gender Gap Index* (GGI) tahun 2021, Filipina adalah negara kedua terbaik di Asia Timur dan wilayah Pasifik (setelah Selandia Baru), dengan skor 0,784 (dari skor terbaik 1), yang menempatkannya di urutan ke-17 dari 156 negara. Filipina tidak hanya berhasil mengatasi kesenjangan Pencapaian Pendidikan dan Kesehatan dan Kelangsungan Hidupnya, negara ini juga masuk dalam 18 negara di dunia yang berhasil mengatasi kesenjangan Partisipasi dan Peluang Ekonominya setidaknya sebesar 79,5%. Hasil tersebut dikarenakan Filipina merupakan salah satu dari beberapa negara yang telah mengatasi kesenjangan gender dalam peran lansia, serta peran profesional dan teknis secara bersamaan. Namun, kaum perempuan perlu diberi insentif agar lebih berperan dalam lapangan kerja yang lebih luas. Hanya 49,1% perempuan yang berada di pasar tenaga kerja, sesuai dengan penutupan kesenjangan untuk indikator ini yang hanya 65,3%. Demikian pula, perbedaan pendapatan dan gaji tetap ada. Rata-rata, 22% perbedaan gaji dan 31% perbedaan pendapatan belum berhasil diatasi. Dalam hal Pemberdayaan Politik, sejauh ini, hanya 36,2% dari kesenjangan itu yang berhasil diatasi. Meskipun negara ini memiliki kepala negara perempuan selama lebih dari 15 tahun dalam 50 tahun terakhir, kursi parlemen yang diisi oleh perempuan masih terlalu kecil (28%) dan bahkan, lebih sedikit di kementerian (13%) (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Filipina memiliki nilai GII sebesar 0,430, yang menempatkannya di urutan ke 104 dari 162 negara dalam indeks 2019. Di Filipina, metrik utama yang mendeskripsikan peringkat GII nya, antara lain (UNDP 2020):

- 28% kursi parlemen diisi oleh perempuan
- 75,6% perempuan dewasa telah menyelesaikan pendidikan sekunder, dibandingkan dengan 72,4% laki-laki.
- Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, 121 perempuan meninggal karena disebabkan terkait kehamilan
- Angka kelahiran oleh remaja mencapai 54,2 kelahiran per 1000 perempuan yang berusia 15-19 tahun.

- Peran perempuan dalam pasar tenaga kerja adalah 46,1% dibandingkan dengan 73,3 tenaga kerja laki-laki.

Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum Bank Dunia tahun 2022 memfokuskan pada statistik yang berkaitan dengan kota bisnis utama Filipina, yaitu Kota Quezon. Dengan peringkat Indeks keseluruhan 78,8 (dari 100).

Dari sudut pandang kesetaraan, performa Filipina lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata regional yang diamati di seluruh wilayah, terutama dalam kategori lokasi kerja, gaji, dan kewirausahaan. Namun, dalam hal pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan terkait perkawinan, hukum yang memengaruhi pekerjaan perempuan setelah memiliki anak, perbedaan gender dalam hal kepemilikan lahan dan warisan, serta hukum yang memengaruhi besaran pensiun perempuan, Filipina perlu melakukan reformasi untuk meningkatkan kesetaraan hukum bagi perempuan. Sebagai contoh, salah satu skor terendah yang diperoleh Filipina adalah pada indikator yang mengukur pembatasan perkawinan (Indikator pernikahan WBL2022). Untuk memperbaiki indikator perkawinannya, Filipina perlu mempertimbangkan dan mengizinkan perempuan untuk menuntut perceraian sama seperti laki-laki, dan memberikan hak yang sama pada perempuan untuk menikah-kembali sama seperti laki-laki (Bank Dunia 2022).

Di luar indeks-indeks tersebut, literatur terbaru juga menegaskan beberapa kerentanan terkait gender yang terjadi di Filipina. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di Filipina untuk mencapai kesetaraan gender. 66,7% kerangka kerja legal yang mendukung, memberdayakan, dan mengawasi kesetaraan gender sesuai dengan indikator SDG, yang difokuskan pada kekerasan terhadap perempuan, telah sesuai pada tempatnya. Pada tahun 2018, dalam 12 bulan terakhir, 5,9% perempuan berusia 15-19 tahun melaporkan bahwa mereka pernah menjadi korban kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya saat ini atau mantannya. Selain itu, perempuan dalam usia reproduksi (15-49 tahun) cenderung menghadapi beberapa pembatasan terkait kesehatan dan hak reproduksinya. Pada tahun 2017, 56% perempuan telah memperoleh layanan keluarga berencana dengan metode modern. Pada Desember 2020, hanya terdapat 48,3% indikator yang dibutuhkan untuk mengawasi SDG dari perspektif gender yang tersedia, dengan kesenjangan di bidang-bidang utama, seperti: pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan yang tidak dibayar, serta indikator pasar tenaga kerja utama, seperti perbedaan gaji antar gender (UN Women 2022).

Kaum perempuan dan remaja putri menghadapi kekerasan gender yang lebih tinggi di daerah-daerah yang paling terkena dampak Topan Super Haiyan pada tahun 2013. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh bencana alam itu sendiri, tapi cenderung berakar dari warisan ketidaksetaraan dalam struktur sosialnya sebelum bencana alam itu terjadi, yang kemudian menjadi lebih tajam karena mereka harus berusaha untuk bertahan hidup (Nguyen 2019).

Hasil Penilaian Gender dan Inklusi tentang dampak Pandemi Covid-19 mengindikasikan bahwa pandemi memperparah situasi kaum perempuan dan remaja putri di berbagai sub-grup yang rentan. Bahkan, sebelum pandemi melanda, peningkatan ketidaksetaraan gender di Filipina telah terdokumentasikan, karena Indeks Kesetaraan Gender negara ini turun dari peringkat 8 menjadi 18 dalam rentang waktu 3 tahun. Kaum perempuan Filipina cenderung mengalami marginalisasi ekonomi, subordinasi politik, dan pembatasan keputusan reproduksi. Kaum perempuan dan remaja putri memiliki beban pengasuhan yang berlipat ganda dan tidak proporsional, serta memperoleh *gender stereotyping*, stigma, dan *sexual shaming*. Satu dari empat

perempuan Filipina yang pernah menikah melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional (UNFPA 2021).

Meskipun Filipina telah mencapai beberapa tonggak pencapaian yang mendukung kesetaraan gender di negara tersebut, ada beberapa wilayah yang membutuhkan intervensi. Salah satu wilayah tersebut adalah keterlibatan kaum perempuan dalam pasar tenaga kerja yang masih moderat/sedang, yang tidak meningkat selama 26 tahun terakhir (Bayudan-Dacuycuy 2019).

2.2.10 LAOS

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Jumlah perempuan yang mengisi Kursi Dewan Nasional Laos relatif tinggi, namun untuk posisi pengambil-keputusan lainnya masih sangat kurang.
 - Jumlah perempuan yang menduduki kursi Parlemen/Dewan Nasional mencapai 27,5%;
 - Presiden dan Wakil Presiden Dewan Nasional juga perempuan;
 - Di dewan provinsi, jumlah perempuan yang mengisi kursinya mencapai 31,5%;
 - Namun, jumlah perempuan yang mengisi posisi pemimpin dan manajemen hanya 5%;
 - Pada tahun 2017, secara keseluruhan, jumlah perempuan yang bekerja sebagai aparatur negara mencapai 45%, hanya sedikit yang menduduki posisi senior;
 - Dalam tahun 2015, kepala desa dan deputi kepala desa yang berjenis kelamin perempuan, masing-masing, adalah 1,7% dan 7,2%.
- Akses pendidikan dan kesehatan oleh kaum perempuan dan remaja putri masih kurang.
 - Gender Parity Index (GPI) khususnya untuk pendidikan menengah dan literasi menunjukkan bahwa perempuan (79% pada tahun 2015), berada di belakang laki-laki (90% pada periode yang sama).
 - RDR Laos memiliki tingkat pernikahan dini dan kelahiran remaja yang tinggi di wilayah tersebut, 32,7% wanita muda berusia 20-24 menikah sebelum usia 18 tahun, dibandingkan dengan 10,8% pria.
 - Tingkat fertilitas remaja adalah 83 per 1.000.
- Konstitusi RDR Laos menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, dan masyarakat
 - Serikat Perempuan Laos (LWU) didirikan pada tahun 1955 dengan mandat untuk mewakili perempuan dari semua kelompok etnis
 - Komisi Nasional untuk Kemajuan Perempuan, Ibu dan Anak, yang dibentuk sejak tahun 2003, diberi mandat untuk menetapkan kebijakan nasional untuk kemajuan perempuan serta pengarusutamaan gender dalam semua sektor.
 - Kaukus Parlemen Wanita yang dibentuk pada tahun 2002, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan wanita dan lokakarya pelatihan gender bagi anggota parlemen.

- Survei Nasional Laos pada tahun 2014 mengenai Kesehatan dan Pengalaman Hidup Perempuan (LNS-WHLE) menunjukkan bahwa RDR Laos belum memiliki sistem untuk memantau hak milik perempuan atau mengamankan hak perempuan atas tanah pertanian.
- Pemerintah RDRRDR Laos memprioritaskan strategi berikut:
 - Undang-undang, kebijakan dan instrumen kesetaraan gender nasional
 - Menegakkan hukum keluarga yang ada yang tidak mengizinkan pernikahan sebelum usia dewasa
 - Keluaran gender di NSEDP ke-8
 - Rencana Pemberdayaan Perempuan 2016-2020
 - Rencana Pembangunan Kesetaraan Gender Nasional
 - Strategi Kesetaraan Gender Nasional Kedua (2016-2025)
 - Undang-undang Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 - Implementasi CEDAW
- Memperkuat kapasitas nasional
 - Pada tahun 2000, Kantor Perdana Menteri mengeluarkan Arahan mengenai pengikutsertaan statistik jenis kelamin gabungan dalam kebijakan dan perencanaan (Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos 2018).

Tinjauan nasional

RDRRDR Laos menempati peringkat ke-3 di antara 20 negara di kawasan Asia Timur dan wilayah Pasifik dalam hal skor Indeks Kesenjangan Gender (GGI) mereka pada tahun 2021, dengan skor 0,750 (dari kemungkinan skor terbaik 1), menempatkannya di urutan ke-36 dari 156 negara. Skor tersebut menandakan bahwa perempuan 25% lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki peluang yang sama dengan laki-laki di negara tersebut. RDRRDR Laos adalah negara dengan kinerja terbaik di dunia untuk Partisipasi dan Peluang Ekonomi di 91,5% dan mendapat nilai tinggi dalam Pencapaian Pendidikan (0,965) dan Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (0,975). RDR Laos juga merupakan salah satu dari hanya 22 negara yang telah menutup setidaknya 80% dari kesenjangan dalam peran manajerial. RDRRDR Laos juga telah meningkatkan skornya lebih dari 53 poin persentase, mencerminkan hasil yang lebih baik pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2010. Skor sub indeks Pemberdayaan Politik termasuk rendah pada 0,146, menjadikan paritas gender dalam politik sebagai area perkembangan bagi RDRRDR Laos (Forum Ekonomi Dunia 2021).

RDRRDR Laos memiliki nilai GII 0,459, menempati peringkat ke-113 dari 162 negara dalam indeks 2019. Di RDRRDR Laos, metrik utama yang menginformasikan peringkat GII adalah (UNDP 2020):

- 27,5% kursi parlemen dipegang oleh perempuan
- 35,1% wanita dewasa telah mencapai setidaknya tingkat pendidikan menengah dibandingkan dengan 46,2% rekan pria mereka.
- Untuk setiap 100.000 kelahiran, 185 wanita meninggal karena penyebab yang terkait dengan kehamilan
- Tingkat fertilitas remaja adalah 65,4 kelahiran per 1.000 wanita di antara usia 15-19 tahun.
- Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja sebesar 76,7% dibandingkan dengan 80,2% untuk laki-laki

Indeks Bank Dunia Wanita, Bisnis, dan Hukum (WBL) 2022 berfokus secara khusus pada statistik-statistik yang berkaitan dengan kota bisnis utama RDRRDR Laos yaitu Vientiane, dengan peringkat Indeks keseluruhan sebesar 88,1 (dari kemungkinan 100).

Dari perspektif kesetaraan, RDRRDR Laos memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada rata-rata regional yang diamati di seluruh wilayah, terutama dalam kategori mobilitas, lingkungan kerja, pernikahan, kewirausahaan, dan aset. Namun, ketika menyangkut undang-undang yang mempengaruhi upah perempuan, dan undang-undang yang mempengaruhi besaran pensiun perempuan, RDRRDR Laos dapat mempertimbangkan perombakan untuk meningkatkan kesetaraan hukum bagi perempuan. (Bank Dunia 2022).

Di luar indeks ini, literatur terbaru juga menyoroti beberapa kerentanan terkait gender yang dialami di RDRRDR Laos. Terlepas beberapa pencapaian, ketidaksetaraan gender di Laos masih menjadi sebuah tantangan. Norma-norma budaya yang terkait dengan masyarakat patriarki seperti RDRRDR Laos membuat upaya menuju kesetaraan gender sesuatu yang berat. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang terus berkembang, dengan anak perempuan dan perempuan menjadi korban utama, membuat sulit untuk mengimplementasikan Deklarasi dan Platform untuk Aksi Beijing. Tidak adanya indikator gender yang dipilah berdasarkan jenis kelamin menyebabkan mekanisme pemantauan yang tidak komprehensif sehingga dapat mengakibatkan proses pembuatan kebijakan yang menghiraukan gender (Serikat Wanita Laos 2019).

RDRRDR Laos memiliki tingkat kehamilan remaja tertinggi di Asia Tenggara dan rasio kematian ibu yang tinggi. Sebuah studi di dua distrik pedesaan menunjukkan bahwa penduduk cenderung kurang memiliki otonomi. Meskipun pernikahan digambarkan sebagai keputusan otonom, 40,4% tidak memiliki otonomi mengenai pernikahan. Di antara remaja yang aktif secara seksual, 35,2% menggunakan kontrasepsi. Anak laki-laki dan perempuan dapat dikatakan setara, namun akses pendidikan dan peran gender lebih mengutamakan anak laki-laki. Selain itu, kekerasan lebih dilumrahkan untuk suami terhadap istri mereka (Phongluxa, et al. 2020).

Gaya hidup tradisional petani padi dataran rendah di provinsi selatan RDRRDR Laos berubah dengan cepat karena modernisasi dan komersialisasi dari pertanian dan diversifikasi mata pencaharian. Wanita lebih fokus pada praktik non-pertanian dan dianggap lebih terlibat dalam ekonomi yang modern dan non-tradisional daripada pria. Wanita juga dilaporkan mengalami tantangan yang lebih besar ketika terlibat dan berdagang di pasar pertanian (Moglia, et al. 2020).

2.2.11 UGANDA

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Kementerian Gender, Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial (MGLSD) Uganda, yang didirikan pada tahun 1998, bertanggung jawab atas kemajuan dari kesetaraan dan pengarusutamaan gender di negara tersebut. Kementerian tersebut adalah penerus Kementerian Perempuan dalam Pembangunan, yang didirikan pada tahun 1988 di kantor kepresidenan. MGLSD mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang berpusat pada gender dan mengawasi unit-unit yang berfokus pada gender di kementerian-kementerian nasional. Kementerian tersebut didesentralisasi menjadi Departemen Layanan Berbasis Masyarakat / Gender di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab untuk mendorong

pengarusutamaan gender dalam rencana dan anggaran pembangunan kabupaten (Bank Pembangunan Islam 2019).

- Melalui MGLSD, beberapa struktur yang berfokus pada gender telah dibentuk di tingkat nasional dan kabupaten, seperti Unit Anggaran Responsif Gender dan Panitia Kerja Teknis di Kementerian Keuangan, dan Komite Statistik Gender di Biro Statistik Uganda. Selain itu, MGLSD bekerja erat dengan Kementerian Keuangan, Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi (MoFED) untuk memungkinkan Penganggaran Responsif Gender.
- Kerangka hukum utama untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di negara ini adalah Kebijakan Gender Nasional yang diadopsi pada tahun 1997 dan direvisi pada tahun 2007, berupaya untuk membiasakan isu gender dalam proses pembangunan nasional dengan memandu alokasi sumber daya untuk mengatasi masalah gender di semua sektor. Selain itu, beberapa kebijakan dan undang-undang untuk mencegah Kekerasan Berbasis Gender telah ditetapkan, dengan kebijakan utama berupa Kebijakan dan Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender yang diadopsi pada tahun 2016.
- Secara internasional, Pemerintah Uganda telah meratifikasi CEDAW, Platform untuk Aksi Beijing tahun 1995, dan SDGs.
- Tinjauan Nasional Sukarela negara yang kedua tentang kemajuan dari implementasi SDGs mengungkapkan bahwa sehubungan dengan SDG 5, keberadaan kebijakan dan undang-undang kesetaraan gender telah meningkatkan peluang bagi perempuan dengan perbaikan signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen nasional dan struktur pemerintah lokal, dengan lebih banyak perempuan dan/atau anak perempuan di sekolah, dan lebih banyak perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja. Namun, telah dicatat bahwa beberapa kebijakan utama yang harus peka terhadap gender seperti Undang-Undang Pendidikan sebagian besar tetap netral terhadap gender (Republik Uganda 2020).

Tinjauan nasional

Uganda berada di peringkat ke-66 secara global (dari 156 negara) di GGI, dan ke-10 di Sub-Sahara Afrika pada tahun 2021, dengan skor 0,72. Skor terendah Uganda adalah dalam Pemberdayaan Politik dan skor tertingginya adalah di Kesehatan dan Kelangsungan Hidup pada 0,96 (dari kemungkinan 1), menempatkannya di peringkat 1 di dunia dalam dimensi ini (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Pada tahun 2019, Uganda berada di peringkat 131 dari 162 negara dengan GII sebesar 0,535 (UNDP 2020). Kinerja lintas dimensi adalah sebagai berikut:

- 34,9% kursi parlemen dipegang oleh perempuan
- 27,5% wanita dewasa telah mencapai setidaknya pendidikan menengah dibandingkan dengan 35,1% rekan pria
- Untuk setiap 100.000 kelahiran, 375 wanita meninggal karena penyebab yang terkait dengan kehamilan
- Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah 67% dibandingkan dengan 73,9% untuk laki-laki.

Berfokus di ibu kota, Kampala, Uganda memiliki Indeks WBL sebesar 73.1 (Bank Dunia 2022). Uganda telah memiliki hasil yang baik dalam kategori Tempat Kerja, Gaji dan Pernikahan, sementara bidang-bidang utama yang menjadi perhatian meliputi:

- Menjadi Orang Tua: Rata-rata, perempuan berhak atas cuti hamil berbayar selama kurang dari 14 minggu. Terlebih lagi, tidak semua tunjangan cuti hamil dibayarkan oleh Pemerintah pada saat ini.
- Aset: Anak laki-laki dan anak perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya, selain itu laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan dari pasangannya yang telah meninggal.

Meskipun peran MGLSD sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender, “telah tercatat bahwa baik struktur nasional maupun desentralisasi memiliki staf dan pendanaan yang terbatas. Misalnya, staf teknis dengan keahlian di bidang gender berkurang dari 33 pada tahun 1995 menjadi 10 pada tahun 2014 dikarenakan perombakan dan pergantian pegawai negeri. Selain itu, alokasi MGLSD dari APBN secara konsisten kurang dari 1%.” (Bank Pembangunan Islam 2019). Sumber daya yang terbatas itu kemudian membatasi jangkauan dan dampak dari pekerjaan kementerian.

Laporan Isu Gender dari tahun 2019 mengungkapkan bahwa meskipun jumlah insiden kekerasan seksual dilaporkan menurun dari 2011 hingga 2016, kekerasan seksual tetap tinggi di kalangan perempuan. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa perempuan terus kurang dimanfaatkan dalam angkatan kerja dengan lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang menghabiskan waktu dalam kegiatan pekerjaan perawatan tidak berbayar, dan bahwa “lebih banyak laki-laki dalam pekerjaan yang dibayar dan juga cenderung menjadi majikan dibandingkan dengan perempuan yang sebagian besar bekerja sebagai penyumbang. pekerja keluarga atau wiraswasta.” (UGBS 2019). Meskipun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tidak secara signifikan lebih rendah daripada laki-laki seperti yang ditunjukkan oleh temuan GII, kualitas dan sifat pekerjaan tampaknya berbeda secara signifikan berdasarkan gender yang membuat perempuan lebih rentan terhadap syok daripada laki-laki meskipun memiliki rasio yang hampir sama dari kedua jenis kelamin yang dipekerjakan.

2.2.12 MESIR

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Konstitusi Mesir, yang diamendemen pada tahun 2014, menyerukan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan di bidang sipil, sosial, politik, ekonomi dan budaya (USAID 2020).
- Dewan Nasional Perempuan (NCW) negara itu didirikan pada tahun 2000, tetapi baru dilembagakan pada tahun 2018 sebagai tanggapan atas persyaratan dalam konstitusi untuk mempunyai lembaga independen yang menerapkan dan mengawasi strategi dan program nasional dalam mendukung kesetaraan gender. NCW memiliki cabang implementasi di masing-masing dari 27 kegubernuran negara bagian yang mengelola implementasi lokal dari kebijakan, program, dan kampanye NCW.
- Pada tahun 2017, NCW meluncurkan Strategi Nasional Pemberdayaan Perempuan Mesir, menjadikan Mesir negara pertama yang mengembangkan strategi yang sejalan dengan SDGs, menetapkan target nasional untuk SDG 5.
- Tinjauan nasional sukarela Mesir tentang kemajuan menuju target SDG mengungkapkan bahwa langkah besar telah dibuat, terutama dalam kaitannya dengan keterwakilan perempuan di parlemen nasional dan posisi menteri, serta proporsi perempuan yang memiliki rekening bank. Namun, ketidaksetaraan tetap ada, terutama dalam partisipasi pasar tenaga kerja dan kemajuan karir.

- Di atas pembentukan NCW, konstitusi Mesir juga mengharuskan negara untuk meratifikasi beberapa instrumen dan/atau kerangka kerja internasional dan regional yang berkomitmen untuk kesetaraan gender, seperti SDGs, CEDAW, Deklarasi dan Platform untuk Aksi Beijing 1995, Piagam Arab tentang Hak Kemanusiaan, dan konvensi Kekerasan dan Pelecehan Organisasi Buruh Internasional yang melarang kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.

Tinjauan nasional

Mesir menempati peringkat ke-129 secara global (dari 156 negara) untuk GGI 2021, dan ke-4 di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara pada 2021, dengan skor 0,64. Mesir telah membuat beberapa kemajuan dalam dimensi Pemberdayaan Politik, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup serta Pencapaian Pendidikan (Forum Ekonomi Dunia 2021). Mengenai Pemberdayaan Politik, Mesir sekarang memiliki 27% perempuan di antara anggota parlemen, yang meningkat dari 15% pada 2019. Meski demikian, negara ini mengalami kemunduran dalam hal Partisipasi dan Peluang Ekonomi, dengan hanya 20% perempuan berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Terlebih lagi, kesenjangan gender dalam posisi manajerialnya merupakan salah satu yang terbesar secara global di angka 92%, dengan perempuan hanya mengisi 7,4% dari semua posisi manajerial. Ketidaksetaraan ini tercermin secara lebih lanjut dalam kesenjangan pendapatan atau upah antara perempuan dan laki-laki.

Berfokus di ibu kota, Kairo, Mesir memiliki Indeks WBL 50.6 (Bank Dunia 2022). Mesir memiliki hasil yang baik dalam kategori Kewirausahaan dan Penginapan, sementara bidang-bidang utama yang harus menjadi perhatian meliputi:

- Upah, di mana ada kerangka hukum yang membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja di tingkat yang sama dengan laki-laki, misalnya perempuan dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mengerjakan pekerjaan yang dianggap berbahaya, sulit atau tidak pantas secara moral.
- Menjadi orang tua, di mana rata-rata, wanita berhak atas cuti hamil berbayar selama kurang dari 14 minggu, dan cuti dibayar tidak diberikan kepada ayah. Selain itu, tidak semua tunjangan cuti hamil dibayarkan oleh Pemerintah sementara perempuan sedang cuti hamil.

Meskipun Mesir telah membuat kemajuan legislatif yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, ketidaksetaraan gender tetap ada, sebagian didorong oleh sikap dan persepsi yang sudah mengakar kuat dan memperparahnya. Survei Kesetaraan Pria dan Gender Internasional – Timur Tengah dan Afrika Utara (IMAGES MENA) adalah studi pertama dari jenisnya yang memberikan wawasan mengenai sikap dan tindakan terhadap kesetaraan gender di empat negara, termasuk Mesir. Di Mesir, ditemukan bahwa “laki-laki menolak perempuan yang bekerja di luar rumah, dan terhadap partisipasi mereka dalam aspek kehidupan politik dan publik.” Hal ini juga mengungkapkan bahwa laki-laki sangat mendukung bahwa merekalah yang harus menjadi pencari nafkah utama di rumah dan membuat sebagian besar keputusan rumah tangga. Studi tersebut juga mengungkapkan “dukungan tinggi untuk mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) di Mesir, di mana lebih dari 70% pria, dan lebih dari setengah wanita, menyetujui praktik tersebut.” (Samir 2018). Sikap dan persepsi tersebut dapat mengakibatkan rendahnya nilai GGI untuk Partisipasi dan Pemberdayaan Ekonomi. Selain itu, masalah struktural seperti kesenjangan dalam pekerjaan yang tersedia untuk perempuan

dibanding laki-laki, dan lebih sedikitnya perempuan yang memiliki akses ke pendidikan daripada laki-laki juga merupakan kontributor utama dari ketidaksetaraan (Ghafar 2021).

2.2.13 SENEGAL

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Konstitusi Senegal (2001) menyerukan kesetaraan gender (Isbell, Jacobs and Scheller 2019).
- Pada tahun 2005, Senegal meluncurkan Strategi Nasional untuk Kesetaraan dan Kemerataan Gender (SNEEG), yang diperbarui pada tahun 2016. SNEEG bertujuan untuk menangani isu-isu kesetaraan gender dan untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan. Kebijakan juga diberlakukan untuk memastikan pengembangan anggaran yang sensitif gender di sektor dan wilayah serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sensitif gender.
- Senegal mengadopsi Undang-Undang Paritas pada tahun 2010 yang dimaksudkan untuk mendukung pemberdayaan politik perempuan dengan memastikan bahwa setidaknya setengah dari jabatan politik dipegang oleh perempuan. Pada tahun 2021, ada angka rekor di mana 64 perempuan terpilih ke Parlemen.
- Pengawas Paritas Nasional didirikan pada tahun 2017 dan diberi mandat untuk mengidentifikasi kesenjangan dan diskriminasi gender, menegakkan kebijakan, dan memantau implementasi.
- Senegal telah meratifikasi beberapa instrumen internasional dan regional yang berkomitmen terhadap kesetaraan gender, seperti halnya CEDAW, Protokol Opsional mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat mengenai Hak Perempuan di Afrika, dan SDGs (UN Women n.d.).

Tinjauan nasional

Senegal berada di peringkat 104 secara global (dari 156 negara) di GGI dan ke-19 di Afrika Sub-Sahara pada tahun 2021, dengan skor sebesar 0,68 (Forum Ekonomi Dunia 2021). Senegal memiliki hasil yang baik dalam dimensi Kesehatan dan Kelangsungan Hidup dan pencapaian Pendidikan meskipun masih ada kesenjangan literasi yang relatif besar antara pria dan wanita di negara ini. Tantangan masih ada mengenai keterwakilan perempuan dalam politik; meskipun 40% dari anggota parlemen terdiri atas perempuan, hanya 22% dari menteri perempuan. Terlebih lagi, partisipasi ekonomi juga merupakan sebuah tantangan dengan hanya 36,4% dari perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja, dengan keterwakilan yang bahkan lebih rendah dalam peran manajerial.

Pada tahun 2019, Senegal berada di peringkat 130 dari 162 negara untuk GII, dengan skor 0,533 (UNDP 2020). Kinerja di seluruh dimensi utama adalah sebagai berikut:

- 41,8% dari kursi parlemen dipegang oleh perempuan
- 10,3% wanita dewasa telah mencapai setidaknya pendidikan menengah dibandingkan dengan 26,5% rekan pria
- Untuk setiap 100.000 kelahiran, 315 wanita meninggal diakibatkan penyebab yang terkait dengan kehamilan
- Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah sebesar 35% dibandingkan dengan 57,5% untuk laki-laki.

Berfokus di ibu kotanya, Dakar, Senegal memiliki Indeks WBL sebesar 66,9 (Bank Dunia 2022). Senegal telah memiliki hasil yang baik dalam kategori Tempat Kerja dan Pensiun, sementara bidang utama yang memerlukan perbaikan meliputi:

- Upah, di mana ada kerangka hukum yang membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja di tingkat yang sama dengan laki-laki, misalnya perempuan dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mengerjakan pekerjaan yang dianggap berbahaya, sulit, atau tidak pantas secara moral. Oleh karena itu, perempuan tidak dapat bekerja di pertambangan, konstruksi, dan pabrik seperti halnya laki-laki.
- Harta, di mana anak laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta dari orang tuanya, dan laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta dari pasangannya yang sudah meninggal.

Meskipun ada dukungan kuat di seluruh negeri untuk kesetaraan gender dan kemajuan telah dicapai dalam beberapa aspek (terutama pemberdayaan politik seperti yang disebutkan di atas), perempuan masih cenderung berpeluang lebih kecil untuk dapat mengakses pekerjaan, memiliki ponsel, atau mengakses internet dibandingkan dengan laki-laki yang menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan (Isbell, Jacobs and Scheller 2019).

2.2.14 RWANDA

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diatur dalam Konstitusi Rwanda tahun 2003 (direvisi tahun 2015). Konstitusi mensyaratkan bahwa setidaknya harus ada 30% keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan (Kantor Pengawasan Gender 2019).
- Kebijakan Gender Nasional pada tahun 2010 dikembangkan untuk mengarusutamakan isu tentang gender dan memungkinkan pembangunan inklusif yang setara untuk pria dan wanita. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Kebijakan Gender Nasional, Strategi Pengarusutamaan Sektor Gender dikembangkan dan diadopsi oleh berbagai sektor untuk memandu campur tangan strategis yang dapat mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita.
- Visi Rwanda 2020 (sekarang Visi 2050) adalah agenda pembangunan milik negara yang mempertimbangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita sebagai elemen utama lintas sektor yang dibutuhkan oleh negara untuk mencapai target pembangunannya. Agenda tersebut berkomitmen untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang sensitif gender untuk melindungi dan memberdayakan wanita.
- Agenda pembangunan ini memberikan informasi tentang Strategi Transformasi Nasional (2017-2024) saat ini yang mempunyai 3 pilar: Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial, dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Setiap pilar mempunyai seperangkat Indikator Kinerja Utama (KPI), dan Kantor Pengawasan Gender (GMO), yang didirikan di tahun 2013 oleh Konstitusi untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan negara di seluruh indikator sensitif gender dalam ketiga Strategi Nasional untuk pilar Transformasi (NST).

- Pemerintah Rwanda juga membentuk Dewan Wanita Nasional dengan lebih dari 100.000 anggota komite dari seluruh negara yang menggerakkan dan memberdayakan wanita untuk berpartisipasi di seluruh program pembangunan nasional (PBB 2019).
- Rwanda telah menunjukkan komitmen terhadap paling sedikit 13 instrumen regional dan internasional mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, termasuk: CEDAW, Deklarasi dan Platform untuk Aksi Beijing, Konvensi Hak Politik untuk Wanita, Deklarasi untuk penghapusan kekerasan terhadap wanita, dan SDGs (UNDP 2018).
- Laporan dari Tinjauan Sukarela Nasional Rwanda tahun 2019 mengungkapkan bahwa Rwanda terkenal secara global atas kemajuan yang signifikan menuju target dikarenakan kemauan politik dan kerangka kerja kelembagaan serta kebijakan yang kuat. Meskipun demikian, terdapat beberapa peluang untuk peningkatan dan percepatan kemajuan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja dan meningkatkan keterlibatan pria dalam perencanaan keluarga serta aktivitas tradisional lainnya yang terlihat sebagai isu khusus hanya untuk wanita (PBB 2019).

Tinjauan nasional

Rwanda berada di peringkat ke 7 secara global (dari 156 negara) dan ke-2 di negara Sub-Sahara Afrika di tahun 2021, dengan nilai GGI sebesar 0,81 (Forum Ekonomi Dunia 2021). Rwanda adalah salah satu dari sembilan negara teratas yang telah menutup setidaknya 80% dari kesenjangan gender mereka. Dalam bidang Partisipasi dan Peluang Ekonomi, Rwanda menggandakan porsi wanita dalam peran senior dan manajerial dari tahun 2014 sampai 2019 (dari 14,1% menjadi 28,6%). Lebih dari 80% wanita di Rwanda berpartisipasi pada pasar tenaga kerja, yang serupa dengan porsi dari pria yang juga berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Rwanda juga memiliki hasil yang baik dalam Pemberdayaan Politik dengan dicapainya kesamaan gender secara utuh dalam representasi wanita di posisi kementerian dan parlemen.

Pada tahun 2019, Rwanda memiliki peringkat GII 92 dari 162 negara dengan nilai sebesar 0,402 (UNDP 2020). Kinerja dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut:

- 55,7% dari kursi parlemen diduduki oleh wanita
- 10,9% dari wanita dewasa setidaknya telah menempuh pendidikan sampai tingkat menengah dibandingkan 15,8% rekan pria mereka
- Untuk setiap 100.000 kelahiran yang hidup, 248 wanita meninggal akibat kasus yang terkait dengan kehamilan
- Partisipasi perempuan pada pasar tenaga kerja adalah sebesar 83,9% dibandingkan 83,4% untuk para pria.

Berfokus di Ibukota, Kigali, Rwanda memiliki Indeks WBL sebesar 83,8 (Bank Dunia 2022). Rwanda memiliki hasil yang baik pada Mobilitas, Tempat kerja, Upah, Kategori Pernikahan dan Aset, sementara bidang utama yang harus menjadi perhatian adalah menjadi orang tua. Secara rata-rata, wanita berhak atas cuti hamil berbayar selama kurang dari 14 minggu dan tidak semua tunjangan cuti hamil dibayarkan oleh Pemerintah dalam waktu tersebut. Selain itu, tidak ada undang-undang yang secara jelas melarang pemecatan pekerja yang hamil.

Seperti yang terlihat dari GGI dan GII, Partisipasi Ekonomi wanita serupa dengan pria, tetapi, kesenjangan gender yang substansial masih tetap terjadi pada pendapatan dikarenakan 83,4% wanita bekerja pada sektor informal dan/atau dalam pekerjaan yang berupah rendah, mengarahkan rata-rata pendapatan wanita menjadi sekitar 60% daripada rata-rata pendapatan pria (Forum Ekonomi Dunia 2021). Dalam hal pencapaian pendidikan, meskipun 95,7% dari kesenjangan gender telah tertutup, persentase anak perempuan dan laki-laki yang terdaftar di sekolah-sekolah relatif rendah dan kesempatan pendidikan harus ditingkatkan untuk semuanya. Hanya 10,9% dari perempuan di Rwanda mencapai tingkat pendidikan menengah, hal ini kurang dari setengah dari rata-rata negara Sub-Sahara Afrika yang sebesar 28,8%, dengan statistik serupa yang terlihat untuk pria.

Selain itu, terlepas dari langkah-langkah signifikan dalam pemberdayaan politik, beberapa jurnalis telah melaporkan bahwa “Para Menteri memiliki kekuatan yang sangat kecil dan hampir tidak dapat membuat keputusan terkait anggaran mereka sendiri, singkatnya.... dan di parlemen, wanita telah gagal untuk memasukkan perubahan legislatif pada topik-topik seperti tentang cuti orang tua.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dari representasi gender secara politis, struktur yang sudah ada sebelumnya membatasi wanita untuk mempengaruhi kebijakan dan anggaran (Cascais 2019)

2.2.15 INDONESIA

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Instruksi Presiden yang dibuat pada tahun 2000 untuk Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Nasional dan merupakan kebijakan utama untuk pengarusutamaan gender yang memerlukan perencanaan, penganggaran, implementasi dan pemantauan yang sensitif gender dari setiap kementerian dengan tujuan untuk mempersempit kesenjangan gender.
- Kementerian Negara untuk Pemberdayaan Wanita mengimplementasikan Peraturan Presiden tersebut melalui berbagai aktivitas dan program, seperti peningkatan kapasitas pejabat yang terkait.
- Pemerintah Indonesia juga menyerukan kesetaraan bagi semua orang di dalam Konstitusi Indonesia dan Kerangka Kerja Perencanaan Pembangunan Nasional (2005 – 2025).
- Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menuju kesetaraan gender dengan meratifikasi CEDAW dan SDG.
- Tinjauan Sukarela Nasional tahun 2021 mengungkapkan bahwa meskipun beberapa langkah telah dibuat untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan dan hukum sensitif gender, tantangan tetap ada dalam kekerasan terhadap wanita, pernikahan dini, dan meningkatkan representasi wanita dalam politik sebagai pengambil keputusan (Republik Indonesia 2021).

Tinjauan nasional

Indonesia menempati peringkat 101 secara global (dari 156 negara) pada GGI tahun 2021, dan ke-10 di Asia Timur dan Pasifik, dengan GGI sebesar 0,69 (Forum Ekonomi Dunia 2021). Secara keseluruhan, Indonesia telah menutup 68,8% kesenjangan gendernya, dan memiliki hasil yang baik dalam Kesehatan, Kelangsungan Hidup, dan Pencapaian Pendidikan. Meskipun demikian, kesenjangan yang lebih lebar terlihat pada bidang Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi, terutama yang didorong oleh penurunan tajam pada porsi wanita dalam

peran senior yang menurun dari 54,9% menjadi 29,8% dalam setahun. Dalam bidang Pemberdayaan Politik, representasi wanita di parlemen meningkat dari 17,4% di tahun 2019 menjadi 21% di tahun 2021, namun, hal ini diimbangi dengan melebarnya kesenjangan pada representasi wanita di posisi kementerian. Indonesia memiliki salah satu penurunan yang terbesar dalam porsi posisi kementerian yang dijabat oleh wanita (dari 23,5% menjadi 17,1%) dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 121 dari 162 negara untuk GII, dengan nilai sebesar 0,480 (UNDP 2020). Kinerja dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut:

- 17,4% dari kursi parlemen diduduki oleh wanita
- 46,8% dari wanita dewasa telah menempuh pendidikan sampai tingkat menengah dibandingkan 55,1% rekan pria mereka
- Untuk setiap 100.000 kelahiran, 177 wanita meninggal diakibatkan oleh kasus yang terkait dengan kehamilan
- Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja adalah sebesar 53,1% dibandingkan 81,9% untuk pria.

Berfokus pada Ibukotanya, Jakarta, Indonesia memiliki Indeks WBL sebesar 64,4 (Bank Dunia 2022). Indonesia memiliki hasil yang baik dalam hal Mobilitas dan Upah, sementara bidang utama yang harus menjadi perhatian adalah:

- Pernikahan, karena kerangka kerja hukumnya mencegah wanita untuk mengepalai rumah tangga dengan cara yang sama seperti pria, dan untuk memiliki hak yang sama untuk menikah kembali seperti laki-laki.
- Menjadi orang tua: Secara rata-rata, wanita berhak atas cuti hamil berbayar selama kurang dari 14 minggu dan tidak semua tunjangan cuti hamil dibayarkan oleh Pemerintah dalam waktu tersebut.

Pernikahan dini masih banyak terjadi di daerah pedesaan di Indonesia. Tantangan dalam mencegah pernikahan dini adalah karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang akibatnya terhadap kesehatan anak-anak, dinamika kekuasaan yang tidak sebanding yang ada di antara orang tua dan anak-anak serta tidak adanya perangkat hukum untuk mencegah pernikahan dini (Republik Indonesia 2021). Seperti yang terlihat pada Indeks WBL, Indonesia memiliki kinerja yang buruk pada bidang pernikahan karena meskipun ada komitmen kebijakan tingkat tinggi, undang-undang seperti Undang-Undang perkawinan memperkuat peran gender yang tradisional. Undang-undang perkawinan tahun 1974 menegaskan pria adalah sebagai kepala rumah tangga dan wanita sebagai yang bersikap tunduk. Meskipun wanita cukup sering secara simbolis dianggap sebagai “penguasa rumah tangga”, kenyataannya adalah mayoritas wanita tidak berada dalam posisi untuk membuat keputusan pribadi atau ekonomi, terutama terkait bisnis, menjual aset pribadi dan peminjaman tanpa persetujuan seorang laki-laki.” Dengan tingginya tingkat pernikahan dini, hal ini berarti gadis-gadis muda lebih jauh terakar dalam sistem ketidaksetaraan yang sudah ada sejak awal.

2.2.16 BRAZIL

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Kementerian Wanita, Keluarga, dan Hak Asasi Manusia (MMFDH) yang berada langsung di bawah Kepresidenan Federal, adalah sebuah institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mendukung

dan mengimplementasikan kebijakan publik yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita, menegakkan hak-hak wanita dan mempromosikan partisipasi wanita di setiap aspek pembangunan.

- Dua buah undang-undang yakni, Kebijakan Nasional untuk Menangani Kekerasan Terhadap Wanita dan Hukum Maria da Penha ditujukan untuk mengurangi eksploitasi seksual gadis-gadis dan remaja, kekerasan terhadap wanita dan perdagangan wanita, serta mempromosikan hak-hak seksual dan reproduksi tahanan wanita. Tetapi, aborsi masih tetap ilegal di negara tersebut dengan hukuman 1-3 tahun penjara (Wikipedia 2022).
- Sebagai penandatanganan untuk CEDAW dan SDG, Brazil mempunyai kewajiban untuk melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuan dan target/komitmen yang ditetapkan dalam protokol internasional ini. Di dalam Tinjauan Sukarela SDG terbaru tahun 2020, Brazil berkomitmen untuk meningkatkan hingga 20% jumlah wanita di cabang legislatif untuk memastikan bahwa 30% dari kandidat pemilih politik adalah wanita dan untuk meningkatkan 20% jumlah wanita pada Majelis Deputi dan Senat Federal. Di dalam laporan SDG, Brazil membanggakan kinerja tinggi pada akses ke pendidikan dan dalam mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Namun, para kritikus menunjukkan bahwa laporan pencapaian ini secara rasial cenderung condong melawan keturunan Afro dan wanita pribumi, dan mereka mendesak Brazil untuk tidak hanya menghitung jumlah wanita tetapi juga untuk inklusif dalam aspek ras. Permasalahan keamanan transportasi dan infrastruktur publik di dalam dan di sekitar kota-kota besar dilaporkan berdampak pada wanita secara tidak proporsional – dicontohkan dengan tingginya angka pembunuhan perempuan. Di antara anak-anak pribumi, persentase kekurangan gizi dan penyakit lain yang dapat dicegah juga dilaporkan tinggi. Hal ini terlepas dari Brazil yang memiliki salah satu sistem kesehatan terbesar dunia yang menjangkau. Ketidaksetaraan berdampak pada individu rentan menutupi kesuksesan yang ada.

Tinjauan nasional

Status dikursus gender di Brazil sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai bentuk diskriminasi lainnya, sebagai contoh struktur rasisme/diskriminasi terhadap pribumi dan komunitas kulit hitam dan juga diskriminasi terhadap orientasi seksual. Pemerintah saat ini telah melemahkan upaya yang telah dibuat pemerintah sebelumnya dalam hal hak asasi manusia dan penyangkalan terhadap permasalahan lingkungan termasuk perubahan iklim (Nilo A and Fernandes C 2021). Pada gambaran yang lebih luas, ada beberapa indikator menonjol yang perlu diperhatikan, seperti:-

- Tingginya angka pernikahan dini dan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak dan remaja di Brazil, hingga pada tahun 2019, negara ini mengalami insiden tersebut dengan frekuensi tertinggi keempat secara global.
- Peningkatan angka kasus kekerasan terhadap wanita dan LGBTI+.
- Pengurangan anggaran untuk memerangi kekerasan terhadap wanita sebesar 75% dalam lima tahun terakhir.
- Peningkatan infeksi HIV di wilayah Utara dan Timur Laut, wilayah termiskin di negara tersebut (Nilo A and Fernandes C 2021).

Pada tahun 2015, Brazil berada di peringkat ke-5 tertinggi untuk pembunuhan terhadap wanita (4,8 pembunuhan untuk setiap 100.000 wanita) di antara 83 negara (Kemitraan Terbuka Pemerintah 2018). Sementara tingkat pembunuhan menurun, pembunuhan wanita meningkat dan pada tahun 2019, setidaknya 4 wanita dibunuh tiap harinya di Brazil, mencapai rekor tertingginya sepanjang masa (Masyarakat Global 2019).

GGI WEF tahun 2021 untuk Brazil adalah sebesar 0,693 (0 menunjukkan status kesetaraan terburuk dan 1 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sama sekali di antara pria dan wanita). Hal ini mengindikasikan bahwa 30,7 persen wanita memiliki kesempatan yang lebih rendah dibandingkan pria. Indeks ini menempatkan Brazil di peringkat ke-93 dari 156 negara. Laporan tahun 2021 menunjukkan bahwa Brazil belum meningkatkan GGI-nya dan bahkan kemajuan negara ini menurun selama setahun terakhir (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Di wilayah Amerika Latin dan Karibia, GGI Brazil menempati peringkat 25 dari 26 negara, kinerja yang buruk untuk negara yang berpenduduk padat dan untuk negara yang relatif maju. Kesenjangan gender dalam Pemberdayaan Politik sangatlah besar dan negara ini masih harus menutup 86,2% untuk mencapai kesamaan gender dalam komponen ini. 13,8% nya adalah penurunan 4 peringkat sejak tahun 2020. Brazil hanya pernah memiliki satu orang wanita sebagai kepala negara hanya untuk lima tahun dalam 50 tahun terakhir (hanya ada 12% kesenjangan yang tertutup sejauh ini) (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Kesenjangan gender juga bertahan dalam hal Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi, di mana hanya 66,5% dari kesenjangan telah tertutup. Kesenjangan ini terwujud terutama dalam aspek upah dan pendapatan. Sementara Brazil masih memiliki jalan yang panjang untuk menjembatani kesenjangan gender pada politik dan ekonomi, negara ini telah menutup kesenjangan pada sub indeks Kesehatan, Kelangsungan Hidup, dan Pencapaian Pendidikan. Dalam hal kesehatan, 98% kesenjangan telah tertutup dan kesetaraan telah tercapai pada setiap tingkat pendidikan. Tetapi, hanya 10,7% dari wanita Brazil di Universitas terdaftar pada program STEM dibandingkan dengan 28,6% pria. (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Indeks Ketimpangan Gender di negara ini dilaporkan sebesar 0,408, menempatkan negara ini di peringkat ke-95 dari 162 negara di 2019. GII dihitung dari beberapa indikator berikut:

- 15,0% kursi di parlemen diduduki oleh wanita
- 61,6% dari wanita dewasa telah menempuh pendidikan sampai tingkat menengah dibandingkan 58,3% dari rekan pria mereka
- Untuk setiap 100.000 kelahiran, 60,0 wanita meninggal akibat kasus yang terkait dengan kehamilan; dan angka kelahiran dari remaja usia 15-19 tahun adalah 59,1 kelahiran dari 1.000 wanita.
- 54,2% dari partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja itu dibandingkan dengan 74,1 untuk pria (UNDP 2020).

Pada kasus Brazil, data Indeks WBL merujuk pada São Paulo, pusat bisnis utama di mana Brazil memiliki nilai 85 dari 100; nilai yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional sebesar 80,4. Namun hal ini menutupi ketidaksetaraan di sisa wilayah negara ini karena Sao Paulo tidak sepenuhnya mewakili negara tersebut.

Undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi kebebasan untuk bergerak, kondisi tempat kerja, pernikahan dan perbedaan gender dalam indikator pewarisan harta memiliki nilai sempurna sebesar 100.

Tetapi, pada 4 dari 8 indikator WBL perlu diperbaiki. Undang-undang ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan Upah, Menjadi Orang Tua, Kewirausahaan dan Pensiun (indikator yang mendapatkan nilai paling rendah dari semuanya).

Meskipun sedang menutup kesenjangan gender dalam pendidikan, Brazil perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong para wanita untuk mendaftar pada bidang teknik yang dapat berkontribusi dalam membuka peluang dan kesempatan ekonomi yang baru untuk mereka. Brazil harus didorong untuk tidak hanya mengumpulkan informasi jenis kelamin secara terpisah tetapi juga data jenis kelamin terpisah berdasarkan etnis untuk melacak kemajuan di dalam menangani jurang ketidaksetaraan antara komunitas kulit putih dan kulit hitam serta komunitas pribumi.

2.2.17 BANGLADESH

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Di Bangladesh, pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab dari Kementerian Urusan Wanita, dan Anak (MWCA 2018) yang tugasnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak wanita dan anak ditetapkan dan dilindungi di setiap kegiatan pembangunan. Kementerian Urusan Wanita dan Kesejahteraan Sosial juga bertanggung jawab untuk pengentasan kemiskinan terhadap wanita.
- Konstitusi Bangladesh (Pasal 28(4)) membuat ketentuan untuk pengumuman mengenai undang-undang bagi emansipasi wanita. Negara ini juga menjadi penandatanganan untuk hampir semua konvensi internasional dan perjanjian untuk pemberdayaan wanita, termasuk CEDAW. Keseluruhan kegiatan dari Kementerian Urusan Wanita dan Kesejahteraan Sosial termasuk dalam implementasi 22 target yang ditetapkan dalam Kebijakan Nasional Wanita tahun 2011 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Kebijakan yang relevan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Bangladesh termasuk:
 - Kebijakan Pemberdayaan Wanita Nasional, 2011;
 - Kebijakan Anak Nasional, 2011;
 - Kebijakan Pengembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini, 2013;
 - Undang-undang Asam Deoksiribonukleat (DNA), 2014; dan
 - undang-undang Perlindungan Pernikahan Dini, 2017.
- Kebijakan Pemberdayaan Wanita Nasional (NWDP) pada tahun 2011 adalah dokumen kebijakan inti spesifik yang terkait dengan pengembangan wanita. Sebuah Rencana Aksi Nasional telah diformulasikan untuk mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan Wanita Nasional tahun 2011. Pada intinya, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesamaan hak antara pria dan wanita di semua area kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan Konstitusi Bangladesh. Secara khusus, kebijakan ini melarang semua diskriminasi terhadap wanita dan tindakan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Dengan demikian menetapkan status wanita sebagai manusia yang mampu, melalui politik, pembangunan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Kebijakan ini, termasuk Undang-undang dan Peraturan terkait Anak, menyediakan panduan untuk pencegahan pernikahan dini, penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan anak penyandang disabilitas, mencegah kekerasan fisik, dan juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berupa mahar, pelemparan asam, dan lainnya. Kebijakan Nasional Anak tahun 2011 yang memprioritaskan gadis-gadis, menekankan penyuluhan terhadap gadis-gadis remaja, penyediaan fasilitas

sanitasi yang memadai untuk gadis-gadis di institusi pendidikan dan tempat kerja, dan pengaturan keamanan khusus untuk gadis-gadis pada saat terjadinya bencana.

Meskipun Bangladesh telah mencapai beberapa target dalam mengurangi kesenjangan gender, negara ini masih menghadapi tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan program mereka secara efektif dikarenakan reaksi penolakan dari aturan keagamaan, takhayul tradisional dan chauvinisme yang tertanam kuat dalam budaya mereka.

Tinjauan nasional

Menurut GGI tahun 2021, Bangladesh berdiri di urutan ke-65 dari 156 negara dan menjadi Negara Asia Selatan terbaik dari semuanya selama delapan tahun berturut-turut. Peringkat negara ini adalah sebesar 0,79 (dari skala 1 untuk terbaik dan 0 untuk terburuk), mencerminkan kesenjangan gender sebesar 28,1% antara pria dan wanita (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Menariknya, Bangladesh menempati peringkat ke-7 di dunia untuk pemberdayaan Politik pada peringkat GGI, menjadikan satu-satunya negara di mana wanita telah memegang posisi sebagai kepala negara selama 27 tahun – lebih banyak daripada pria dalam 50 tahun terakhir (Forum Ekonomi Dunia 2021). Dalam kategori Partisipasi dan Peluang Ekonomi memiliki kesenjangan gender terbesar, dengan perbandingan, peringkat 147 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021). Meskipun indeks Pendidikan Pencapaian GGInya dinilai tinggi pada angka 0,951, negara ini hanya mencapai peringkat global 121. Sehubungan dengan Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, peringkatnya 134 dari 156 negara (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Indeks Pembangunan Gender Bangladesh 2019 adalah 0,904, dalam skala 0 hingga 1, menempatkannya ke dalam negara-negara Kelompok 4, yaitu negara-negara dengan tingkat kesetaraan sedang hingga rendah dalam pencapaian HDI antara perempuan dan laki-laki (dengan deviasi absolut 7,5-10 persen) (UNDP 2020) GDI didasarkan pada ketidaksetaraan berbasis gender dalam tiga dimensi – kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan kegiatan ekonomi.

Bangladesh memiliki nilai GII 0,537, peringkatnya 133 dari 162 negara dalam indeks tahun 2019. Rinciannya adalah:

- 20,6% kursi parlemen diisi oleh perempuan,
- 39,8% perempuan dewasa telah mencapai setidaknya tingkat pendidikan sekunder dibandingkan dengan 47,5% rekan laki-laki mereka.
- Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, 173,0 perempuan meninggal karena disebabkan terkait kehamilan; dan angka kelahiran remaja adalah 83,0 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun.
- Peran perempuan dalam pasar tenaga kerja adalah 36,3% dibandingkan dengan 81,4 untuk laki-laki (UNDP 2020).

Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum Bank Dunia memberi Bangladesh peringkat 49,4 (dari kemungkinan 100). Skor Bangladesh lebih rendah dari rata-rata regional. Namun, Bangladesh memperoleh nilai sempurna dalam kebebasan bergerak bagi perempuan, tetapi indikator gaji, peran sebagai orang tua dan pensiun sangat rendah, masing-masing 25, 20 dan 25. Bangladesh membutuhkan reformasi dalam hukum yang memengaruhi

keputusan perempuan untuk bekerja, gaji perempuan, pensiun, perkawinan, hukum yang memengaruhi pekerjaan perempuan setelah memiliki anak dan mendukung kewirausahaan dan warisan.

Meskipun Bangladesh berada di puncak kawasan Asia Selatan, masih ada kesenjangan gender yang lebar di banyak dimensi. Bangladesh masih perlu mengatasi kesenjangan gender, Partisipasi Ekonomi dan Peluang yang diikuti pada tahun 2021 hanya mengatasi 41,8% dari kesenjangan ini. Mayoritas perempuan di Bangladesh bekerja di sektor informal yang berkontribusi pada rendahnya tingkat stabilitas pekerjaan dan pendapatan.

Terlepas dari kenyataan bahwa peringkatnya dalam pemberdayaan politik patut dipuji, skor 0,546 menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk melibatkan perempuan di semua tingkat kehidupan politik. Saat ini, hanya 20,9% anggota parlemen dan 7,7% menteri adalah perempuan. Selain itu, kesenjangan gender dalam pendaftaran di pendidikan tinggi harus diatasi. Bangladesh juga perlu mengatasi kesenjangan dalam Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, untuk meningkatkan harapan hidup dan kondisi kesehatan bagi perempuan.

2.2.18 PANTAI GADING

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Di Pantai Gading isu gender berada di bawah Kementerian Keluarga, Perempuan dan Anak (*Ministere de la Femme, de la famille et de l'Enfant- MFFE*), yang misinya mendukung perlindungan hak-hak anak, kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender serta hak-hak perempuan. Pada tahun 2006 MFFE membentuk Direktorat Kesetaraan dan Gender yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintah dalam memerangi diskriminasi gender dan untuk menerapkan Kebijakan Nasional tentang Peluang, Kesetaraan dan Gender bulan April 2009. Yang terakhir diterapkan adalah untuk mempromosikan pertimbangan gender di sektor publik dan swasta (JICA 2013).
- Pasca 2011, beberapa legislasi, kebijakan dan rencana dikembangkan dan diterapkan untuk memperbaiki situasi dari perempuan dan anak perempuan serta mengurangi kesenjangan gender di negara tersebut. Untuk memperbaiki kesenjangan pendidikan gender, Rencana Tindakan Nasional untuk Literasi dan Pendidikan Nonformal (*Plan d'action national d'alphabetisation et de l'éducation non formelle*) 2012-2015 diterapkan (JICA 2013).
- Pada tahun 2019 Pantai Gading meluncurkan Dewan Nasional untuk Perempuan sejalan dengan komitmen negara tersebut terhadap norma-norma internasional, seperti Platform Aksi Beijing, dan Konstitusinya. Sehubungan dengan Observatorium untuk Kesetaraan dan Gender yang didirikan pada tahun 2014, Dewan Nasional akan membimbing dan memberi saran kepada pemerintah tentang keputusan yang terkait dengan hak-hak perempuan.
- Pantai Gading mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1995. Pantai Gading juga telah mengesahkan Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat tentang Hak Perempuan di Afrika (Protokol Maputo). Dalam laporannya tahun 2019 kepada CEDAW, Pantai Gading menyoroti beberapa reformasi legislatif yang mencakup amendemen Konstitusi pada tahun 2016, yang melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun

dan undang-undang bulan Maret 2019 yang menetapkan kuota 30 persen untuk kandidat politik perempuan.

- Kekhawatiran tetap ada bahwa terlepas dari undang-undang yang telah disahkan, ada kesenjangan implementasi dan dalam praktiknya, perempuan tetaplah kurang terwakili dalam pemilihan dan jabatan publik lainnya. Sayangnya, mutilasi alat kelamin perempuan tetap menjadi kenyataan bagi banyak anak perempuan, serta pernikahan anak-anak dan kehamilan dini. Dewan CEDAW mendesak Pantai Gading untuk menerapkan kerangka hukum tentang kesetaraan gender dan menggunakan langkah-langkah khusus sementara untuk mencapai kesetaraan substansial perempuan dan untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial yang menghalangi penikmatan hak-hak perempuan secara efektif (OHCHR 2022).

Tinjauan nasional

Menurut GGI WEF, Pantai Gading menempati peringkat 134 dari 156 negara secara global pada tahun 2021, dan menempati peringkat 30 dari 35 negara di antara negara-negara Afrika Sub-Sahara. Nilai negaranya adalah 0,637 (skor terbaik 1 dan terendah 0), mencerminkan kesenjangan gender 36,3 persen antara laki-laki dan perempuan (Forum Ekonomi Dunia 2021). Dari segi kemajuan, nilai tersebut meningkat 8 poin dari tahun sebelumnya yang memperlihatkan usaha yang dilakukan Pantai Gading untuk mengatasi kesenjangan gender.

Berkenaan dengan empat kategori dasar GGI, (Partisipasi dan Peluang Ekonomi, Pencapaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup serta Pemberdayaan Politik) Pantai Gading masing-masing menempati peringkat 90, 143, 36 dan 139, dari 156 negara. Dalam Partisipasi dan Peluang Ekonomi Pantai Gading telah mengalami peningkatan secara signifikan dan kesetaraan gender dalam kategori ini telah meningkat sebesar 80 persen, yang mana itu adalah hal yang menakjubkan. Namun, Pantai Gading masih harus membuat program untuk mengurangi kesenjangan dalam Pencapaian Pendidikan dan Pemberdayaan Politik (Forum Ekonomi Dunia 2021)..

Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2020 juga memberikan indeks untuk gender, seperti Indeks Ketidaksetaraan Gender (GII) yang mencerminkan ketidaksetaraan berbasis gender dalam tiga dimensi – kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi. Pantai Gading berada di peringkat 153 dari 162 negara dalam laporan 2019. Nilai GII-nya adalah 0,638, terdiri dari dimensi individual berikut:

- 13,3% kursi parlemen diisi oleh perempuan.
- 17,9% perempuan dewasa telah mencapai setidaknya tingkat pendidikan sekunder dibandingkan dengan 34,4 persen rekan laki-laki mereka.
- 617,0 perempuan di setiap 100.000 kelahiran hidup, meninggal karena disebabkan terkait kehamilan; dan tingkat kelahiran remaja adalah 117,6 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun.
- Peran perempuan dalam pasar tenaga kerja adalah 48,2 persen dibandingkan dengan 65,5 untuk laki-laki (UNDP 2020)

Berkenaan dengan lingkungan kerja perempuan, Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum Bank Dunia 2022, Pantai Gading mencetak nilai 83,1 dari 100, dengan 100 sebagai nilai sempurna. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai wilayah Afrika Sub-Sahara sebesar 71,5. Dalam hal mobilitas, lingkungan tempat kerja, properti dan warisan serta besarnya pensiun perempuan Pantai Gading mendapat nilai sempurna (Bank Dunia 2022)

Bidang-bidang perbaikan diperlukan dalam undang-undang yang mempengaruhi gaji, perkawinan, kehamilan, dan perempuan dalam memulai dan menjalankan bisnis.

2.2.19 TRINIDAD DAN TOBAGO

Kebijakan, institusi, dan komitmen gender nasional utama yang mengarusutamakan pertimbangan gender atau akan memengaruhi lingkungan yang mendukung proyek

- Departemen Urusan Gender dan Anak berada di bawah Kantor Perdana Menteri Trinidad dan Tobago, dan misinya adalah untuk mengarusutamakan kemajuan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta anak perempuan dan anak laki-laki di semua bidang pembangunan nasional, dan memastikan perlindungan, pembangunan, dan partisipasi semua anak dalam persiapan untuk kehidupan dewasa yang bermakna. Atas ini, Kantor Perdana Menteri (Urusan Gender dan Anak) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Nasional Gender dan Pembangunan 2018.
- Trinidad dan Tobago telah menandatangani dan mengesahkan berbagai instrumen, perjanjian, dan konvensi internasional termasuk CEDAW, Konvensi Hak Anak (CRC), Konferensi Internasional tentang Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan (ICPD PoA), Platform Aksi Beijing (BPfA), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Trinidad dan Tobago menandatangani Konvensi pada tahun 1985 dan mengesahkannya pada tahun 1990. Setiap 4 tahun Trinidad dan Tobago melapor kepada komite CEDAW.
- Instrumen utama pengarusutamaan gender di negara ini adalah Kebijakan Nasional Gender dan Pembangunan 2018 yang disebutkan di atas. Kebijakan ini membentuk kerangka kerja yang mendorong pertimbangan terhadap kebutuhan yang berbeda, kendala, peluang, dan prioritas laki-laki dan perempuan sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan bangsa. Kebijakan tersebut konsisten dengan komitmen dan kewajiban Pemerintah berdasarkan (CEDAW), dan konvensi lain yang disebutkan di atas.
- Untuk mengoperasionalkan kebijakan yang dikembangkan Pemerintah Trinidad dan Tobago dan Rencana Tindakan Nasional (RAN) 'Strategi Pembangunan Nasional 2016-2030-Visi 2030'. Rencana tersebut secara lebih spesifik menguraikan tujuan dan target untuk mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030.
- Selain itu, Trinidad dan Tobago memiliki sejumlah legislatif yang mengriminalisasi kekerasan terhadap perempuan yaitu UU Pelanggaran Seksual tahun 1986 yang mengriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan dalam amendemennya tahun 2000, dan UU KDRT tahun 1999.

Tinjauan nasional

Trinidad dan Tobago berada pada posisi ke-37 dari 156 negara di dunia dalam pemeringkatan GGI 2021, dan ke-6 dari 26 negara di antara negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dengan nilai 0,749 (nilai terbaik 1 dan terendah 0) mencerminkan kesenjangan gender 25,1 persen antara laki-laki dan perempuan (Forum Ekonomi Dunia 2021). Lebih khusus lagi, Trinidad dan Tobago berada di peringkat ke-39 untuk Pemberdayaan Politik dan 1 bersama 37 negara lainnya untuk Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (Forum Ekonomi Dunia 2021).

Nilai GII Trinidad dan Tobago sebesar 0,323 menempatkannya sebagai peringkat 73 dari 162 negara dalam indeks tahun 2019. Ini dihitung berdasarkan statistik berikut:

- 32,9% kursi parlemen diisi oleh perempuan;
- 74,5% perempuan dewasa telah mencapai setidaknya tingkat pendidikan sekunder dibandingkan dengan 71,2 persen rekan laki-laki mereka;
- 67,0 perempuan di setiap 100.000 kelahiran hidup, meninggal karena disebabkan terkait kehamilan; dan angka kelahiran remaja adalah 30,1 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun;
- Peran perempuan dalam pasar tenaga kerja adalah 50,1 persen dibandingkan dengan 70,2 untuk laki-laki (UNDP 2020).

Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum Bank Dunia 2022 memberi Trinidad dan Tobago nilai 75 (dari kemungkinan 100 yang lebih rendah dari rata-rata regional 80,4. Trinidad dan Tobago memperoleh skor sempurna 100 dalam Kewirausahaan, Aset, dan Pensiun. Nilai terendah adalah 20 dalam kategori Peran sebagai orang tua. Trinidad mungkin perlu meninjau undang-undang tentang administrasi cuti hamil dan tunjangan, waktu yang tersedia untuk cuti orang tua bagi kedua orang tua serta melarang pemecatan terhadap perempuan hamil (Bank Dunia 2022).

2.3 TEMUAN DARI PENILAIAN NEGARA DAN SEKTOR

エラー! 参照元が見つかりません。 (di bawah) telah dikembangkan melalui analisis penilaian sektor dan negara di atas; ini memberikan kerangka kerja yang akan digunakan GGC untuk mengidentifikasi potensi intervensi responsif gender yang harus dipertimbangkan sebagai bagian dari proses desain proyek untuk memaksimalkan manfaat gender dari proyek tertentu. Metodologi yang diterapkan dalam mengembangkan kerangka kerja ini dijelaskan di akhir sub bagian ini.

Ini berfungsi sebagai ringkasan tingkat tinggi dari beberapa tantangan gender yang paling mendesak di setiap negara yang relevan dengan proyek perubahan iklim, dan intervensi spesifik sektor yang paling mungkin untuk mengatasi setiap tantangan. Oleh karena itu, selama proses desain proyek, pemilik proyek dan GGC dapat mengidentifikasi masalah gender yang paling ditargetkan di awal proyek, berdasarkan fokus sektor proyek dan tantangan paling signifikan di negara tertentu. Selanjutnya, intervensi spesifik sektor yang paling mungkin untuk mengatasi masalah ini dapat dimasukkan dalam desain proyek, asalkan relevan dengan keadaan spesifik negara. Dampak yang diharapkan dari setiap intervensi, kemudian dapat dimasukkan ke dalam proses pemantauan dan evaluasi (yaitu Rencana Tindakan Gender, Lampiran 8.2) untuk menilai apakah manfaat yang diinginkan benar-benar terwujud.

Namun, kerangka kerja tersebut tidak memberikan daftar lengkap tantangan dan kemungkinan intervensi, dan, seperti yang disebutkan sebelumnya, konteks spesifik negara yang unik perlu dipertimbangkan dalam analisis gender secara rinci pada setiap tahap pra/kelayakan proyek, untuk menilai secara menyeluruh apakah intervensi yang dirancang memang akan memiliki efek yang diharapkan, dan untuk mengidentifikasi potensi masalah gender lainnya.

Tabel 6. Intervensi spesifik sektor yang potensial untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi

Area-area kunci yang ditangani oleh masing-masing intervensi ✓ – Manfaat langsung kunci dari intervensi		Tantangan yang dihadapi kaum perempuan							
		Kurangnya keterwakilan dalam serikat kerja	Perbedaan penghasilan	Ketidakmerataan akses pendidikan	Akses kesehatan buruk	Ketidakmerataan akses terhadap sumber daya/layanan-layanan publik lainnya	Kekerasan terhadap perempuan	Jaminan kesehatan, makanan dan air	Kurangnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan politik
Negara-negara di mana ini menjadi masalah yang sangat signifikan		Bangladesh, Mesir, India, Indonesia, Maroko, Pakistan, Filipina, Senegal, Trinidad dan Tobago	Bangladesh, Brasil, Pantai Gading, Mesir, India, Indonesia, Maroko, Pakistan, Senegal, Uganda	Pantai Gading, Pakistan, Filipina, Senegal	Bangladesh, Kamboja, Pantai Gading, Indonesia, Kenya, Laos, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda	Pantai Gading, Mesir, Filipina, Uganda	Bangladesh, Brasil, Mesir, Kenya, Maroko, Pakistan, Rwanda, Senegal, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Uganda, Vietnam	Bangladesh, Kamboja, Pantai Gading, India, Kenya, Laos, Pakistan, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda	Brasil, Kamboja, Pantai Gading, Mesir, Indonesia, Kenya, Laos, Maroko, Pakistan, Vietnam
Negara-Negara di mana hal ini menjadi masalah yang signifikan		Brasil, Kamboja, Pantai Gading, Afrika Selatan	Kamboja, Kenya, Filipina, Rwanda, Afrika Selatan, Tanzania, Trinidad dan Tobago	Kamboja, Kenya, Tanzania, Uganda	India, Pakistan, Filipina, Afrika Selatan	Bangladesh, Indonesia, Kenya, Pakistan, Tanzania	Kamboja, Pantai Gading, India, Indonesia, Laos, Filipina, Afrika Selatan	Mesir, Indonesia, Filipina, Afrika Selatan, Vietnam	Filipina, Senegal, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Uganda
Intervensi-intervensi yang teridentifikasi	Energi	Pemberdayaan melalui pilihan	✓	✓	✓				
		Reformasi kebijakan buta gender	✓	✓	✓				
		Pembukaan peluang penghasil pendapatan	✓	✓					
		Jaminan kesinambungan melalui inisiatif-inisiatif lokal	✓	✓	✓		✓		
	Transportasi	Pengembangan kebijakan, strategi, dan peraturan transportasi yang berwawasan gender	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		Keberlangsungan analisis dan evaluasi rutin dan pelaporan isu-isu gender dan transportasi selama perencanaan, implementasi dan pengoperasian transportasi.	✓	✓		✓	✓	✓	
		Peningkatan kesadaran dan pelatihan agen-agen transportasi dan operator layanan	✓	✓		✓	✓	✓	
	Gedung	Kebijakan, pemrograman dan perencanaan kesetaraan gender di kota-kota besar dan wilayah perkotaan					✓		
		Pengambilan keputusan kota yang lebih inklusif dan efisien					✓		✓
		Sistem-sistem transportasi inklusif	✓	✓		✓	✓		
		Perbaikan akses dan keterjangkauan peralatan dan bangunan hijau	✓	✓			✓		
	Jaminan kesehatan, makanan dan air	Peningkatan kesadaran dan pelatihan agen-agen transportasi dan operator layanan	✓	✓			✓	✓	
		Peningkatan keterampilan pertanian cerdas-iklim dan alih teknologi	✓	✓			✓		✓
		Akses ke infrastruktur iklim dan sistem peringatan dini	✓	✓			✓		✓
	Infrastruktur dan lingkungan binaan	Peningkatan kesadaran dan pelatihan agen-agen transportasi dan operator layanan	✓	✓			✓	✓	
		Pengembangan kode dan standar bangunan inklusif							✓
Pembangunan tempat penampungan yang peka gender bagi masyarakat						✓	✓	✓	
Peringatan dini dan komunikasi pengelolaan bencana						✓		✓	
Pemberdayaan perempuan								✓	

Perlu dicatat bahwa setiap intervensi kemungkinan juga akan berdampak tidak langsung pada area ketidaksetaraan gender lainnya. Misalnya, memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan politik kemungkinan masing-masing akan mengarah pada penurunan angka pernikahan anak dan peningkatan posisi hukum perempuan. Keterkaitan antara potensi manfaat langsung dan tidak langsung terkait gender proyek ini juga akan dieksplorasi secara lebih mendalam oleh pemilik proyek dan GGC selama tahap kelayakan serta setelah tahap implementasi dan M&E.

Menerapkan kerangka kerja selama proses pengembangan proyek

Kotak teks di bawah ini menyajikan contoh hipotetis tingkat tinggi tentang bagaimana Tabel 6 dapat digunakan oleh GGC dan pemilik proyek, dalam praktiknya.

Contoh aplikasi: Proyek energi di Bangladesh

- Pertama, **dengan mempertimbangkan konteks nasional**, tabel tersebut menunjukkan bahwa tantangan gender yang 'sangat signifikan' di Bangladesh adalah: kurangnya perwakilan dalam angkatan kerja, kesenjangan pendapatan, akses yang buruk ke layanan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, dan kerentanan yang lebih tinggi terhadap bencana. Tantangan gender yang 'signifikan' adalah: akses yang tidak merata ke sumber daya / layanan publik lainnya.
- Kedua, **dengan mempertimbangkan konteks sektor**, tabel tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang paling mungkin diatasi oleh proyek energi adalah: kurangnya perwakilan dalam angkatan kerja, kesenjangan pendapatan, akses yang tidak merata pada pendidikan, dan akses yang tidak merata ke sumber daya / layanan publik.
 - Oleh karena itu, proyek energi di Bangladesh berpotensi mengatasi dua tantangan gender yang 'sangat signifikan': kurangnya perwakilan dalam angkatan kerja dan kesenjangan pendapatan.
- **Ketiga, mempertimbangkan dampak potensial dari setiap intervensi**, intervensi spesifik energi yang dapat mengatasi tantangan yang telah teridentifikasi ini adalah: pemberdayaan melalui pilihan, mereformasi kebijakan buta gender, mengaktifkan peluang menghasilkan pendapatan, dan mengaktifkan kesinambungan melalui inisiatif lokal.
 - Oleh karena itu, intervensi ini (“kapasitas untuk perubahan”) harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam proyek, sekiranya sesuai dengan konteks spesifik proyek.

Oleh karena itu, dalam melakukan dan meninjau penilaian gender proyek, masing-masing pemilik proyek dan GGC, dapat menggunakan kerangka kerja ini sebagai titik referensi untuk memastikan bahwa tantangan gender paling signifikan di negara tersebut sedang ditangani melalui intervensi yang kemungkinan akan memberikan dampak penting terkait gender yang memiliki relevansi tinggi dengan sektor tersebut.

Utilitas kerangka kerja untuk tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Kategori “tantangan yang dihadapi perempuan” dalam エラー! 参照元が見つかりません。 juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat dilacak dalam Rencana Tindakan Gender GGC (disertai Lampiran 8.2). Untuk tujuan indikator GAP, tantangan telah dikelompokkan lebih lanjut sebagai berikut:

- Indikator “Peningkatan mata pencaharian dan peningkatan ketahanan perempuan dan anak perempuan yang dihasilkan dari langkah-langkah adaptasi dan mitigasi” akan melacak kemajuan dalam mengatasi tantangan “kerentanan tinggi terhadap bencana”.
- Indikator “Pengambilan keputusan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan” akan melacak kemajuan melawan tantangan “kurangnya perwakilan dalam pengambilan keputusan politik” (mencatat bahwa indikator akan terlihat melacak kemajuan dalam bidang pengambilan keputusan yang lebih luas terlebih yang sepenuhnya berkaitan dengan tingkat politik pada pemerintahan).
- Indikator “Pengurangan kekerasan berbasis gender” akan melacak kemajuan dalam melawan tantangan “kekerasan terhadap perempuan”.
- Indikator “Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui peningkatan akses dan kontrol atas sumber daya, layanan dan peluang ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan pendidikan” akan melacak kemajuan dalam mengatasi tantangan “di bawah perwakilan dalam angkatan kerja”, “kesenjangan pendapatan”, “akses yang tidak merata pada pendidikan”, “akses yang buruk ke perawatan kesehatan”, dan “akses yang tidak merata pada sumber daya dan layanan publik lainnya”. (mencatat “pemberdayaan” akan dipertimbangkan melalui berbagai sudut pandang, termasuk penghematan waktu, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesehatan, peningkatan hasil pendidikan, dll.).

Metodologi untuk mengembangkan kerangka kerja

Tabel 6 dikembangkan melalui proses multistap:

- **Analisis penilaian negara:** Tantangan gender utama diidentifikasi untuk masing-masing negara, dan tantangan ini dipertimbangkan secara keseluruhan untuk memilih tantangan yang ada di sebagian besar negara. Dari daftar ini, tantangan yang kemungkinan besar akan langsung ditangani oleh investasi terkait iklim adalah yang telah dipilih.
- **Indikator Seleksi:** Sebuah tinjauan literatur yang relevan telah dilakukan dan indikator yang tepat untuk mengukur tingkat tantangan yang telah dipilih adalah memperhitungkan relevansi indikator dan ketersediaan data.
- **Pengumpulan data:** Data dikumpulkan untuk setiap indikator untuk setiap negara dan dicatat dalam lembar kerja.
- **Analisis data:** Titik data untuk setiap indikator dianalisis secara keseluruhan untuk memastikan tersebarnya penilaian di 19 negara terpilih.

- **Seleksi ambang batas:** Dua ambang batas ditetapkan untuk setiap indikator untuk menetapkan titik di mana tantangan dikategorikan sebagai 'signifikan' atau 'sangat signifikan', berdasarkan analisis data sebelumnya dan pertimbangan dari tolok ukur internasional.
- **Penilaian kategori:** Setiap titik data untuk setiap negara dan indikator dibandingkan dengan ambang batas yang sesuai untuk menentukan apakah titik tersebut termasuk dalam kelompok 'signifikan' atau 'sangat signifikan'.
 - Misalnya, ambang batas untuk tingkat kekerasan gender yang 'sangat signifikan' adalah 30% dan ambang batas untuk tingkat kekerasan gender yang 'signifikan' adalah 10%. Dengan demikian, negara-negara di mana 30% atau lebih perempuannya mengalami kekerasan gender dalam hidup, diklasifikasikan bahwa mereka menghadapi tantangan kekerasan gender yang 'sangat signifikan'. Negara-negara di mana 10-30% perempuan mengalami kekerasan gender dalam hidup, diklasifikasikan bahwa mereka menghadapi tantangan kekerasan gender yang 'signifikan'.
- **Analisis intervensi:** Intervensi (“kapasitas untuk perubahan”) yang sebelumnya diidentifikasi dalam penilaian sektor telah didaftarkan. Potensi setiap intervensi untuk mengatasi setiap tantangan ditentukan berdasarkan penilaian sektor, yang menguraikan dampak potensial dari setiap intervensi.
- **Hasil: jika ada masalah gender yang signifikan dengan tantangan tinggi, pemilik proyek akan diminta untuk memasukkan intervensi dan indikator spesifik pada negara yang lebih kuat serta memberikan penilaian gender yang membahas kemungkinan yang mungkin terjadi.**

Indikator dan ambang batas yang digunakan ditampilkan pada di bawah ini.

Tabel 7. Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat tantangan di setiap negara

Tantangan	Indikator	Sumber	Ambang batas		Penjelasan		Catatan
			Sangat signifikan	Signifikan	Sangat signifikan	Signifikan	
Kurangnya keterwakilan dalam angkatan kerja	Kesenjangan dalam partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja	Indeks Kesenjangan Gender Dunia (WEF)	$\geq 20\%$	$\geq 10\%$	Jika kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja lebih besar atau sama dengan 20%, maka tantangan ini tergolong sangat signifikan.	Jika kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja lebih besar atau sama dengan 10%, tapi kurang dari 20%, maka tantangan ini tergolong signifikan.	
Perbedaan penghasilan	Penghasilan perempuan sebagai persentase penghasilan laki-laki	Indeks Kesenjangan Gender Dunia (WEF)	$\leq 60\%$	$\leq 80\%$	Jika penghasilan yang diperoleh perempuan kurang dari atau sama dengan 60% dari penghasilan laki-laki, tantangan ini tergolong sangat signifikan.	Jika penghasilan yang diperoleh perempuan kurang dari atau sama dengan 80% penghasilan laki-laki, tapi lebih besar dari 60% dari penghasilan laki-laki, maka tantangan ini tergolong signifikan.	
Kesenjangan akses dalam memperoleh pendidikan	Skor Pencapaian Pendidikan GGI (1 = paling baik, 0 = paling buruk)	Indeks Kesenjangan Gender Dunia (WEF)	$\leq 0,9$	$\leq 0,95$	Jika skor capaian pendidikan kurang dari atau sama dengan 0,9, maka tantangan ini tergolong sangat signifikan.	Jika skor capaian pendidikan kurang dari atau sama dengan 0,95 tetapi lebih tinggi dari 0,9, maka tantangan ini tergolong signifikan.	Hal ini terdiri dari tingkat literasi, partisipasi dalam pendidikan dasar, partisipasi dalam pendidikan tingkat lanjut/sekunder, dan partisipasi dalam pendidikan tinggi/tersier.
Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan	Kematian ibu hamil, kematian per 100.000 kelahiran	Indeks Kesenjangan Gender Dunia (WEF)	≥ 150	≥ 100	Jika angka kematian per 100.000 kelahiran lebih besar atau sama dengan 150, maka tantangan ini tergolong sangat signifikan.	Jika angka kematian per 100.000 kelahiran lebih besar atau sama dengan 100, tetapi kurang dari 150, maka masalah ini tergolong signifikan.	
Akses terhadap sumber daya yang tidak merata	Jumlah dari skor GGI untuk pemerolehan akses pemanfaatan, pengendalian, dan kepemilikan aset lahan dan non-lahan (0 = terbaik, 2 = terburuk)	Indeks Kesenjangan Gender Dunia (WEF)	$\geq 1,25$	$\geq 0,75$	Jika skor untuk pemerolehan akses terhadap aset lahan dan non-lahan lebih besar atau sama dengan 1,25, maka tantangan ini tergolong sangat signifikan.	Jika skor untuk pemerolehan akses terhadap aset lahan dan non-lahan lebih besar atau sama dengan 0,75, tetapi kurang dari 1,25, maka tantangan ini tergolong signifikan.	
Kekerasan terhadap perempuan	Persentase (%) perempuan yang pernah mengalami kekerasan gender sewaktu hidup	Indeks Kesenjangan Gender Dunia (WEF)	$\geq 30\%$	$\geq 10\%$	Jika % perempuan yang pernah mengalami kekerasan gender lebih besar atau sama dengan 30%, maka tantangan ini tergolong sangat signifikan.	Jika % perempuan yang pernah mengalami kekerasan gender lebih besar atau sama dengan 10%, tetapi kurang dari 30%, maka masalah ini tergolong signifikan.	
Jaminan kesehatan, makanan dan air	Skor kerentanan terhadap bencana dari indeks ND-GAIN (0 = terbaik, 1 = terburuk)	Indeks ND-GAIN	$\geq 0,5$	$\geq 0,4$	Jika skor kerentanan terhadap bencana lebih besar atau sama dengan 0,5, maka tantangan ini tergolong sangat signifikan.	Jika skor kerentanan terhadap bencana lebih besar atau sama dengan 0,4, tetapi kurang dari 0,5, maka tantangan ini tergolong signifikan.	Terdiri atas paparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptif. Kerentanan terhadap bencana di tingkat nasional telah digunakan sebagai salah satu indikator karena ada beberapa literatur signifikan yang menyorot ketidakseimbangan dampak bencana terhadap perempuan. (Pusat untuk Gender dan Bencana 2021)
Kurangnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan politis	Skor pemberdayaan politik GGI (1 = terbaik, 0 = terburuk)	Indeks Kesenjangan Gender Dunia (WEF)	$\leq 0,2$	$\leq 0,4$	Jika skor pemberdayaan politik kurang dari atau sama dengan 0,2, maka tantangan ini tergolong sangat signifikan.	Jika skor pemberdayaan politik kurang dari atau sama dengan 0,4, tetapi lebih besar dari 0,2, maka tantangan ini tergolong signifikan.	Yang terdiri atas % kursi parlemen yang diisi oleh perempuan, % posisi kementerian yang dipegang oleh perempuan, dan % kepemimpinan wanita sebagai kepala negara dalam kurun waktu 50 tahun terakhir

2.4 KATA PENUTUP

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6, serta penilaian-penilaian yang mendukung per sektor dan negara , jenis-jenis kerentanan, tantangan, kondisi mendasar, target dan ambisi nasional, serta kemampuan/peluang untuk perubahan, bervariasi pada tingkat negara dan pada tiap lima sektor tersebut. GGC mengakui hal ini dan menghargai pentingnya memastikan bahwa proyek-proyek yang didukungnya memiliki pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk 1) mengatasi masalah-masalah yang berkaitan erat dengan gender dan ii) mengedepankan kesetaraan gender. Meskipun pemilik proyek akan menjadi penanggung jawab utama yang mengadopsi pendekatan-pendekatan tersebut (yang didukung oleh penilaian gender proyek-spesifik dan rencana aksi), GGC akan memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendekatan-pendekatan, penilaian, dan rencana aksi yang berkaitan dengan gender ini dikembangkan dan diimplementasikan sampai derajat ketelitian dan ketegasan yang diharapkan (sejalan dengan persyaratan GCF tentang Pengarusutamaan Gender) Pendekatan GGC untuk menjamin bahwa hal ini terlaksana telah diuraikan dalam Bab 3, disertai dengan komitmen tegas yang terkandung dalam Rencana Aksi Gender (Lampiran 8.2) tentang bagaimana ia, sebagai suatu organisasi, akan memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan (manusia ataupun finansial) terpenuhi untuk memberi masukan teknis bagi perkembangan, proses peninjauan, pengamatan, dan pengawasan terkait-gender yang dibuat sebagai hasil dari proyek tersebut.

3 Aplikasi dari Program

Bagian akhir dari Lampiran ini akan memberikan rincian yang lebih detail tentang pendekatan GGC untuk menjamin bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan sejalan dengan pendekatan GCF tentang pengarusutamaan gender di tingkat proyek. Jika proyek tersebut tidak memiliki suatu inti yang difokuskan pada masalah gender, manajer portofolio akan berusaha untuk memperoleh keuntungan dari sub proyek dengan intervensi hijau serta fokus secara langsung ataupun tidak langsung pada gender, terutama dalam proyek-proyek adaptasi.

3.1 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB (AE DAN EE)

Lembaga Terakreditasi bertanggung jawab untuk mengamati dan mengawasi bahwa GGC memenuhi prinsip-prinsip dan standar gadaai GCF, standar pengamanan sosial dan lingkungan, kebijakan Gender, serta kebijakan dan persyaratan lain yang telah ditentukan GCF, sesuai dengan kesepakatan hukum yang terkait (perjanjian induk akreditasi dan kesepakatan-kesepakatan aktivitas yang dibiayai).

AE akan membantu dalam meninjau dan menyerahkan laporan Dampak Iklim per caturwulan dan tahunan serta rencana Pengawasan dan Evaluasi agregat/terkonsolidasi kepada GCF. Saat GGC mulai beroperasi, AE juga akan membantu memastikan bahwa GGC memiliki sistem, kebijakan, dan prosedur institusional yang dapat diterapkan agar untuk melaksanakan program-program secara memadai. Selain itu, AE akan melakukan pengawasan bahwa GGC memiliki kemampuan untuk mengawasi, melaporkan, dan memverifikasi data yang diperoleh dari pemilik proyek serta bahwa standar, pengamanan, dan kebijakan GCF yang relevan sedang ditegakkan. Dalam Lampiran 11, sebuah dana telah dialokasikan untuk fungsi pengawasan, evaluasi, dan pelaporan indikator-indikator dan dampak terkait-gender di mana AE akan memeriksa penggunaan anggaran dan implementasi dana tersebut dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang terpilih.

Sampai saat ini, AE juga melakukan uji kelayakan dan penilaian risiko yang tegas terhadap GGC untuk memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar diadministrasikan untuk keperluan program tersebut.

Tentu, AE dan bersama penilai pihak ketiga yang ditunjuk untuk menangani area tematik Iklim, Gender, dan E&S, akan memeriksa apakah GGC memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan kebijakan dan protokol-protokol GCF yang berkaitan dengan Gender. AE akan tetap selalu cekatan dan tajam mengikuti kebijakan lingkungan GCF yang terus berkembang dan memastikan bahwa GGC selalu sejalan dengan perkembangan ataupun perubahan yang mungkin timbul selama implementasi program tersebut.

GGC sebagai Lembaga Pelaksana (EE) akan diawasi oleh AE. Oleh karena itu, GGC bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mengeksekusi program-program yang dibiayai GCF serta akan meninjau dan memberikan masukan untuk rencana aksi gender, penilaian, dan laporan Dampak Iklim ketika diajukan oleh pihak peminjam. EE juga memiliki kekuasaan dan pengalaman untuk mengimplementasikan evaluasi

pengawasan dan melaporkan syarat-syarat yang berkaitan dengan indikator-indikator gender-spesifik berdasarkan riwayat pengalamannya dalam mengeluarkan surat obligasi hijau jenis ini.

3.2 PROSEDUR OPERASIONAL

3.2.1 PROSES SELEKSI TRANSAKSI GGC (TSP)

Untuk mencapai misinya, GGC akan mempertimbangkan berbagai dampak positif dan negatif dari transaksi-transaksi yang direncanakan untuk diberi jaminan kredit. Beberapa pertimbangan khusus akan diberikan untuk memahami, mengukur, dan mengelola dampak transaksi sesuai dengan empat elemen inti berikut ini:



Tujuan

Dampak positif dari pihak peminjam terhadap dampak **perubahan iklim** di luar transaksi: dapat di replikasi, ditetapkan sebagai teladan, atau mengatasi informasi asimetris sehingga dapat membangun jalur untuk pendanaan iklim yang lebih luas dari pasar modal dunia.



Orang

Dampak positif dan negatif peminjam terhadap pemangku kepentingan yang paling penting. Ini termasuk karyawan, keluarga, pelanggan, pemasok, komunitas, dan orang lain yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh peminjam.



Planet

Dampak positif dan negatif dari pihak peminjam terhadap lingkungan alam sekitarnya. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam, bahan berbahaya, dan sebagainya, serta pembuangan limbah, penanaman hutan kembali, dan restorasi alam yang telah rusak.



Keuntungan

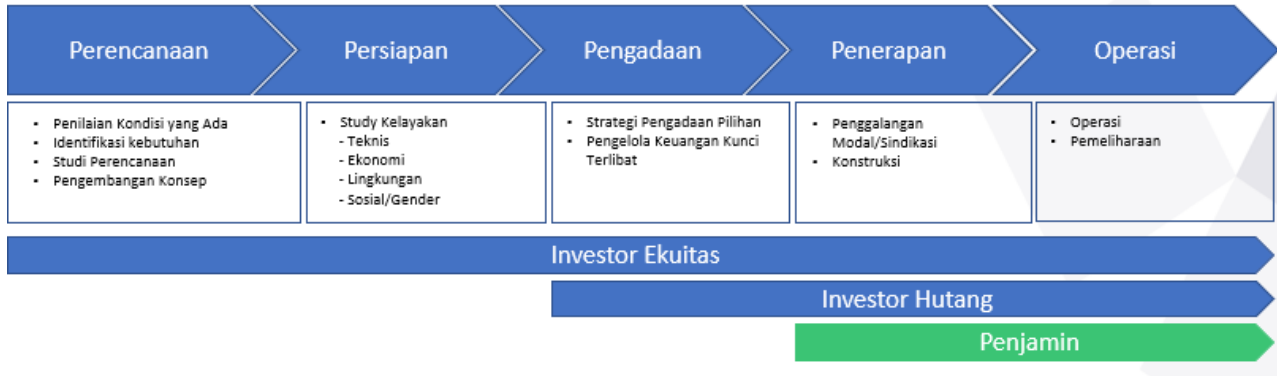
Dampak positif dan negatif Peminjam terhadap ekonomi lokal, nasional, dan internasional. Di antara lain menciptakan lapangan kerja, menghasilkan inovasi baru, membayar pajak, menciptakan kekayaan, dan dampak ekonomi lain yang dimiliki oleh Peminjam.

Gambar 1 Empat elemen utama dari TSP

Sesuai konteks di atas, GGC mengakui pentingnya pelaksanaan **praktik-praktik gender yang sehat** untuk menghindari/atau meminimalisir serta mengelola liabilitas finansial dan reputasional yang potensial. Oleh karena itu, pertimbangan tentang E&S serta faktor-faktor dan pengamanan gender merupakan bagian penting dari Kartu Skor Transaksi GGC (Lampiran Pendukung A) yang digunakan untuk memilih transaksi-transaksi yang menjamin bahwa risiko dan dampak **gender** utama telah teridentifikasi dan dikelola dengan baik selama siklus transaksi berlangsung.

Pengembangan suatu proyek yang layak dibiayai merupakan sebuah proses yang panjang, terutama jika aset infrastruktur atau intervensinya cukup besar. Sebagai penjamin, diperkirakan bahwa GGC akan diperkenalkan pada transaksi tahap selanjutnya dari pengembangan proyek, sering kali untuk membantu proyek mencapai kesepakatan keuangan dengan memberikan jaminan kredit kepada penyedia modal utang senior. Diagram di

bawah ini mengilustrasikan kondisi tersebut, dengan menunjukkan bahwa 'Penjamin' baru berperan dalam fase 'Implementasi' dan 'Operasi' siklus pelaksanaan proyek.



Gambar 2 Diagram Alur Proses

Oleh karena itu, GGC kemungkinan tidak akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi **penilaian gender** suatu proyek iklim pada tahap awal siklus perkembangan proyek. Sebaliknya, GGC cenderung mengandalkan **Proses Seleksi Transaksi (TSP) yang sehat**, yang akan meninjau dan melakukan **uji kelayakan strategis** pada dokumentasi, proses, serta sistem E&S dan gender yang dimiliki oleh Peminjam untuk menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan **Kerangka Kerja Pengelolaan Iklim, E&S, Gender** yang ditentukan GGC (**Lampiran 6**). Dengan latar belakang inilah, TSP GGC yang kuat berhasil dikembangkan dan mencakup tujuh (7) langkah strategis yang akan diikuti oleh GGC untuk menentukan apakah suatu proyek telah memenuhi **standar gender yang diprasyarkan**. Selain itu, TSP merupakan suatu **proses yang unik** yang berupaya untuk memberi informasi tentang pemilihan proyek iklim yang berdampak tanpa keterlibatan GGC sebagai pengembang proyek ataupun sponsor. Berikut ini adalah ilustrasi sederhana tentang TSP dan setiap langkahnya akan dideskripsikan setelahnya.



Gambar 3 Proses TSP

3.2.1.1 TAHAP 1: ORIGINASI TRANSAKSI (1-2 MINGGU)

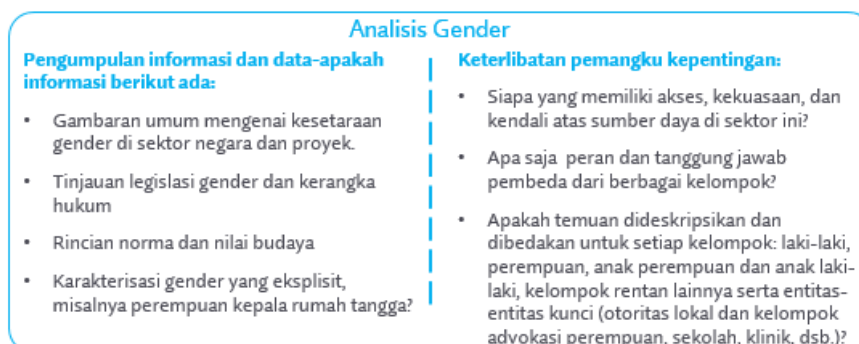
Transisi akan ditelusuri oleh Mitra Originasi GGC (seperti, MUFG, Deutsche Bank, dsb.) yang akan pernah memperoleh pelatihan dari GGC mengenai Kerangka Kerja Pengelolaan E&S, Gender, dan Iklim dan seperti apa transaksi proyek yang dapat diterima dari sudut pandang **gender**.

Pada Transaksi Asal, Mitra Asal GGC berhubungan dengan peminjam transaksi proyek untuk mengumpulkan informasi dan dokumen terbaru untuk transaksi proyek. Melihat GGC kemungkinan akan berinteraksi di dekat akhir siklus pengembangan proyek, diharapkan, setidaknya, dokumen-dokumen berikut akan tersedia untuk ditinjau lebih lanjut oleh spesialis dan komite yang diperlukan GGC, *antara lain*:

- i. Analisis Dampak Iklim (mitigasi) dan/atau Penilaian Dampak Iklim (adaptasi);
- ii. Penilaian Gender dan Rencana Aksi;**
- iii. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA); dan
- iv. Sertifikasi Obligasi Iklim dan/atau Pinjaman.

Penilaian gender dan rencana aksi harus sesuai dengan kebijakan GCF tentang pengarusutamaan gender ke dalam proyek. Penilaian gender akan mengidentifikasi beberapa masalah dan faktor utama (informasi mendasar) yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender. Langkah ini dapat terdiri dari penyelidikan primer dan sekunder, atau kombinasi keduanya. Sulit untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam berbagai proyek atau aktivitas tanpa memahami dengan jelas masalah gender yang terjadi dalam populasi target. Analisis gender akan membantu pengembang proyek untuk lebih memahami implikasi gender terhadap mitigasi, adaptasi, dan intervensi untuk mengurangi risiko bencana (dan sebaliknya) perubahan iklim, serta menyusun intervensi yang tepat dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat. Analisis ini juga akan membantu pengembang proyek untuk mengembangkan berbagai indikator untuk menilai dengan lebih baik mengenai bagaimana berbagai inisiatif tersebut diterima atau berdampak terhadap berbagai macam kelompok. Informasi utama mendasar ini akan dimasukkan ke dalam penilaian, yang mempertimbangkan:

- Apa saja yang dimaksud dengan ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan penyangkalan hak dalam setiap konteks? Bagaimana masalah tersebut beririsan dengan faktor-faktor diskriminasi lainnya, seperti usia, suku, disabilitas, kelas, dsb.?
- Bagaimana relasi gender ini akan mempengaruhi keefektifan dan keberlanjutan aktivitas proyek atau hasilnya? Bagaimana proses dan aktivitas proyek ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong kesetaraan?
- Bagaimana hasil yang diajukan mempengaruhi status relatif antara kaum perempuan dan laki-laki? Apakah mereka akan semakin mengurangi kesenjangan atau justru memperparah?



Gambar 4 Apa yang dimaksud dengan analisis gender?

3.2.1.2 TAHAP 2: SCREENING AWAL DAN KATEGORISASI (1-3 MINGGU)

Setelah Mitra Originasi melakukan suatu transaksi, ia selanjutnya akan melakukan tahap penyaringan awal menggunakan Daftar Periksa Merah, Kuning, Hijau (“RAG”). Formulir Daftar Periksa RAG ini merupakan suatu Kartu Skor Transaksi yang unik, yang menjadi telah dipatenkan sebagai aset seleksi proyek GGC.

DAFTAR PERIKSA RAG	Merah	Amber	Hijau
Dewan dan/atau manajemen senior dari pihak peminjam memiliki alur pengawasan dan pengelolaan yang jelas dan mendukung keberagaman gender dan inklusi.			
Memiliki beberapa kebijakan dan program khusus yang mendukung inklusi laki-laki dan perempuan di tempat kerja.			
Memiliki inisiatif yang mendukung, mempertahankan, dan menarik kaum perempuan untuk menempati jabatan pengambil keputusan.			
Berdasarkan data terbaru dan/atau yang telah ada, terdapat kesenjangan minimal di antara peran/tanggung jawab/fungsi/peringkat/nilai yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di angkatan kerja, meliputi staf permanen, kontrak, musiman, serta kontraktor bangunan dan staf pemeliharaan.			
Pihak peminjam memiliki sistem dan alur yang sesuai untuk mengumpulkan dan mengawasi data staf yang dipilah berdasarkan gender (misalnya gaji rata-rata, pergantian karyawan, ketidakhadiran, masa kerja/retensi, dan promosi), dan data ini digunakan untuk mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan gender.			
Pihak peminjam memiliki sumber daya inklusif atau inisiatif pengadaan untuk mendayagunakan usaha yang dimiliki oleh perempuan.			
Pihak peminjam mengumpulkan dan mengawasi data staf yang dipilah berdasarkan gender sesuai permintaan, pemanfaatan layanan, dan/atau segmentasi pelanggan			

(seperti, berkaitan dengan akses, ketersediaan, keterjangkauan, kesanggupan, dan kepuasan), serta menggunakan data ini untuk mengambil berbagai keputusan dalam perencanaan, penyusunan, pemasaran, penjualan, penentuan harga, pelayanan, dan distribusi.			
Proyek tersebut memiliki mekanisme penanganan keluhan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah dan keluhan para wanita dan anak perempuan selama masa berjalan proyek.			
Melaksanakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam jumlah yang pantas di semua tahap konsultasi dan pelatihan.			
Pihak peminjam memiliki sistem dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan laporan periodik dan tahunan tentang perkembangan indikator-indikator gender.			
Pihak peminjam telah berkomitmen akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan, peraturan, atau ranah hukum karena sangat berkaitan dengan masalah gender.			
Pihak peminjam sudah berkomitmen untuk menganggarkan dana bagi implementasi dari Penilaian Gender dan Rencana Aksi serta mobilisasi ahli gender dari luar, jika diperlukan.			
Pihak peminjam memiliki sumber daya dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Gender.			
Pihak peminjam membuat komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan korektif jika indikator gender tidak sesuai target.			

Jika jawaban untuk semua pertanyaan di atas adalah **MERAH**, maka transaksi akan ditolak dan tidak akan dilanjutkan oleh GGC. Untuk menghindari keraguan, semua proyek **GCF** yang termasuk dalam **Kategori A** tidak disertakan dalam mandat GGC dan tidak akan dilanjutkan.

Jika terdapat kekurangan informasi untuk menarik suatu kesimpulan yang jelas dan/atau ada faktor-faktor mitigasi (seperti, pihak peminjam melakukan usaha yang kredibel untuk keluar dari kategori **MERAH**), maka transaksi digolongkan sebagai **AMBER/KUNING** dan dirujuk ke Komite Eksekutif GGC. Komite akan menentukan apakah sumber daya lebih lanjut untuk uji kelayakan perlu dikerahkan untuk membantu pihak peminjam agar bisa beralih ke kategori **HIJAU**.

Jika skor transaksi jawaban semua pertanyaan dalam Daftar Periksa RAG adalah **HIJAU**, maka transaksi akan dilanjutkan ke tahap proses seleksi transaksi berikutnya, dari sudut pandang **gender**.

3.2.1.3 TAHAP 3: PENINJAUAN KEMBALI DAN PENGAJUAN KEBERATAN (1-3 MINGGU)

Sesuai dengan ulasan profesional atas informasi dan dokumentasi **gender** yang tersedia, bersama dengan diskusi dengan tim manajemen senior pihak peminjam, komponen-komponen gender dalam Kartu Skor Transaksi akan diselesaikan oleh tim investasi GGC di bawah arahan ahli **gender** internal GGC. Catatan penyeleksian digunakan untuk meringkas hasil analisis dan asumsi yang mendasari masukan-masukan mereka ke dalam Kartu Skor Transaksi.

Draf Kartu Skor Transaksi kemudian diserahkan untuk peninjauan kembali oleh Komite Dampak GGC, yang terdiri dari para ahli, di antaranya spesialis **gender** independen. Para ahli ini akan mempertanyakan kembali analisis dan tanggapan yang dibuat oleh tim investasi GGC untuk memastikan ada ketelitian yang memadai dalam pelaksanaan metode-metode penilaian, kalkulasi, dan hasil yang diperoleh. Setelah puas, Komite Dampak GGC akan menyetujui transaksi untuk dilanjutkan ke tahap uji kelayakan formal dan fase strategi remediasi.

3.2.1.4 TAHAP 4: UJI KELAYAKAN (2-5 MINGGU)

Sebagai bagian dari kriteria GGC untuk mengukur kelayakan suatu proyek agar memperoleh suatu jaminan, GGC akan melakukan uji kelayakan tingkat tinggi terhadap konsep proyek tersebut untuk menentukan apakah ada risiko-risiko besar yang berkaitan dengan gender yang dapat menimbulkan dampak negatif. Analisis kerentanan dan negara yang diuraikan di **Bagian 2 dari Lampiran ini** digunakan sebagai latar belakang ulasan ini. Yaitu, kerangka kerja gender (**Tabel 6** di bagian) akan digunakan untuk memastikan bahwa penilaian gender suatu proyek sudah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah gender mendesak dan signifikan di negara target, serta mengusulkan beberapa intervensi yang sesuai (“kapasitas untuk perubahan”) untuk mengatasinya.

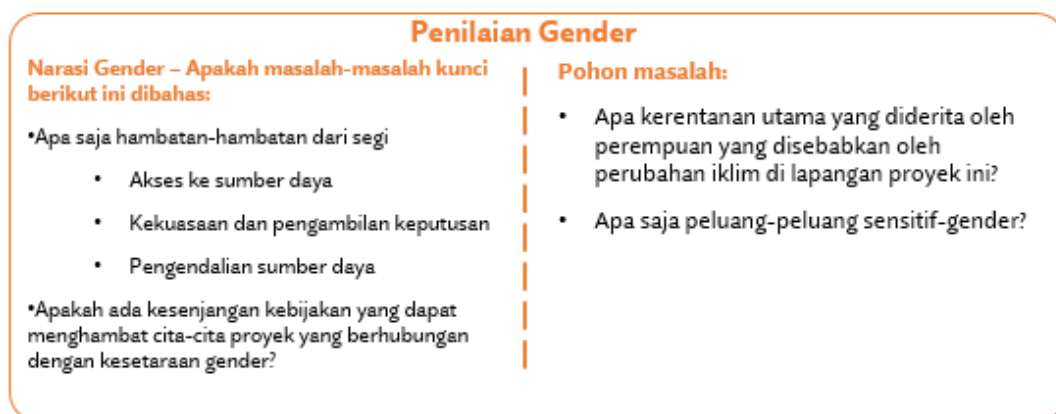
Langkah uji kelayakan ini dimulai dari pertemuan ahli gender/E&S internal GGC melibatkan konsultan gender/E&S dalam negeri untuk melakukan kunjungan lapangan bersama tim investasi GGC dan pihak peminjam. Sejalan dengan kunjungan lapangan fisik, mereka akan melakukan serangkaian wawancara secara kolektif dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan apakah informasi tentang gender yang diajukan benar-benar akurat dan sesuai dengan aspirasi dan pernyataan yang diuraikan dalam dokumen tersebut (yaitu, analisis, penilaian gender dan rencana aksi proyek). Penilaian ini juga akan digunakan untuk menentukan apakah tingkat ambisi proyek tersebut dengan dampaknya memadai, terutama dalam untuk target-target yang berkaitan dengan gender.

Dalam proses ini, tim juga akan menentukan apakah pemilik proyek telah cukup menangkap hal-hal berikut ini untuk penilaian:

- Kebutuhan dan hak-hak wanita serta populasi utama terwakili dalam penilaian ini
- Keterwakilan peserta yang komprehensif, termasuk pemerintah, masyarakat sipil dan anggota komunitas yang terpinggirkan

- Sebuah kasus investasi yang mengintegrasikan pemrograman responsif gender ke dalam proyek/program
- Anggaran yang mencukupi untuk memastikan implementasi dari tanggapan-tanggapan yang diprioritaskan yang ditujukan untuk mengatasi dimensi gender (termasuk anggaran untuk sumber daya yang ditujukan mengatasi kebutuhan dan kerentanan serta bantuan teknis ahli untuk membantu mengatasi kesenjangan yang mungkin terjadi)

Pendekatan sensitif gender dalam kebijakan dan rencana-rencana termasuk hubungan antara kekerasan berbasis gender dan intervensi yang dipresentasikan dalam proyek. Sekiranya telah ditetapkan bahwa penilaian gender proyek dan/atau rencana aksi tidak memenuhi persyaratan GGC dan GCF, spesialis gender internal akan menentukan apakah dan bagaimana kegiatan-kegiatan ini dapat dikuatkan melalui penyediaan dukungan pengembangan kapasitas yang berfokus pada gender kepada pemilik proyek (misalnya per Aksi 2, Output 4 dari Rencana Aksi Gender (Lampiran 8.1)). Hal ini memastikan bahwa pemilik proyek memperoleh dukungan dalam meningkatkan proses pengembangan proyek mereka, dengan mengoptimalkan manfaat proyek yang diperoleh perempuan dan kelompok rentan lainnya (untuk mencegah proposal ditolak atas dasar ini).



Gambar 5 Apakah yang dimaksud dengan penilaian tentang gender oleh seorang pakar?

GGC mengakui bahwa pemilihan dan hubungan yang dibangun dengan konsultan spesialis **E&S/gender** dalam negeri adalah elemen yang penting dari **proses penjaminan internal** GGC. Konsultan spesialis **E&S/gender** dalam negeri juga akan membantu GGC dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi ad hoc (M&E) dari proyek transaksi terpilih, setelah penutupan pembiayaan, dan juga bekerja dengan seorang peminjam untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Hasil dari langkah uji kelayakan akan berupa Kartu Skor Transaksi terbaru dan laporan transaksi DD terperinci dari tim investasi, disediakan oleh konsultan spesialis **E&S/gender** dalam negeri. Laporan tersebut memberikan bukti-bukti untuk memvalidasi berbagai pemeriksaan transaksi, analisis, dan asumsi-asumsi dasar yang sudah dibuat. Sebagai tambahan, tim akan menilai apakah pemilik proyek mempunyai sumber daya material, keuangan dan anggaran manusia untuk implementasi rencana aksi proyek gender dan

penilaiannya. Implementasi dari anggaran harus realistis dan akurat dalam kaitannya pada kebutuhan proyek. Yang terpenting, laporan tersebut juga mendeskripsikan setiap celah dan/atau penyimpangan bermakna yang ditemukan selama tahap uji kelayakan, yang perlu ditangani oleh pihak peminjam.

3.2.1.5 TAHAP 5: REMEDIASI DAN PEMAPARAN (2-5 MINGGU)

Langkah remediasi dan pemaparan sejalan dengan tahap uji kelayakan, ditarik langsung dari rincian laporan transaksi DD. Di mana terdapat kesenjangan dan/atau penyimpangan, tim investasi GGC di bawah panduan Spesialis **E&S/gender** GGC akan bekerja dengan konsultan spesialis **E&S/gender** dalam negeri untuk membantu peminjam membangun strategi remediasi untuk mengatasi kesenjangan/penyimpangan.

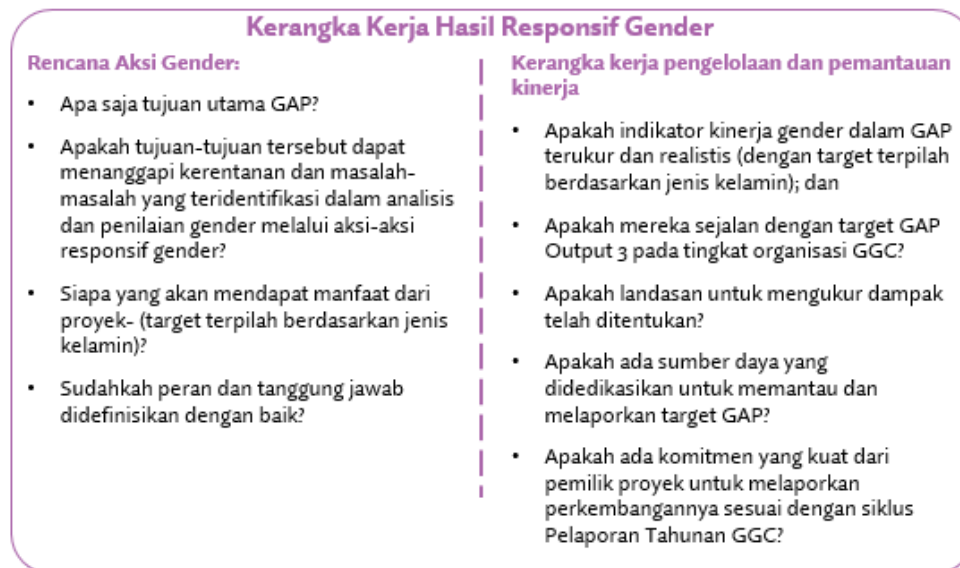
Setelah **strategi remediasi dan rencana aksi (termasuk anggaran implementasi)** telah dikembangkan, peminjam diharuskan untuk berkomitmen untuk menjalankan strategi, dalam batas waktu yang telah disetujui sebelumnya. **GGC akan meminta kepada pemilik proyek untuk mengembangkan Rencana Aksi Gender tingkat proyek, menggunakan kerangka yang disediakan oleh GGC (sejalan dengan panduan dari GCF untuk struktur GAP ini) dan dipandu oleh daftar pertanyaan dari Hasil Kerangka Kerja Gender Responsif di bawah** . GGC akan juga meminta komitmen dari pemilik proyek untuk melaporkan target dan indikator yang ditetapkan di dalam GAP, pada titik pencapaian yang disetujui. Ketika peminjam tidak mau berkomitmen atau menyatakan keengganan yang jelas dalam mengembangkan dan/atau menjalankan strategi remediasi atau aksi, transaksi akan ditolak oleh tim investasi GGC.

Untuk kemajuan, strategi remediasi dan aksi harus disampaikan hingga mendapat kepuasan dari spesialis **E&S/gender** internal GGC, sejalan dengan komitmen yang kuat oleh peminjam untuk menjalankan strategi tersebut. Hal ini kemudian akan diajukan dengan Kartu Skor Transaksi terbaru, laporan transaksi yang terperinci, dan sebuah strategi M&E (lihat langkah 6) untuk pertimbangan Komite Dampak GGC.

3.2.1.6 TAHAP 6: STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI (2-5 MINGGU)

Langkah Strategi M&E dilakukan sejalan dengan langkah remediasi. Strategi M&E dikembangkan oleh tim investasi GGC bersama dengan konsultan ahli dalam negeri GGC dan pihak peminjam. Strategi M&E terhubung secara langsung dengan Teori Perubahan GGC seperti yang telah disetujui oleh GCF. Setiap kegiatan, keluaran, hasil dan tujuan akhir akan diuraikan dalam Strategi M&E dengan aksi yang jelas mengenai bagaimana dan oleh siapa, data dan informasi dikumpulkan, dinilai, dan dilaporkan, sehubungan dengan elemen transaksi.

Strategi M&E harus mendapatkan komitmen yang jelas dari peminjam, sebelum diajukan bersama dengan Kartu Skor Transaksi, laporan transaksi DD yang terperinci, dan strategi remediasi, untuk pertimbangan Komite Dampak GGC. Seperti strategi remediasi, ketika peminjam tidak berkomitmen atau menyatakan keengganan yang jelas kepada mengembangkan dan/atau menjalankan Strategi M&E, transaksi akan ditolak oleh tim investasi GGC sebelum diajukan kepada Komite Dampak GGC untuk dipertimbangkan.



Gambar 6 Apa yang dimaksud dengan kerangka kerja hasil responsif gender

3.2.1.7 TAHAP 7: PERSETUJUAN (1-2 MINGGU)

Komite Dampak GGC, yang terdiri dari spesialis independen, akan meninjau ulang Kartu Skor Transaksi terbaru, laporan transaksi DD yang terperinci, strategi remediasi dan aksi gender (sebuah implementasi anggaran), dan Strategi M&E yang sudah disediakan oleh tim investasi GGC. Setelah puas bahwa transaksi tersebut sesuai dengan **Kerangka Kerja** GGC, Komite Dampak akan diminta persetujuannya agar transaksi dapat dilanjutkan untuk penentuan penerbitan garansi.

Tetapi, apabila Komite Dampak GGC memiliki kekhawatiran tersisa mengenai elemen transaksi dari **E&S atau gender**, maka tim investasi GGC diminta kembali ke Langkah 5 (Remediasi dan Pengungkapan) dan bekerja sama dengan peminjam untuk menangani kekhawatiran Komite Dampak GGC.

Setelah Komite Dampak GGC menyetujui transaksi, transaksi tersebut akan dilanjutkan ke Komite Investasi GGC yang akan membahas aspek material, keuangan dan komersial dari transaksi tersebut. Yang terpenting, Komite Investasi hanya akan menyetujui transaksi yang telah disetujui terlebih dahulu oleh Komite Dampak. Hal ini memastikan semua transaksi potensial memiliki **tujuan** iklim yang jelas, dan memprioritaskan **manusia** dan **planet**, **sebelum mempertimbangkan keuntungan. Dikarenakan hal tersebut, elemen persetujuan transaksi ‘tujuan, manusia dan planet’ menjadi prasyarat untuk keuntungan.**

Jika Komite Investasi GGC sudah merasa nyaman dengan aspek keuangan dan komersial dari transaksi tersebut, Komite akan mengeluarkan persetujuan formal untuk memberikan jaminan atas nama peminjam.

3.2.1.8 GARIS PERTAHANAN MULTIDISIPLIN

Dikarenakan itu, GGC menggunakan ‘garis pertahanan’ multidisiplin dalam TSP di atas untuk mengurangi risiko terpapar pada risiko **gender** pada transaksi-transaksi yang dipilihnya untuk digaransi. Garis pertahanan ini adalah spesialis profesional dalam bidang iklim, gender, lingkungan dan ilmu sosial, dan sertifikasi obligasi

iklim. Yang terpenting, GGC akan bekerja sama dengan GCF dalam penunjukan spesialis ini. Dalam istilah dari elemen **Gender/Manajemen E&S**, garis pertahanan adalah sebagai berikut:

Gambar 7 Spesialis

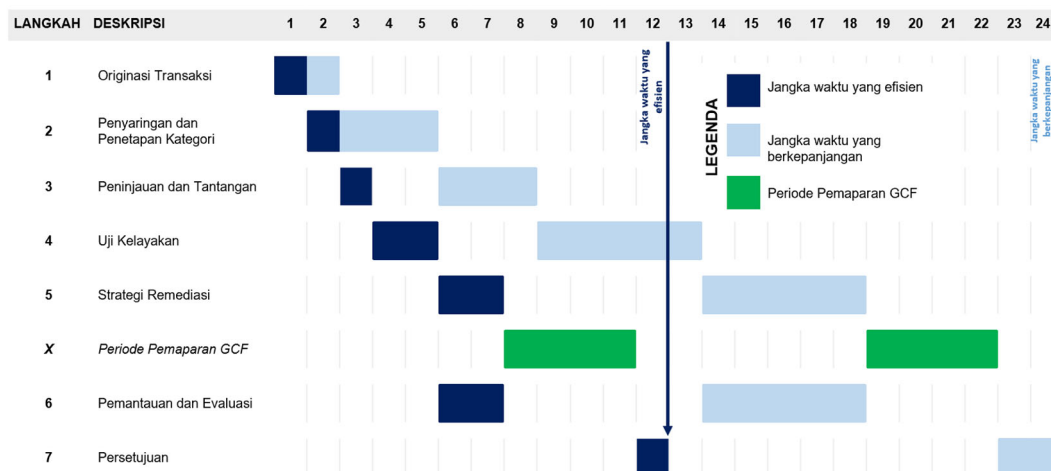
Spesialis Internal Gender/E&S	Spesialis E&S internal diharapkan merupakan karyawan tingkat menengah hingga senior dengan pengalaman kerja setidaknya 10 tahun di bidang E&S dengan fokus pada pasar negara berkembang.
Spesialis Komite Dampak Gender/E&S	Spesialis E&S Komite Dampak diharapkan merupakan karyawan tingkat senior dengan pengalaman kerja setidaknya 15 tahun di bidang E&S dengan fokus pada pasar berkembang.
Konsultan Gender/E&S Dalam Negeri	Konsultan E&S dalam negeri diharapkan merupakan perusahaan konsultan E&S lokal atau regional terkemuka yang memiliki rekam jejak yang kredibel dengan pengalaman setidaknya 5 tahun bekerja dengan menerapkan Standar Kinerja IFC.

Yang terpenting, spesialis internal E&S dan Spesialis Komite Dampak, keduanya memiliki sebuah “portofolio” level pandangan mengenai proyek yang didukung melalui penyediaan garansi. Hal ini mengizinkan terjadinya penyilangan dari praktik terbaik/intervensi inovatif berfokus pada gender yang dapat terbukti efektif untuk sektor dan konteks yang berbeda dan yang mana akan dapat diperkenalkan kepada proyek lainnya pada saat mereka memasuki jalur GGC. Konsultan-konsultan dalam negeri juga melengkapi hal ini dengan menyediakan keahlian dari bawah ke atas di lapangan yang sangat penting untuk memastikan semua solusi sesuai dan tepat guna.

Sebagai tambahan hal di atas, semua anggota tim investasi GGC akan diberikan pelatihan **Manajemen E&S/Gender** secara rutin untuk memastikan adanya pemahaman penuh terhadap persyaratan dari Tim **Manajemen E&S/Gender GSS** dan juga akan diajari keahlian untuk menentukan kompetensi utama dari seorang peminjam agar mampu untuk memenuhi persyaratan multidisiplin ini.

3.2.1.9 PROYEKSI KERANGKA WATU TSP

Diperkirakan, dari pengalaman tim yang diperoleh dari pengalaman serupa milik inisiatif dan organisasi penjamin global (misal GuarantCo), Proses Seleksi Transaksi akan membutuhkan waktu di antara 12 – 24 minggu (atau 3 – 6 bulan). Ilustrasi kerangka waktu di bawah ini menunjukkan bahwa ‘kerangka waktu yang efisien’ dapat membutuhkan waktu 12 minggu, di mana ‘kerangka waktu yang tertunda-tunda’ dapat membutuhkan waktu (dan berpotensi lebih lama dari) 24 minggu.



Gambar 8 Diagram arus TSP

3.3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (IMPLEMENTASI)

GGC pada akhirnya bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan kepada para investor (misalnya ke GCF) tentang kemajuan yang dibuat pada rencana pemantauan dan evaluasi. Tugas ini akan didukung oleh AE yang akan mengajukan laporan agregat kepada pemangku kepentingan yang terkait GGC juga akan bertanggung jawab untuk mengelola desain sistem, eksekusi, dan pemantauan dari platform pelaporan sedangkan pemilik proyek atau peminjam akan bertanggung jawab untuk berkontribusi kepada hasil yang diharapkan dan menyampaikan hasil yang dicapai kepada GGC untuk tinjauan ulang mereka. Untuk memastikan bahwa setiap indikator atau target agenda iklim sosial dan ekonomi dilaporkan secara memadai dan adil, Tim Penasihat Iklim akan ditunjuk untuk membantu memastikan bahwa hasil yang diperkirakan dan dianalisis realistis dan dapat diterjemahkan sebelum para investor seperti Dana Iklim Hijau menerima data tersebut.

Tim Penasihat Iklim juga akan membantu dalam mengumpulkan data mendasar di tingkat negara untuk memastikan bahwa negara penerima merancang proyek yang relevan dengan negara mereka. Tim akan mengandalkan kemitraan pada jaringan yang terbentuk tetapi juga pada dokumentasi resmi dan penelitian. Sebagai tambahan, peninjau pihak ketiga juga akan ditunjuk untuk memverifikasi hasil agregat dalam laporan yang disampaikan kepada para investor. Peminjam akan diharapkan, selama setiap periode pelaporan, untuk memperhitungkan target hasil yang ditunjukkan dalam rencana kerangka kerja logis/M&E mereka. Hal ini dimaksudkan agar pada waktunya, seluruh aplikasi yang disampaikan secara daring melalui platform digital yang dibuat oleh GGC yang akan berfungsi membantu mengumpulkan data yang relevan dan menggabungkannya, menghasilkan proses pendekatan data yang lebih sederhana dalam melaporkan aplikasi kepada berbagai investor.

Peminjam akan ditugaskan untuk merancang protokol pengumpulan data lengkap untuk proyek mereka pada saat persetujuan. Hal ini memastikan bahwa mereka telah mengumpulkan sumber data yang memadai, menggabungkan jadwal dan menetapkan sistem yang memastikan bahwa data akan tersedia selama siklus

pelaporan triwulanan dan tahunan. Peminjam juga akan didorong untuk mempertimbangkan data yang mereka perlukan untuk melengkapi laporan secara memadai dan kuat. Kapan pun memungkinkan, semua indikator akan dipilah berdasarkan jenis kelamin dan sub populasi berdasarkan sub kategori. Sebagai tambahan, data mengenai kemajuan untuk memenuhi berbagai indikator akan dikumpulkan di tingkat lapangan selama lokakarya yang diselenggarakan di berbagai negara setiap kuartal di mana para partisipan akan didorong untuk membagikan tantangan dan pengalaman dalam pelajaran yang mereka dapat untuk menentukan dampak dari program tersebut.

Kerangka kerja pemantauan dan evaluasi GGC dirancang untuk mencakup target dan indikator responsif gender (sebagai contoh yang merujuk kepada investasi keberlanjutan yang terkait gender) yang memantau hasil kesetaraan gender terhadap dasar yang telah terbentuk. Pelacakan dan pelaporan hasil proyek terkait gender (misal dampak spesifik gender per proyek, dan juga yang membahas tentang manfaat tambahan terkait penggabungan lensa gender ke dalam desain proyek) akan digunakan untuk mempengaruhi dan menginformasikan desain dari intervensi masa depan, dan juga menarik minat dari intervensi hijau prospektif baru dengan fokus kepada target terkait gender.

M&E terjadi pada setiap tingkatan proyek, dari peluang awal, desain proyek, tinjauan awal desain, implementasi dan tinjauan kinerja berjalan.

3.4 DESAIN PROYEK YANG RESPONSIF GENDER

Memasukkan pertimbangan gender di dalam desain obligasi hijau secara signifikan meningkatkan skala pembiayaan yang tersedia untuk memajukan kesetaraan gender: pada tahun 2020 **USD 1 triliun** diinvestasikan ke dalam **obligasi hijau dan investasi utang keuangan hijau lainnya**; sebagai perbandingan, pada akhir tahun 2020 ada sekitar **USD 18 Miliar** dalam bentuk aset yang dikelola oleh **kendaraan investasi lensa gender** (GenderSmart 2021). Sementara investasi pada isu gender yang secara khusus bertumbuh, kapitalisasi pada investasi yang telah ada dalam inisiatif iklim melalui penggabungan lensa gender kepada obligasi hijau menyediakan kesempatan untuk secara **signifikan meningkatkan pendanaan yang didedikasikan kepada kesetaraan gender**, secara khusus memberikan **persimpangan antara tantangan antara gender dan iklim**. Ketika lensa gender tergabung ke dalam desain obligasi hijau yang digaransi, potensi manfaat akan terbagi menjadi dua kategori:

1. *Manfaat dari penyertaan wanita di perencanaan proyek dan proses implementasi*

Ketika wanita diberikan posisi yang bertanggung jawab dalam proyek, mereka akan memperoleh pengalaman dalam keterlibatan di kehidupan politik dan publik. Hal ini akan menyediakan platform untuk **pemberdayaan politik yang lebih luas** bagi wanita dengan memfasilitasi pencapaian peluang yang serupa di luar konteks proyek, dan dengan membawa wanita ke dalam sektor ini dalam jangka panjang. Kedua, keterlibatan wanita **secara positif berkorelasi dengan manfaat gender** dari proyek tersebut (GenderSmart 2021).

2. Manfaat dari proyek itu sendiri

Menyertakan pertimbangan gender ke dalam proyek itu sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa proyek ini akan memajukan kesetaraan gender dan manfaat kepada wanita setidaknya secara setara dikarenakan **wanita memiliki preferensi berbeda dibandingkan pria**, dibentuk oleh ekonomi, status sosial, peran dan kebutuhan mereka secara khusus. Manfaat spesifik proyek akan bervariasi tergantung pada sektor proyek, meskipun ada beberapa keuntungan yang berlaku lintas sektor. Hal ini termasuk memastikan wanita paling tidak memiliki akses yang setara untuk pekerjaan, kesempatan pelatihan, pembiayaan dan/atau aset produktif yang disediakan oleh proyek (GenderSmart 2021).

Terlepas dari manfaatnya, ada sejumlah tantangan yang menghadirkan hambatan untuk menggabungkan manfaat gender kepada obligasi hijau:

- **Kurangnya data** – ketersediaan data dasar yang dipilah berdasarkan jenis kelamin rendah, terutama data longitudinal, membuat menjadi sulit melakukan analisis gender pra-proyek dan untuk mengukur dampak proyek (GenderSmart 2021).
- **Kurangnya kemampuan pemodelan prediktif** – kurangnya data historis membuat sulit untuk memprediksi dampak gender dari intervensi responsif gender dan oleh karena itu juga untuk mendesain proyek yang efektif (GenderSmart 2021).
- **Menetapkan tolok ukur** – tidak adanya metodologi yang telah ditemukan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi harapan kinerja gender (misal apakah proyek perlu untuk memiliki kinerja yang baik di semua kriteria atau hanya satu?) (IISD 2021).
- **Mengukur dampak** – Peningkatan kesetaraan gender dapat menjadi sulit untuk diukur dan hanya dapat direalisasikan setelah proyek berakhir (GenderSmart 2021).
- **Biaya yang lebih tinggi** – biaya transaksi akan meningkat dikarenakan kebutuhan untuk menyiapkan rencana aksi gender, mengumpulkan data jenis kelamin terpilah, dan laporan pada dampak proyek berdasarkan gender (IISD 2021).
- **Kurangnya perasaan urgen** – beberapa investor mungkin enggan untuk menggabungkan inisiatif spesifik gender pada saat mereka melihat penanganan perubahan iklim sebagai prioritas yang lebih tinggi dan/atau tidak sepenuhnya menghargai hubungan gender-lingkungan (UNDP 2019).
- **Hambatan terhadap partisipasi wanita** - wanita mungkin tidak mendapat manfaat yang sama dari proyek dikarenakan adanya ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, tingkat pendidikan yang lebih rendah dan lebih tingginya beban perawatan mungkin membatasi kemampuan mereka untuk mengamankan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi yang dihasilkan oleh proyek (GenderSmart 2021).

Berdasarkan penilaian di atas, GGC akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa persyaratan responsif gender berikut akan terintegrasikan kepada desain proyek dari proyek yang prospektif (setidaknya):

- Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan penggunaan indikator gender untuk menginformasikan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembelajaran responsif gender sudah termasuk.
- Analisis gender harus mempertimbangkan isu-isu tentang interseksionalitas, untuk memahami bahwa kerentanan kelompok terpinggirkan bertambah berdasarkan berbagai faktor (seperti disabilitas, usia, status masyarakat pribumi dan lainnya). Jika memungkinkan, data pada sub kelompok ini seharusnya dikumpulkan dan digunakan untuk mengembangkan tanggapan dari proyek tertarget yang merujuk kepada berbagai kebutuhan dari anggota terpinggirkan penerima manfaat.
- Penilaian gender dilakukan dengan menginformasikan desain proyek, penganggaran, staf, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
- Menganalisis risiko yang mungkin akan dialami atau dihadapi oleh proyek, menerapkan pengukuran-pengukuran untuk memastikan kegiatan-kegiatan tidak memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada, termasuk Eksploitasi Seksual, Perilaku Menyimpang, dan Pelecehan Seksual (SEAH), kekerasan berdasarkan gender, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi kesenjangan gender dan mendukung pemberdayaan wanita.
- Sumber daya yang cukup dialokasikan untuk aktivitas khusus, dukungan teknis dan/atau aksi lainnya untuk meningkatkan pertimbangan kesetaraan gender, termasuk keterlibatan yang berarti dari berbagai pemangku kepentingan dan penerima manfaat.
- Rencana aksi harus menetapkan target populasi baik secara langsung (misal karyawan yang dibiayai oleh perusahaan) atau tidak langsung (misal wanita yang di dalam populasi yang lebih luas terdampak oleh proyek). Di mana tidak ada rencana aksi, pendanaan untuk kegiatan responsif gender seharusnya dibatasi dan/atau target eksplisit harus ditetapkan (AMMC 2021).
- Indikator kinerja gender yang diidentifikasi di dalam rencana aksi gender harus, sekali lagi, sensitif kepada sektor proyek dan lokasi.
- Pertimbangan gender juga harus menginformasikan pemilihan instrumen keuangan untuk investasi sementara dari dana yang didapatkan dari obligasi hijau. Sebagai contoh, peringkat kinerja gender di sebuah perusahaan (untuk investasi dalam layanan perusahaan) atau nilai kesetaraan gender sebuah negara (untuk investasi pada lembaga sekuritas negara) dapat menjadi faktor untuk pengambilan keputusan (Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021). Tetapi pendekatan yang lebih lunak mungkin dibutuhkan untuk mengintegrasikan pertimbangan gender pada pengelolaan hasil dibandingkan kepada penggunaan hasil, mengingat kebutuhan untuk memilih instrumen keuangan yang memungkinkan dana agar dapat diakses dengan cepat. Jika pilihan dibatasi secara signifikan, sebuah komitmen untuk memprioritaskan kesempatan investasi dengan kinerja gender di atas rata-rata yang memungkinkan mungkin cukup (Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021).
- Penerbit harus melaporkan kedua kriteria gender yang digunakan untuk memilih proyek dan dampak gender yang sebenarnya. Pelaporan harus dilaksanakan paling sedikit setiap satu tahun dan harus dapat diverifikasi oleh pihak ketiga (AMMC 2021). Pelaporan reguler harus mengizinkan implementasi

langkah-langkah mitigasi jika target yang digariskan di dalam rencana aksi gender tidak terpenuhi (Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021).

3.5 MEKANISME PENGADUAN DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

3.5.1 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah bagian yang penting dari Kerangka Kerja untuk memfasilitasi integrasi dari pertimbangan gender ke dalam siklus hidup pembiayaan dan pengambilan keputusan GGC. Dalam konteks ini, keterlibatan pemangku kepentingan menunjukkan dialog berkelanjutan yang proaktif, pembagian informasi dan interaksi di antara GGC dengan para pemangku kepentingannya seperti organisasi yang dipimpin wanita. Oleh karena itu, GGC berkomitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan mekanisme efektif keterlibatan pemangku kepentingan (secara internal dan eksternal dan seperti yang tercantum dalam lampiran 7) untuk mendukung budaya transparan dan bertanggung jawab serta pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Sebagai contoh, mengimplementasikan interaksi lintas tim secara reguler, rapat fungsi dan presentasi mengenai topik gender dan topik E&S, komunikasi internal langsung melalui surat elektronik, buletin, dan lainnya.

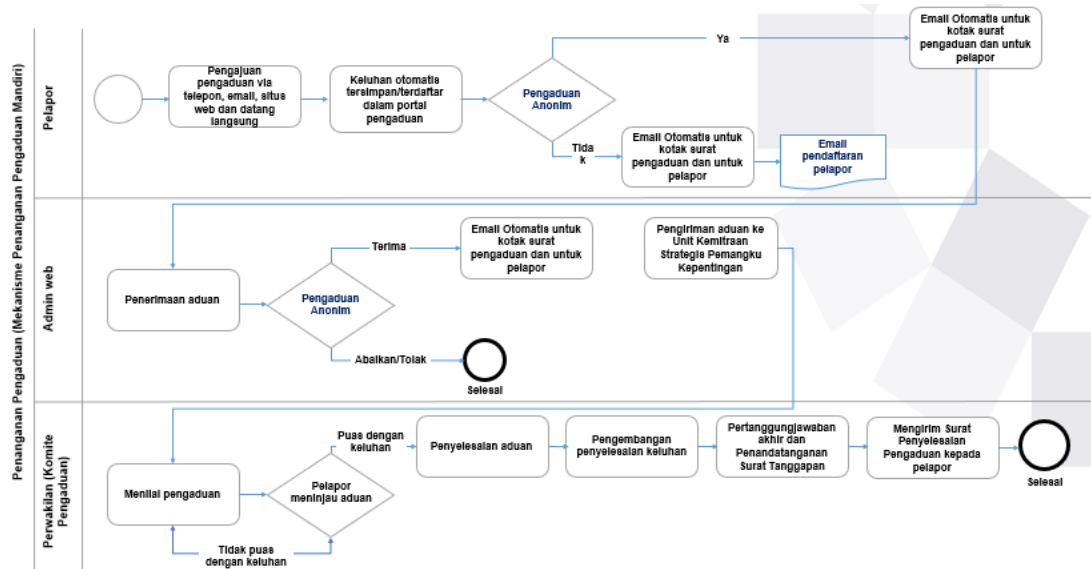
3.5.2 MEKANISME PENGADUAN

Terkait mekanisme komunikasi eksternal, mekanisme penting yang akan diimplementasikan dan dipertahankan adalah mekanisme pengaduan. Ini akan membantu proses untuk secara efektif mengidentifikasi, menerima, mendaftarkan, menyaring dan mengevaluasi, melacak dan secara formal menindaklanjuti keluhan atau masukan dari para pemangku kepentingan sehubungan dengan aktivitas sub proyek. Mekanisme tersebut akan memfasilitasi penyelesaian keluhan dengan segera melalui proses yang dapat diakses, adil, transparan dan konstruktif. Mekanisme tersebut juga akan sesuai dengan budaya dan mudah diakses, tanpa biaya bagi masyarakat yang terkena dampak, dan tanpa retribusi kepada individu, kelompok, atau komunitas yang mengajukan masalah atau kekhawatiran. Mekanisme pengaduan akan terdiri dari tetapi tidak terbatas elemen-elemen berikut:

- **Pemohon akan memerlukan mekanisme penanganan keluhan yang mapan dan operasional, dapat diakses dan inklusif, berpusat pada penyintas, relevan dengan SEAH dan responsif gender, yang:**
 - Termasuk memperlakukan penyintas dengan penghargaan dan hormat, meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka dan tidak buru-buru mengambil tindakan.
 - memperlakukan semua penyintas dengan sama dan tanpa menghakimi, memastikan pengalaman mereka tidak terabaikan secara tidak adil, misalnya, karena mereka masih muda, sudah tua, cacat, berjenis kelamin minoritas, atau bekerja di dunia prostitusi.
 - Termasuk panduan pemangku kepentingan untuk mengenali SEAH setempat yang sudah ada dan berpotensi untuk memungkinkan penanganan masalah yang efektif.

- Melatih personel yang relevan sesuai dengan permintaan SEAH yang relevan untuk pencatatan dan penindakan keluhan.
 - Membuka konsultasi dengan para pemimpin wanita dan mereka yang bekerja dengan remaja perempuan dan laki-laki dan kelompok berisiko lainnya harus diprioritaskan untuk memungkinkan pemahaman tentang risiko dan tren SEA/SH di dalam masyarakat.
 - Menyediakan kode etik yang detail untuk memandu keterlibatan.
 - Mengawasi indikator SEAH dan GBV untuk melacak kemungkinan risiko atau tantangan.
 - Menawarkan berbagai metode pengajuan keluhan termasuk secara online, email, surat atau secara langsung.
 - Menyediakan kerahasiaan identitas bagi orang yang mengajukan keluhan atau perwakilan jika diminta.
 - Menangani keluhan dengan segera dan secara efektif, tanpa biaya dan pungutan.
 - Menangani keluhan dengan cara yang sesuai dengan budaya, rahasia, objektif, transparan, sensitif dan responsif.
- Berbagai macam cara bagi orang-orang yang rentan untuk dapat menyampaikan pengaduan mereka, dan dengan memperhatikan hambatan/batasan bahasa dan perlunya anonimitas jika pelapor khawatir akan pembalasan atau penyampaian oleh perwakilan resmi atau organisasi masyarakat sipil;
 - Ketentuan untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama dalam kasus di mana pelapor takut akan pembalasan;
 - Penyediaan interpretasi/terjemahan untuk mengatasi hambatan/batasan bahasa;
 - Sebuah buku catatan di mana pengaduan terdaftar secara tertulis dan dipelihara sebagai basis data yang tersedia untuk umum. Basis data ini haruslah termasuk informasi tentang keluhan dan penyelesaian keluhan tersebut, termasuk pemulihan yang diberikan, dengan mempertimbangkan bahwa identitas pelapor dapat dirahasiakan jika diminta. Basis data ini juga harus dibagikan bersama dengan Mekanisme Ganti Rugi independen GCF;
 - Mengiklankan prosedur secara publik, mengidentifikasi cara untuk menyampaikan keluhan, menetapkan durasi waktu yang dapat diekspektasikan oleh pengguna sebelum mendapat pengakuan, tanggapan, dan penyelesaian keluhan mereka, deskripsi mengenai transparansi prosedur, dan struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan;
 - Proses banding di mana keluhan yang tidak terpuaskan dapat dirujuk ketika penyelesaian keluhan belum tercapai;
 - Informasi tentang mekanisme pengaduan lain yang tersedia, termasuk Mekanisme Ganti Rugi independen GCF dan pelaksanaan mekanisme pengaduan entitas yang terakreditasi; dan

- Langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk melindungi pelapor dari pembalasan.



Gambar 9 Contoh Mekanisme Pengaduan

Tanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan mekanisme pengaduan akan terletak pada pemilik proyek atau sponsor. Pemilik proyek akan bertanggung jawab untuk bertemu dengan pemangku kepentingan setempat yang terdampak oleh proyek tersebut untuk menjelaskan dan mendiskusikan berbagai mekanisme dan proses pelaporan yang disepakati oleh para pemangku kepentingan tentang metode yang dipilih yang paling tepat. Detail pembahasan akan dicatat dan disertakan dalam ringkasan pertemuan para pemangku kepentingan. Telepon dan alamat email pusat akan disediakan yang akan memfasilitasi pengaduan dan memastikan bahwa pengaduan tersebut dibagikan oleh orang yang tepat yang mengawasi masalah yang dimaksud. Telepon dan email yang diterima akan dirahasiakan. Pemilik proyek akan diharuskan untuk menyimpan catatan yang memuat:

1. Tanggal pengaduan
2. Nama pihak yang dirugikan dan afiliasi/organisasi
3. Rincian kontak dari pihak yang dirugikan
4. Kategori dari keluhan (Lingkungan, sosial, pemerintah, lainnya)
5. Jika keluhan merupakan banding dari hasil penanganan keluhan sebelumnya
6. Investigasi yang direkomendasikan untuk permasalahan tersebut
7. Tanggal penyelesaian dan informasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan
8. Mencatat hasil dari investigasi dalam bentuk dokumen Excel, termasuk juga ringkasan dari aksi yang telah diambil atau alasan untuk tidak diambilnya aksi dan tanggal dari respons kepada pihak yang dirugikan

Pemilik proyek akan mengakui keluhan secara tertulis pada waktu yang tepat dan melaporkan kembali ke AE tentang langkah selanjutnya. Investigasi keluhan dapat bervariasi tergantung pada sifat keluhan, tetapi setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa keluhan ditangani dengan segera. Sebagian besar investigasi tidak boleh berlangsung lebih dari 90 hari. Isi pengaduan yang didaftarkan dan pengelolaannya harus menghormati kerahasiaan pihak yang dirugikan sejauh mungkin, dan tidak boleh ada pembalasan terhadap pihak yang dirugikan atau pengadu. Dalam beberapa kasus, dapat lebih baik bagi pemilik proyek untuk terus melibatkan pihak yang dirugikan selama penyelidikan dari pengaduan. Hal ini dapat terjadi dengan mengundang pihak yang dirugikan ke pertemuan, panggilan konferensi, atau berkomitmen lebih banyak secara tertulis. Setiap keterlibatan berkelanjutan dengan pihak yang dirugikan harus dicatat dalam daftar pengaduan

3.5.3 KONDISI-KONDISI KHUSUS

Pemilik proyek akan diminta untuk menyaring proyek mereka untuk penentuan risiko SEAH dan harus mempertimbangkan pertanyaan berikut sebelum merancang GRM:

- Apakah tingkat kekerasan berbasis gender (GBV) di tingkat negara lebih tinggi dari rata-rata regional?
- Apakah ada norma sosial budaya yang berlaku yang memarginalkan perempuan atau membatasi partisipasi mereka di ruang publik dan ruang privat?
- Apakah proyek akan berlangsung di lingkungan yang rentan atau terkena dampak konflik?

Penilaian risiko akan kemungkinan konsekuensi SEAH selama proses uji kelayakan tersebut sangatlah penting. AE juga harus memastikan bahwa proyek memiliki keahlian dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengelola risiko ini.

3.6 SUMBER YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK PEMILIK PROYEK

Untuk membantu memandu pemilik proyek dalam Analisis Gender dan pengembangan Indikator Gender, mereka dapat mempertimbangkan sumber berikut:

- Mengarusutamakan Gender dalam Proyek Dana Iklim Hijau (2017) Dana Iklim Hijau dan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Ringkasan Metodologi UN-REDD mengenai Gender (2017) Seri Sumber Teknis
- Situs web PPP Bank Dunia dengan sumber daya yang dikumpulkan di sektor-sektor berikut: Pertanian, Pendidikan, Energi, Kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Transportasi, Air dan Sanitasi. Lihat: <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-sector/genderimpacts-ppps/sector-specific-materials/sector-specific-materials>
- Asian Development Bank (2013) Perangkat Kerja untuk Hasil dan Indikator Kesetaraan Gender <https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-equality-resultsand-indicators>
- Portal Data Gender untuk data terkini berdasarkan jenis kelamin dan statistik gender yang mencakup demografi, pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, kehidupan publik dan pengambilan keputusan, dan agensi, lihat <http://datatopics.worldbank.org/gender/>
- Alat GACC lihat <http://cleancookstoves.org/resources/490.html>
- ACIDI/VOCA- Manual & Kotak Alat Analisis, Penilaian, dan Audit Gender
- Harvard- Kerangka Kerja Peran Gender atau Kerangka Kerja Analisis Gender
- FAO- Buku Pegangan Lapangan Sosio-Ekonomi dan Analisis Gender
- Analisis Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam | Analisis Gender Portal Tanah untuk Penghidupan yang Berkelanjutan dan Pemerintahan yang Partisipatif di Rwanda

4 Referensi

- Abdullar dkk. 2020. "Laporan Alternatif Masyarakat Sipil mengenai CEDAW Pakistan"
<https://www.af.org.pk/Reports/Civil Society Alternative Report on CEDAW Pakistan 2020.pdf>,
 Pakistan.
- Afrobarometer. 2018. Kesetaraan gender di Tanzania: Kegemparan dan Kemajuan yang telah dirasakan."
- AMMC. 2021. *Pedoman Obligasi Gender*.
<https://www.ammc.ma/sites/default/files/AMMC%20Gender%20Bonds%20Guidelines.pdf>.
- Bayudan-Dacuycuy, Connie. 2019. *Memeriksa rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Filipina: Apakah pekerjaan rumah mata rantai yang hilang?* Quezon City: Philippine Institute for Development Studies .
- Cagatay. 1998. "Gender dan Kemiskinan. Kertas Kerja UNDP. Divisi Pembangunan Sosial dan Penanganan Kemiskinan."
- Cascais, Antonio. 2019. "Rwanda – kesetaraan yang nyata atau *gender-washing*?" *DW*. Diakses pada 10 Maret 2022. <https://www.dw.com/en/rwanda-real-equality-or-gender-washing/a-47804771>.
- Centre for Gender and Disaster. 2021. *Gender dan Bencana: Bibliografi dan Panduan Referensi - Volume 1 - Edisi ke-2*. https://www.gdnonline.org/_files/ugd/3a710f_156b01617a1d4d9798c6e6c939f39361.pdf.
- Chan dkk. 2016. "Status dari perempuan dan kesetaraan gender di Tanzania: konteks kebijakan yang luas."
- Chiwona-Karlton dkk. 2017. "Apa bukti bahwa gender memengaruhi akses dan penggunaan hutan untuk ketahanan pangan? Sebuah peta sistematis dari protokol."
- CIF. 2017. "Gender dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Titik Masuk bagi Desain dan Implementas"
- CJ Pierce Colfer dkk. 2016. "Gender dan Hutan: perubahan iklim, tenurial, rantai nilai dan isu-isu yang bermunculan"
- David, Clarissa C, Jose Ramon Albert, dan Jana Flor Vizmanos. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5: Bagaimana cara agar Filipina mencapai kesetaraan gender?* Quezon City: Philippine Institute for Development Studies.
- Deloitte. 2015. *Perempuan, energi dan pemberdayaan ekonomi. Menerapkan lensa gender untuk memperkuat dampak dari akses energi*. Diakses Januari 2022.
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/women-empowerment-energy-access/DUP_950-Women-Energy-and-Economic-Empowerment_MASTER1.pdf.
- FAO. 2016. "Gender dalam Modul Kehutanan"

- . 2018. *Kotak Alat Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan meningkatkan pertimbangan gender di dalam modulnya*. Diakses Januari 2022. <https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/sfm-home/detail-events/en/c/1145493/>.
- FAO. n.d. "Perempuan di Kehutanan: tantangan dan peluang."
- FAO, IFAD & World Bank. 2015. "Gender dalam Pertanian Cerdas Iklim."
- GCF & UNWOMEN. 2017. "Mengarusutamakan Gender dalam Proyek Dana Iklim Hijau."
- GCF. 2013. *Penilaian Gender: Meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir yang rentan terhadap dampak terkait perubahan iklim di Vietnam*. GCF.
- Gender CC. n.d. Transportasi, gender dan perubahan iklim. Diakses Januari 2022. <https://www.gendercc.net/gender-climate/transport.html>.
- Gender Monitoring Office. 2019. Kondisi dari Kesetaraan Gender di Rwanda. GMO. http://gmo.gov.rw/fileadmin/user_upload/Researches%20and%20Assessments/State%20of%20Gender%20Equality%20in%20Rwanda.pdf.
- Genderlinks. 2021. "Barometer Gender: Keadilan Iklim."
- GenderSmart. 2021. *Investasi Gender & Iklim: Sebuah strategi untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan*. <https://static1.squarespace.com/static/6089294d7cb43b4cfff93591/t/60ec750cdcef4a49b3a96120/1626109200947/GenderSmart+Climate+Report.pdf>.
- Ghafar, Adel Abdel. 2021. "Penyebab dan Akibat Ketidaksetaraan di Mesir". *Edisi Khusus: Ekonomi Politik Timur Tengah Kontemporer* 111 (1): 5-26. doi:<https://doi.org/10.1111/muwo.12370>.
- Global Citizen. 2019. *4 Wanita Dibunuh Setiap Hari di Brasil selagi Femisida Berlanjut*. Diakses Maret 2022. <https://www.globalcitizen.org/en/content/femicide-brazil-2019/>.
- Government of the Lao People's Democratic Republic. 2018. "Tinjauan Nasional Sukarela."
- H Jabeen. 2014. "Mengadaptasi lingkungan binaan: peran gender dalam membentuk kerentanan dan ketahanan terhadap iklim ekstrem di Dhaka."
- Hasan dkk. 2013. "Determinan dari Pertumbuhan Usaha Mikro yang Dimiliki dan Dioperasikan Perempuan: Kasus Garissa, Kenya. *Jurnal Internasional Bisnis dan Perdagangan* Vol. 2, No.7."
- Idris. 2018. "Hambatan bagi inklusi ekonomi perempuan di Tanzania."
- IEA. 2020. *SDG7: Data dan Proyeksi - Akses ke listrik*. Diakses Januari 2022. <https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity>.

- IEAb. 2020. *SDG7: Proyeksi data - Akses ke masakan bersih*. Diakses Februari 2022. <https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-clean-cooking#abstract>.
- IFAD. 2020. *Membangun ketahanan dan penghidupan perempuan*. Diakses Februari 2022. <https://www.ifad.org/en/web/latest/-/story/building-women-s-resilience-and-livelihoods>.
- IFC. n.d. "Menjembatani Kesenjangan Gender dalam Akses terhadap Keuangan."
- IIED. 2021. *Apa yang diinginkan perempuan – bagian dua: untuk memetakan kerentanan terhadap perubahan iklim*. Diakses Januari 2022. <https://www.iied.org/what-women-want-part-two-map-vulnerability-climate-change>.
- IIS D. 2021. *Investasi Berkelanjutan Lensa Gender*. 31 Januari. <https://www.iisd.org/articles/gender-lens-sustainable-investing>.
- ILO. 2013. "Perempuan dalam Sektor Transportasi."
- International Institute for Sustainable Development. 2021. *Mengintegrasikan Konsiderasi Gender ke dalam Obligasi Hijau*. <https://www.iisd.org/system/files/2021-10/gender-considerations-green-bonds.pdf>.
- International Transport Forum. 2019. "Pengajuan oleh Forum Transportasi Internasional (ITF) dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan: Gender dan Perubahan Iklim."
- Isbell, thomas, David Jacobs, dan Christina Scheller. 2019. *Bagi perempuan Senegal, kemajuan itu nyata tetapi tidak merata*. Afrobarometer. <https://afrobarometer.org/publications/ad305-senegalese-women-advancement-real-uneven>.
- Islamic Development Bank. 2019. *Profil Gender Negara: Uganda*. Islamic Development Bank. <https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2020-09/Uganda%20Gender.pdf>.
- IUCN & WEDO. 2011. "Hutan dan Gender."
- IUCN. 2020. *Kekerasan berbasis gender dan lingkungan*. Diakses Februari 2022. <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/gender-based-violence-and-environment#:~:text=Resource%20scarcity%2C%20conflicts%20and%20displacement,Climate%20change%20worsens%20these%20effects>.
- IUCN. 2013. "Indeks Lingkungan dan Gender."**
- Jennings, G. 2020. "MENDAPATKAN ATAU KEHILANGAN DASAR: MEMASTIKAN TRANSPORTASI PASCA-COVID-19 MELAYANI KEBUTUHAN PEREMPUAN DI KOTA SUB-SAHARA AFRIKA BERPENDAPATAN RENDAH."
- JICA. 2013. "Profil Gender Negara: Pantai Gading."
- JICA. 2016. "Profil Gender Negara: Laporan Final Tanzania."

- Kachana Ginige dkk. 2009. "Pengarusutamaan Gender dalam Pengurangan Bencana: Mengapa dan Bagaimana? Pencegahan dan Penanggulangan Bencana."
- Kachana Ginige et al. 2014. "Mengatasi Kerentanan Perempuan dengan Mengintegrasikan Perspektif Gender ke dalam Pengurangan Risiko Bencana di Lingkungan Binaan."
- Kingdom of Cambodia. 2019. *Tinjauan Nasional Sukarela Kamboja 2019*. UN.
- Lao Women's Union. 2019. "Ulang Tahun ke Dua Puluh Lima Konferensi Dunia Keempat mengenai Perempuan dan Adopsi dari Deklarasi dan Platform Beijing (BPfA+25)."
- Linh, Nguyen Sy. 2021. *Keadaan dari Kesetaraan Gender dan Perubahan Iklim di Vietnam*. UNEP, UN Women and SIDA.
- Moglia, Magnus, Kim S Alexander, Silva Larson, Anne (Giger)-Dray, Garry Greenhalgh, Phommath Thammavong, Manithaythip Thephavanh, dan Peter Case. 2020. "Peran gender dalam Transisi Agraria: Sebuah studi tentang pertanian padi dataran rendah di RDR Laos." *Keberlanjutan* 12 (13): 5403.
- MWCA. 2018. "Kementerian Perempuan dan Anak – Bab 7." https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/5e31763f_f5b2_4ecb_bf9a_edc8609d2f3f/G-1_06_30_Women_English.pdf.
- Nesbitt-Ahmed et al. 2015. "Membuat agar Perawatan Terlihat: Kisah Berpengaruh mengenai Perubahan Kebijakan tentang Pekerjaan Perawatan Tidak Berbayar", Kisah dari Pengaruh, Gender, Kekuasaan dan Program Seksualitas."
- Nguyen, Huong Thu. 2019. "Kerentanan gender pada waktu Bencana Alam: Kekerasan Pria-ke-Wanita di Filipina setelah Topan Super Haiyan." *Kekerasan terhadap Wanita* 25 (4): 421-440.
- Nilo A dan Fernandes C. 2021. "Risiko kehilangan Agenda 2030 di Brasil." <https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/the-risk-of-losing-the-2030-agenda-in-brazil/>.
<https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/the-risk-of-losing-the-2030-agenda-in-brazil/>.
- OECD. 2014. "Institusi Sosial & Indeks Gender: Laporan Sintesis." <https://www.oecd.org/dev/development-gender/BrochureSIGI2015-web.pdf>.
- OHCHR. 2022. *Komite dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan mengulas situasi perempuan di Pantai Gading*. Diakses Maret 2022. <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24805&LangID=E>.
- Open Government Partnership. 2018. *Data terbuka mengenai femisida di Brasil*. <https://www.opengovpartnership.org/stories/open-data-about-femicide-in-brazil/>.

- Orleck-Jetter, Evann. 2018. "Membantu perempuan yang terpinggirkan di Kamboja." 12 Oktober. Diakses pada 8 Maret 2022. <https://borgenproject.org/tag/gender-equality-in-cambodia/>.
- P. Kristjanson et al . 2019. "Mengambil Tindakan atas Kesenjangan Gender di Lanskap Hutan."
- Phongluxa, Khampheng, Ghislaine Langeslag, Tej Ram Jat, Sengchanh Kounnavong, Mariam A Khan, dan Dirk R Essink. 2020. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan remaja di RDR Laos." *Global Health Action* 13.
- Rainforest Alliance. 2020. *Perempuan Adalah Kunci Ketahanan Lingkungan*. Diakses Februari 2022. <https://www.rainforest-alliance.org/insights/women-are-the-key-to-environmental-resilience/>.
- Republic of Indonesia. 2021. *Tinjauan Nasional Sukarela (VNR) Indonesia 2021*. Republic of Indonesia. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf.
- Republic of Uganda. 2020. *Laporan Tinjauan Nasional Sukarela mengenai Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Kampala: Republic of Uganda.
- Reyes, Celia M, Jose Ramon Albert, Aubrey D Tabuga, Arkin A Arboneda, Jana Flor Vizmanos, dan Carlos C Cabaero. 2019. *Tinjauan Nasional Sukarela Filipina mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Quezon City: Philippine Institute for Development Studies.
- S. Huyer et al. 2021. "Memperluas Peluang: Sebuah kerangka kerja untuk pertanian tangguh iklim yang inklusif secara sosial dan gender."
- S. Kottogoda. 2011. "Mengarusutamakan Gender dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana: Isu dan Tantangan Utama di Kawasan Asia-Pasifik."
- Samir, Nehal. 2018. "Ketidaksetaraan gender: Sebuah krisis yang berkelanjutan." *Daily News Egypt*. <https://dailynewsegyp.com/2018/05/31/gender-inequality-a-continuing-crisis/>.
- Saunders, K. 2019. "Sektor mobilitas sedang berada di ambang kebangkitan."
- Sothorn, Kem, Ros Bandeth, Florent P.B Zwiers, dan Kem Keothyda. 2019. *Pemberdayaan Perempuan di Kamboja*. Phnom Penh: Parliamentary Institute of Cambodia.
- Statista. 2021. Indeks kesenjangan gender di Tanzania dari 2016 hingga 2021. Diakses Maret 2022. <https://www.statista.com/statistics/1220574/gender-gap-index-in-tanzania/#:~:text=The%20gender%20gap%20index%20score,countries%20in%20Sub%2DSaharan%20Africa>.
- Tacoli. 2012. "Urbanisasi dan Munculnya Masalah Kependudukan di Kota Kertas Kerja 7. Urbanisasi, gender dan kemiskinan urban: pekerjaan berbayar dan pekerjaan perawatan tidak berbayar di kota."
- The United Republic of Tanzania. 2005. "Strategi Nasional untuk Gender."

- UGBS. 2019. *Isu Gender di Uganda: Sebuah analisis dari kekerasan berbasis gender, kepemilikan aset, dan pekerjaan.* UGBS. https://www.ubos.org/wp-content/uploads/publications/03_2019UBOS_Gender_Issues_Report_2019.pdf.
- PBB. 2019. *Model Pertanian Tangguh Iklim yang Dipimpin Perempuan (WCRF).* Diakses Februari 2022. <https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=31017>.
- UN. 2019. "Laporan Tinjauan Nasional Sukarela Rwanda 2019." https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23432Rwanda_2019_VNR_Final_Draft__17_06_2019.pdf.
- UN Women. 2022. "Lembar Fakta Negara: Filipina." Diakses pada 09 Maret 2022. <https://data.unwomen.org/country/philippines>.
- UN Women. n.d. *Senegal.* <https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/west-and-central-africa/senegal>.
- UNDP. 2018. *Strategi Kesetaraan Gender: UNDP Rwanda (2019-2022).* Kigali: UNDP.
- UNDP. 2019. *Indikator Responsif Gender: Perencanaan dan Pelaksanaan dari Gender dan NDC.* <https://www.ndcs.undp.org/content/ndc-support-programme/en/home/impact-and-learning/library/gender-responsive-indicators-gender-and-ndc-planning-for-implementation.html>.
- UNDP. 2020. "Laporan Perkembangan Manusia - Tanzania."
- UNDP. 2020. "Laporan Perkembangan Manusia - Vietnam."
- UNDP. 2020. *Laporan Perkembangan Manusia 2020.* UNDP. <https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/UGA.pdf>.
- UNDP. 2020. *Laporan Perkembangan Manusia 2020.* UNDP. <https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/SEN.pdf>.
- UNDP. 2020. "Laporan Perkembangan Manusia 2020: Brazil." <https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/BRA.pdf>.
- UNDP. 2020. "Laporan Perkembangan Manusia 2020: Kamboja." <https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/KHM.pdf>, UNDP.
- UNDP. 2020. *Laporan Perkembangan Manusia 2020: Pantai Gading.* <https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/CIV.pdf>, UNDP.
- UNDP. 2020. *Laporan Perkembangan Manusia 2020: Kenya.* <https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/KEN.pdf>, Kenya: UNDP.
- UNDP. 2020. *Laporan Perkembangan Manusia 2020: Republik Demokratik Rakyat Laos.* UNDP.

- UNDP. 2020. *Laporan Perkembangan Manusia 2020: Afrika Selatan*.
<https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/ZAF.pdf>, South Africa: UNDP.
- UNDP. 2020. *“Laporan Perkembangan Manusia 2020: Trinidad dan Tobago.”*
<https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/TTO.pdf>.
- UNDP. 2020. *“Laporan Perkembangan Manusia: Bangladesh.”* <https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/BGD.pdf>.
- UNDP. 2020. “Morocco Human Development Report” [Laporan Pengembangan Manusia Maroko]
- UNEP. 2020. *Moda transportasi yang aman untuk wanita hanya dapat berarti konektivitas yang lebih baik*. Februari. Diakses Januari 2022. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/safe-transport-modes-women-can-only-mean-better-connectivity>.
- UNESCO. 2022. “Kamboja - Indikator Gender - Persepsi kesetaraan gender.” Diakses pada 8 Maret 2022. <https://en.unesco.org/creativity/cambodia-gender-indicator-perception-gender-equality>.
- UNFPA. 2021. “Penilaian Gender dan Inklusi dari Pandemi Covid-19 pada perempuan dan anak perempuan yang rentan di Filipina.” 21 Maret. Diakses pada 09 Maret 2022. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gender_report_v09.pdf.
- . 2022. “Hak asasi manusia & kesetaraan gender: Kamboja.” Diakses pada 8 Maret 2022. <https://cambodia.unfpa.org/en/node/15236>.
- United Nations. 2020. “Konvensi mengenai Eliminasi.” <https://www.ecoi.net/en/file/local/2026585/N2006212.pdf>, Pakistan.
- United Republic of Tanzania. 2019. “Tinjauan Nasional Sukarela 2019.”
- UNWOMEN. 2021. “Memberdayakan perempuan melalui pertanian yang tahan iklim di Afrika barat dan tengah.”
- USAID. 2020. “Laporan Akhir Analisis dan Penilaian Gender USAID/Mesir.” https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X46M.pdf.
- USAID. 2018. “Analisis Gender USAID/Maroko.”
- Vietnam. 2018. “Tinjauan Nasional Sukarela.” Ha Noi.
- Vongxay, Viengnakhone, Kongmany Chaleunvong, Dirk R Essink, Jo Durham, dan Vanphanom Sychareun. 2020. “Pengetahuan dan sikap terhadap aborsi di kalangan remaja di RDR Laos.” *Global Health Action* 13 (2).
- Wikipedia. 2022. *Aborsi di Brazil*. Diakses pada Maret 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Brazil.

- World Bank. 2021. *Mengisi kesenjangan di pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam transportasi*. Diakses Januari 2022. <https://blogs.worldbank.org/transport/filling-knowledge-gaps-gender-equality-transportation>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Kamboja* Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2022/snapshots/Cambodia.pdf>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Pantai Gading*. Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2022/snapshots/Cote-divoire.pdf>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Mesir* Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/egypt-arab-rep/2022>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: RDR Laos*. Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2022/snapshots/Lao-pdr.pdf>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Filipina*. Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2022/snapshots/Philippines.pdf>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Rwanda*. Diakses Maret 2022. / <https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/rwanda/2022>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Senegal*. Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/senegal/2022>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Afrika Selatan*. Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/south-africa/2022>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Tanzania*. Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/tanzania/2022>.
- 2022. *Perempuan, Bisnis dan Hukum: Vietnam*. Diakses Maret 2022. <https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/vietnam/2022>.
- World Economic Forum. 2021. *Laporan Kesenjangan Gender Global*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf, Cologny/Geneva: WEF.
- World Economic Forum. 2021. *Laporan Gender Global 2021*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf, Geneva: WEF.
- World Economic Forum. 2021. "Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia - Afrika Selatan." https://www3.weforum.org/docs/wef_gggr_2021.pdf, South Africa.
- Ylipaa, Josephine, Sara Gabriellsson, dan Anne Jerneck. 2019. "Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketidaksetaraan Gender: Wawasan dari Pedesaan Vietnam." *Keberlanjutan* 11 (10): 2805.

ⁱ Indonesia; Filipina; Brazil; Trinidad dan Tobago; Afrika Selatan; India; Bangladesh; Pakistan; Vietnam; Kenya; Rwanda; Pantai Gading; Mesir; Maroko; Senegal; Kamboja; Laos; Tanzania; Uganda

⁴ akses energi dan pembangkit listrik; transportasi rendah emisi; bangunan, kota, industri dan perawatan ; kesehatan, ketahanan pangan dan air; infrastruktur dan lingkungan binaan